

RENCANAKAN SIDANG TAHUNAN MPR RI PADA 15-16 AGUSTUS 2023

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.07/TH.XVII/JULI 2023



SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA
RAKYAT IKUT CAWE-CAWE
TENTUKAN CALEG BERKUALITAS



ISSN 0854-6371
9 770854 637158

22 Nasional
MK Putuskan Sistem Pemilu
Proporsional Terbuka

30 Kajian MPR
Menjaring Masukan untuk
Menyempurnakan Konstitusi

39 Selingan
Pekan Raya Jakarta
dari Masa ke Masa

55 Sosialisasi
Bansoet Ajak Wujudkan
Visi Indonesia Emas 2045



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

EDISI NO.07/TH.XVII/JULI 2023



08 BERITA UTAMA

Rakyat Ikut Cawe-Cawe Tentukan Caleg Berkualitas

Atas putusan MK itu maka para Caleg bisa berkompetisi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan rakyat juga bisa menentukan pilihannya sesuai dengan selera mereka masing-masing. Rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan siapa kandidat yang layak mewakili mereka di kursi parlemen.



16 Nasional
Rencana Sidang Tahunan MPR RI pada 15-16 Agustus



52 Sosialisasi
Pilihan Pemimpin yang Memiliki Moral dan Berintegritas Pancasila



39 SELINGAN
Ide Haji Mangan, Dukungan Bang Ali



84 Profil
Ahmad Syaikhul

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kajian MPR	30
Kolom	34
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	76
Wawancara	78
Figur	80
Ragam	82
Dari Rumah Kebangsaan	88
Rehal	90



COVER

Edisi No.07/TH.XVII/Julii 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Rakyat-lah yang Memilih Caleg Berkualitas

DALAM rangkaian tahapan pemilu saat ini, partai politik (Parpol) telah menyerahkan daftar bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemeriksaan berkas para Caleg yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024. Pengajuan bakal Caleg ini sesuai dengan sistem pemilu yang diterapkan, yaitu sistem proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional terbuka ini, pemilih akan mencoblos nama Caleg yang tertera dalam surat suara.

Namun, di tengah proses itu, pada November 2022, enam warga negara justru mengajukan gugatan *judicial review* sejumlah pasal, terutama pasal 168 ayat 2 UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon berharap, MK mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup di mana dalam sistem ini pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai politik saja. Setelah melalui proses persidangan di MK, pada pertengahan Juni 2023 MK menggelar sidang putusan atas gugatan *judicial review* tersebut.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, pada Kamis, 15 Juni 2023, MK menolak permohonan pemohon *judicial review* untuk seluruhnya. MK mengetuk palu bahwa sistem pemilu pada Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilih memilih Caleg secara langsung bukan hanya memilih partai politik. Putusan MK ini diwarnai *dissenting opinion* dari salah satu hakim MK.

Putusan MK membuat lega banyak pihak, terutama partai politik dan para bakal Caleg. Putusan MK itu sekaligus menjawab rumor “bocoran” yang menyebutkan, MK akan mengembalikan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup. Partai politik dan para bakal Caleg menyambut positif putusan MK karena sesuai dengan aspirasi dan kehendak sebagian besar masyarakat. Sebelumnya, perwakilan delapan partai politik di parlemen—

minus PDI Perjuangan yang mendukung sistem proporsional tertutup—telah menggelar pertemuan menolak sistem proporsional tertutup.

Langkah berikutnya adalah bagaimana partai politik menyiapkan bakal Caleg yang berkualitas dalam Pemilu 2024 mendatang. Seperti disebutkan salah seorang hakim MK dalam sidang terbuka putusan *judicial review* sistem pemilu, persoalan mengenai kualitas pemilu maupun kualitas Caleg bukan terletak pada sistem pemilu, apakah coblos parpol (proporsional tertutup) atau coblos Caleg (proporsional terbuka) melainkan terletak pada soal lain, yaitu peran partai politik.

Dalam kaitan itulah, partai politik harus memperkuat kelembagaannya, terutama dengan melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, serta rekrutmen anggota parpol yang berkualitas. Dengan cara seperti itu maka partai politik bisa menghasilkan kader parpol dan Caleg DPR atau DPRD, serta calon pimpinan nasional yang mumpuni.

Tak bisa dipungkiri, sejumlah partai politik sudah menjalankan upaya untuk menyiapkan bakal Caleg berkualitas. Misalnya, dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk bakal Caleg DPR/DPRD, pembekalan para Caleg, strategi turun ke masyarakat, berkomunikasi, dan pemanfaatan media sosial. Dengan upaya itu diharapkan Caleg tidak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki dedikasi, loyalitas, dan kompetensi yang mumpuni.

Atas putusan MK yang bersifat final dan mengikat bahwa Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka, maka pada pemilu nanti rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih dan menentukan Caleg. Rakyat-lah yang akan memilih dan menentukan Caleg (yang berkualitas). Untuk itu, para Caleg harus berkompetisi secara sehat tanpa menggunakan cara-cara kotor dan rakyat-lah yang menentukan pilihannya sesuai dengan selera masing-masing. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Plt. Jenedjri M. Gaffar

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Dyastasita, Heri Herawan,
Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,

Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,

Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,

Achmad Farobi,

Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Menjadikan Sistem Ketatanegaraan Adaptif Dengan Perubahan Zaman

PERUBAHAN zaman yang nyata-nyata menghadirkan ragam tantangan baru hendaknya menjadi faktor pengingat bagi semua elemen bangsa untuk tidak lengah pada urgensi penguatan aspek ketatanegaraan yang adaptif. Sistem ketatanegaraan yang adaptif dengan perubahan zaman harus berfokus pada semangat memperkokoh pondasi NKRI, melestarikan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sumber hukum, serta terjaganya ketahanan nasional.

Ragam tantangan baru bagi banyak negara-bangsa selalu muncul dari perubahan tatanan dunia. Pasca perang dunia kedua, ketika komunitas internasional mulai menelaah untung rugi perdagangan bebas, salah satu tema yang dikedepankan dan dikalkulasikan adalah besar-kecilnya risiko bagi negara-bangsa ketika dunia tidak lagi terkotak-kotak oleh batas negara.

Demi kelancaran lalu lintas barang dan jasa terbentuklah blok-blok perdagangan sehingga dunia nyaris tidak lagi menerapkan sekat pembatas yang kaku (*borderless world*) atau globalisasi. Tantangan atau masalah bagi sektor bisnis dan komunitas pelaku usaha, termasuk UMKM, adalah membuat ragam produk yang kompetitif dengan biaya produksi yang efisien agar bisa dijual di banyak negara.

Tatanan dunia kemudian terus berubah berkat keberhasilan para pakar mewujudkan jaringan internet (*Interconnected Network*) pada dasawarsa 80-an, yang pemanfaatannya oleh publik di berbagai negara dimulai pada dasawarsa 90-an. Ketika fungsi internet sudah menyatu dengan aktivitas keseharian setiap orang, fungsi batas negara semakin menipis (*borderless state*).

Sebab, berkat jaringan internet, setiap orang bisa terhubung dan menjangkau berbagai wilayah di dunia tanpa harus meninggalkan rumah. Belum berhenti sampai di situ, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga saat ini nyata-nyata telah mewujudkan terbentuknya masyarakat tanpa sekat atau *borderless society*.

Perubahan tatanan yang berlangsung begitu cepat itu tak pelak menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Berkat kecepatan beradaptasi dengan semua perubahan itu, ragam manfaatnya pun sudah dialami dan dirasakan langsung oleh setiap

orang pada berbagai aspek kehidupan.

Ketika masyarakat sudah beradaptasi dengan semua perubahan itu, bagaimana dengan aspek sistem ketatanegaraan Indonesia? Sudah cukup efektifkah sistem ketatanegaraan beradaptasi percepatan globalisasi yang menyebabkan semakin menipisnya fungsi batas negara (*border state*)? Inilah tantangan yang harus segera dijawab oleh semua elemen bangsa. Sistem ketatanegaraan harus segera dibuat adaptif dengan perubahan zaman agar semakin memperkokoh pondasi NKRI, kuat menjaga dan merawat kelestarian Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sumber hukum, serta menjaga dan merawat ketahanan nasional.

Percepatan globalisasi serta reduksi atas fungsi batas negara sudah pasti menghadirkan eksek. Dan, suka tak suka, harus diakui bahwa Indonesia telah dan sedang menghadapi eksek itu. Radikalisme dengan segala perilaku dan targetnya sudah merasuki sejumlah komunitas warga bangsa. Dari radikalisme itu muncul benih perlawanan terhadap negara dengan tujuan ingin mengeliminasi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara-bangsa, serta sebagai landasan dan sumber hukum nasional.

Bahkan, ada upaya berkelanjutan untuk mencekoki banyak komunitas dengan ajaran sesat yang diimpor, dengan tujuan merusak dan mengeliminasi budaya serta tradisi maupun kearifan lokal. Banyak komunitas diajarkan dan didorong untuk berperilaku intoleran. Kini, budaya gubuk dan rukun yang menjadi karakter warga bangsa sejak dahulu semakin menipis.

Sistem ketatanegaraan yang belum efektif juga terbaca dari keberhasilan para penganut paham radikal menyusup ke dalam tubuh birokrasi negara dan daerah. Indikasi lain dari kelemahan sistem ketatanegaraan sekarang adalah masuknya pelaku kejahatan kerah putih ke dalam birokrasi pusat dan daerah. Terpilihnya sejumlah figur yang inkompeten untuk memimpin daerah menjadi indikator lain yang menjelaskan masih adanya masalah dalam sistem ketatanegaraan.

Semua eksek itu tentu memunculkan pertanyaan tentang apa yang kurang dari sistem ketatanegaraan negara-bangsa ini. Akhir-akhir ini, sejumlah kalangan mulai menyuarakan aspirasi agar dilakukan

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



kajian atas kemurnian dan efektivitas Undang-undang Dasar 1945 hasil amendemen. Seperti diketahui, UUD 1945 telah diamandemen empat kali terhitung sejak 1999 hingga 2002.

Ada kalangan yang mendorong agar dilakukan amendemen terbatas untuk mengakomodir kebutuhan negara-bangsa akan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Kalangan lainnya menyarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen. Ada juga komunitas yang menginginkan perubahan dan kajian menyeluruh terhadap UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen. Lainnya menginginkan agar kembali pada UUD Tahun 1945 yang asli sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tentu saja ada juga komunitas yang berpendapat bahwa amendemen konstitusi tidak perlu dilakukan lagi karena konstitusi yang berlaku saat ini dinilai masih memadai.

Selain itu, mengemuka pula dorongan agar segera dimunculkan inisiatif pemulihan atau pengembalian wewenang konstitusional MPR membuat ketetapan yang mengikat (regeling). Apalagi, hierarki perundang-undangan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu hingga Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda).

Terakhir, dorongan ini disuarakan oleh Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, pada acara peluncuran 58 judul buku bertepatan dengan hari jadi ke-58 Lemhannas di Jakarta, pekan ketiga Mei 2023. Megawati berharap, Indonesia memiliki kembali sistem ketatanegaraan yang benar, sebagaimana para pendiri bangsa telah meletakkannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasca Indonesia merdeka.

Faktanya, UUD 1945 hasil amendemen yang menjadi landasan sistem ketatanegaraan Indonesia kini sedang dan terus berhadapan dengan perubahan zaman plus segala tantangannya. Agar 'hidup' dan 'bekerja', konstitusi tidak bisa dan tidak boleh menolak perubahan. Sebaliknya, konstitusi justru harus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Semua orang pun diingatkan bahwa roda perubahan akan terus berputar. Beberapa proses inovasi yang sedang berlangsung saat ini hendaknya juga disimak orang muda Indonesia untuk memahami arah perubahan di masa depan. Misalnya, uji coba klinis oleh Neuralink menanamkan chip buatannya di otak manusia. Neuralink, startup neurotech yang didirikan Elon Musk, sudah mendapatkan izin dari otoritas di Amerika Serikat (AS), yakni Food and Drugs Administration (FDA).

Izin FDA diterbitkan setelah Neuralink mencatat progres dalam mengembangkan implan otak untuk membantu pengguna lumpuh mengontrol teknologi eksternal dengan sinyal dari otak. Ini menjadi benih perubahan masa depan yang mungkin dirasakan cukup ekstrim.

Pertanyaan yang sangat relevan adalah sudah efektifkah sistem ketatanegaraan saat ini beradaptasi dengan percepatan globalisasi yang menyebabkan semakin menipisnya fungsi batas negara? Menjadi harga mati bahwa sistem ketatanegaraan di era apa pun harus mampu merawat dan memperkokoh pondasi NKRI, menjaga eksistensi Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sumber hukum, serta menjaga dan merawat ketahanan nasional.

Karena itulah sudah waktunya segenap elemen bangsa melakukan kajian mendalam atas konstitusi yang dijalankan hari ini. □

Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Rakyat Ikut **Cawe-Cawe** Tentukan Caleg Berkualitas



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Atas putusan MK itu maka para Caleg bisa berkompetisi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan rakyat juga bisa menentukan pilihannya sesuai dengan selera mereka masing-masing. Rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan siapa kandidat yang layak mewakili mereka di kursi parlemen.

PIMPINAN dan pengurus Partai politik serta para bakal calon legislatif (Caleg) bisa bernafas lega. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. MK menolak seluruh gugatan terkait permohonan yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Kamis 15 Juni 2023.

Sebelumnya pengurus partai politik dan para Caleg harap-harap cemas menunggu putusan MK. Berawal pada 14 November 2022, enam orang warga negara Indonesia mengajukan gugatan *judicial review* terhadap sejumlah pasal, terutama pasal 168 ayat 2 UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka. Gugatan ini terdaftar dalam nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Mereka berharap MK mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup. Pemohon berdalil sistem proporsional terbuka mendistorsi peran sentral partai politik.

Menjelang MK mengeluarkan putusan akhir, mantan wakil menteri hukum dan HAM Prof. Denny Indrayana dari Australia mengabarkan informasi “bocoran” bahwa dalam perkara itu MK akan memutuskan bahwa sistem pemilu adalah sistem proporsional tertutup. Pada Ahad, 25 Mei 2023, Denny dalam akun instagramnya, @dennyindrayana99, menyebut, “informasi penting”.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 *dissenting*. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi”.

Unggahan Denny Indrayana soal rumor putusan MK mengundang heboh di jagad politik nasional. Merespon bocoran Denny Indrayana, pada Selasa, 30 Mei 2023, perwakilan delapan fraksi partai politik menggelar konperensi pers di lobi Gedung Nusantara III. Kedelapan partai politik—minus PDI Perjuangan, satu-satunya partai di parlemen yang mendukung sistem pemilihan proporsional tertutup—kembali menegaskan sikapnya menolak sistem proporsional tertutup. Delapan partai tersebut adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Keresahan partai politik dan bakal Caleg akhirnya sirna. “Bocoran” Denny Indrayana pun tidak terbukti. Dalam sidang terbuka pada Kamis, 15 Juni 2023, MK mengetuk palu bahwa sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Artinya, pemilih tetap bisa memilih Caleg secara langsung, bukan hanya memilih partai politik. Hakim MK, Arief Hidayat, dalam putusan tersebut



mengajukan *dissenting opinion*.

Sekadar informasi, sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan yang memungkinkan pemilih hanya memilih partai politik saja. Kursi yang dimenangkan partai politik diisi dengan kandidat-kandidat sesuai dengan ranking mereka dalam daftar kandidat yang ditentukan oleh partai. Biasanya, hanya nama partai yang dimunculkan dalam surat suara. Partai politik memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam penentuan kandidat partai yang terpilih untuk mengisi kursi-kursi di legislatif.

Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka pemilih memilih partai politik yang mereka sukai dan juga memilih kandidat yang mereka inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai tersebut. Biasanya, kandidat dalam daftar partai ditampilkan dalam surat suara. Para pemilih dapat memilih kandidat-kandidat dalam daftar kandidat suatu partai.

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menyambut baik putusan MK. Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menilai, keputusan MK tersebut



Sjarifuddin Hasan

sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia. Paling tidak keinginan masyarakat itu direpresentasikan oleh delapan partai di DPR RI yang sudah sejak lama menyampaikan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. “Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia

menghendaki Pemilu 2024 dilaksanakan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka,” katanya kepada *Majelis*.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini melanjutkan, keputusan MK itu sesuai dengan keinginan Partai Demokrat yang sejak awal meyakini bahwa sistem proporsional terbuka merupakan pilihan yang terbaik untuk diterapkan pada pemilu legislatif 2024. “Apalagi dari sisi persiapan dan semangat dari para kader partai, jelas para bakal calon legislatif menghendaki sistem proporsional terbuka. Jadi, seperti kebanyakan kader partai yang lain, kita menyambut baik putusan MK. Sekarang tinggal mengimplementasikan putusan MK dalam Pemilu 2024 nanti,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Tidak jauh berbeda, Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, juga menilai, putusan MK itu sesuai dengan aspirasi publik agar sistem proporsional terbuka tetap diberlakukan. Menurut Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, para hakim MK telah memutuskan gugatan permohonan sistem pemilu itu



Jazilul Fawaid

dengan bijak dan adil. “Syukur alhamdulillah, sekaligus kita mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada MK yang telah memutuskan secara bijak dan adil, serta sesuai dengan aspirasi,” kata Jazilul dalam pesan video usai MK menetapkan putusan gugatan sistem pemilu.

Gus Jazil menambahkan, putusan MK itu penting karena sebelumnya delapan partai politik di parlemen telah menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. “Perjuangan delapan partai politik untuk menolak sistem proporsional tertutup, alhamdulillah dikabulkan. MK telah menolak seluruhnya permohonan dari pemohon agar sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Seminggu setelah putusan MK tersebut, Humas MPR menggelar Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Putusan MK dengan Sistem Proporsional Terbuka”. Anggota MPR dari Kelompok DPD, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH., yang menjadi pembicara diskusi itu meminta semua pihak untuk menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Karena sifatnya final dan mengikat maka putusan MK itu tidak perlu diutak-utik lagi.

“Jadi, kita hormati dan laksanakan saja putusan MK yang menolak gugatan permohonan sistem pemilu tertutup. Artinya, sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan melaksanakan putusan MK ini maka stabilitas persiapan Pemilu 2024 dan Pemilihan

Presiden serta Pilkada tetap terjaga,” katanya dalam diskusi yang digelar di Media Center MPR/DPR/DPD pada Rabu, 21 Juni 2023.

Untuk itu, Jimly mengajak semua pihak untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh sistem proporsional terbuka ini. “Ada baiknya untuk jangka panjang kita memikirkan apakah sistem proporsional terbuka ini memang sudah ideal, atau sebaliknya sistem proporsional terbuka ini lebih banyak mudharatnya. Kita lihat apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya,” kata Senator DKI Jakarta ini.

Agak berbeda, anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, berpendapat, MK seharusnya tidak memutuskan soal sistem pemilu. Sebaiknya urusan sistem pemilu ini



Jimly Asshiddiqie

dikembalikan lagi ke DPR sebagai pembuat undang-undang. “Sejak awal, kami menyampaikan bahwa urusan sistem pemilu ini lebih baik dikembalikan lagi kepada DPR sebagai pembuat undang-undang. *Open legal policy* sebenarnya ada di DPR. Jadi, MK semestinya tidak secara langsung memutuskan, cukup dikembalikan ke DPR,” katanya.

Menurut Syaiful Huda, sudah ada preseden ketika MK mengembalikan lagi kepada DPR. Contohnya, ketika MK mengembalikan putusan (*open legal policy*) kepada DPR terkait gugatan *presidential threshold*. MK menyatakan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah konsitusional. Sedangkan besaran *presidential threshold*, syarat pencalonan presiden, merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) yang merupakan ranah pembentuk undang-undang.

“Terlebih urusan sistem pemilu memang lebih baik bila dikembalikan ke DPR. Dalam konteks konfigurasi politik, dari 9 partai politik di parlemen, sebanyak delapan partai sudah menyatakan menolak sistem proporsional tertutup. Jadi, sebenarnya lebih mudah bagi MK untuk langsung saja memutuskan dikembalikan ke DPR agar lebih aman,” jelas Syaiful Huda.

Kualitas Calon Legislatif

Pertanyaannya, apakah ada hubungan sistem pemilu dengan kualitas pemilu dan Caleg? Ada anggapan dengan sistem proporsional tertutup maka partai politik dapat menyeleksi dan menetapkan Caleg yang berkualitas. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, ada anggapan popularitas dan kekuatan modal (uang) sangat menentukan keterpilihan seorang Caleg, bukan berdasarkan kualitas Caleg.

Dalam sidang terbuka putusan gugatan sistem pemilu, MK menyatakan, persoalan mengenai kualitas pemilu maupun kualitas Caleg bukan terletak pada sistem pemilu, apakah coblos parpol (proporsional tertutup) atau coblos Caleg (proporsional terbuka) melainkan ada persoalan lain, yaitu peran partai politik. Dalam sistem proporsional terbuka, partai politik tetap memainkan peran sentral.

MK menilai, partai politik seharusnya berupaya memperkuat kelembagaannya, terutama melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, dan rekrutmen anggota parpol yang berkualitas. “Melalui upaya tersebut, partai politik akan menghasilkan kader parpol dan Caleg DPR/DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni,” kata Hakim MK, Saldi Isra, ketika membacakan putusan MK terhadap gugatan permohonan *judicial review* sistem pemilu.

Saldi menambahkan, partai politik memiliki peran sentral dalam menentukan dan memilih Caleg. Kalau tidak sesuai dengan ideologi, visi misi, dan cita-cita parpol, tentu parpol seharusnya tidak menjadikan kader tersebut sebagai bakal Caleg. Artinya, persoalannya bukan pada UU dan sistem pemilu, melainkan pada parpol itu sendiri. Jika terlanjur diajukan sebagai bakal Caleg, parpol dapat meninjau atau mempertimbangkan kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap.

Sebelum putusan MK sebenarnya partai politik telah menyiapkan bakal Caleg. Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya, menggelar uji kelayakan dan kepatutan (UKK) untuk bakal calon anggota legislatif DPR. Dalam tes yang diselenggarakan secara terbuka itu, setiap peserta dinilai dua penguji, yakni dari internal PKB dan eksternal. Penguji internal berasal dari Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, sedangkan dari luar adalah tokoh publik dan akademisi, di antaranya anggota Dewan Penasihat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, dan mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Muhammad AS Hikam.

Proses penilaian bakal Caleg tidak berhenti pada UKK. Setelah itu, para bakal Caleg akan melalui ujian lanjutan dan pembekalan sebelum menjadi Caleg. Melalui proses bertahap ini diharapkan bisa mendapatkan Caleg yang tak hanya berintegritas, tetapi juga memiliki kompetensi profesional.

Di Partai Golkar, para bakal Caleg mengikuti pendidikan politik, khususnya terkait dengan penguatan ideologi partai. Selain itu, para bakal Caleg juga dibekali dengan pendidikan terkait strategi turun ke masyarakat, berkomunikasi, dan penggunaan media sosial. Melalui PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela atau berintegritas,



Saldi Isra

Partai Golkar ingin menawarkan kepada pemilih calon-calon yang berkualitas.

Dari pandangan Syarief Hasan, setelah MK menetapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024, partai politik menyambut putusan MK itu dengan antusias melalui persiapan para kader partai menjadi Caleg. “Keadaan ini akan membawa dampak kepada persaingan yang sehat. Dengan sistem proporsional terbuka, mau atau tidak mau, semua Caleg juga harus siap. Dengan sistem proporsional terbuka semua Caleg memiliki kesempatan dan juga peluang yang sama,” katanya.

Syarief Hasan menambahkan, nomor urut dalam Daftar Calon Tetap yang tertera dalam surat suara pemilu memang mempunyai pengaruh. Namun, keberhasilan seorang



Syaiful Huda

Caleg sesungguhnya bukan karena nomor urut, melainkan karena persiapan yang matang. “Caranya ya harus kerja, terjun langsung ke konstituen. Siapa yang lebih sering terjun ke rakyat, dialah yang akan terpilih. Untuk memenangkan Pileg, para Caleg harus mau bekerja keras, baik pagi, siang, maupun malam,” ucapnya.

Dalam pandangan yang sama, Gus Jazil menegaskan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka menunjukkan daulat partai sekaligus daulat rakyat. Partai punya hak untuk merekrut dan memilih secara langsung bisa memilih dan menentukan siapa calon anggota legislatifnya. Sistem proporsional terbuka memungkinkan rakyat berpartisipasi sekaligus mendekatkan pemilih dengan calon yang dipilihnya. “Pemilihan yang aspiratif menjadi penting, karena para anggota dewan nanti merupakan perpanjangan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” ujar Wakil Ketua Umum PKB ini.

Politisi PKB lainnya, Syaiful Huda, membenarkan bahwa Ketua Umum PKB telah berpesan kepada kadernya bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. “Bagi partai seperti PKB, apakah sistem pemilu tertutup atau terbuka, sebenarnya kita siap,” ujarnya.

Dengan sistem proporsional terbuka, Syaiful Huda menyebutkan, partai sebagai pilar demokrasi harus mampu melakukan seleksi banyak figur. Tetapi, Syaiful Huda mengakui, dengan sistem proporsional terbuka ini para Caleg harus berkompetisi di dua level sekaligus, yaitu di level internal partai dan level di luar partai. “Jadi, di internal partai terjadi kompetisi antar Caleg. Pada saat yang sama, para Caleg juga harus berkompetisi dengan Caleg dari partai-partai lain. Ini tidak mudah,” ujarnya.

Atas putusan MK itu maka para Caleg bisa berkompetisi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan rakyat juga bisa menentukan pilihannya sesuai dengan selera masing-masing. Rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan siapa kandidat yang layak mewakili mereka di kursi parlemen. Dengan adanya putusan MK ini para caleg bisa berkompetisi dengan sehat tanpa menggunakan cara-cara kotor. □

MBO/BSC

Parpol Garda Terdepan Penentu Kualitas Caleg

Apapun sistem pemilu yang diterapkan, baik sistem pemilu proporsional terbuka maupun sistem pemilu proporsional tertutup, punya kekuatan dan kelemahan. Apapun sistem pemilu yang dipilih, partai politik tetap menjadi garda terdepan dan pintu penentu bagi kualitas calon anggota legislatif.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam pembacaan putusan hasil uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam sidang terbuka di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Kamis, 15 Juni 2023, Majelis Hakim MK yang diketuai Anwar Usman memutuskan, Pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. MK menolak seluruh gugatan terkait permohonan sistem pemilu proporsional tertutup.

Putusan MK memang patut diapresiasi karena sejalan dengan demokrasi dan keinginan rakyat. Dalam jajak pendapat *Kompas* pada awal pekan kedua Januari 2023, separuh lebih responden (55,5%) menginginkan mencoblos gambar parpol dan nama calon legislatif (Caleg) sekaligus pada pemilu nanti. Praktik sistem pemilu proporsional terbuka dengan mencoblos gambar parpol sekaligus nama Caleg sudah dijalankan selama beberapa pemilu belakangan ini.

Parpol dan Caleg menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah alasan separuh lebih responden dalam jajak pendapat

Kompas cenderung pada sistem proporsional terbuka. Model (sistem proporsional terbuka) memang sudah diterapkan pada Pemilu 2004. Kala itu masih setengah terbuka, yakni pemilih tetap mengutamakan mencoblos partai politik, tetapi diberi kesempatan memilih calon legislator. Caleg menjadi faktor pertimbangan pemilih menentukan pilihannya. Saat itu, pilihan terhadap Caleg tidak otomatis membuat Caleg meraih kursi. Kursi tetap ditentukan berdasarkan nomor urut Caleg di partai politik masing-masing.

Barulah pada Pemilu 2009, sistem pemilu proporsional terbuka dipraktikkan secara utuh. Hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang memutuskan, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. MK juga memutuskan siapa yang berhak menduduki kursi yang diraih partai politik merujuk pada calon legislator di partai tersebut yang meraih suara terbanyak.

Sejak Pemilu 2009 itulah terjadi persaingan antar-Caleg. Persaingan antar-Caleg tidak hanya terjadi antarpol partai politik yang berbeda, persaingan juga terjadi di antara para Caleg di dalam partai politik yang sama.

Maka, tidak jarang terjadi kolaborasi antara Caleg di tingkat DPR dengan Caleg di tingkat DPRD, baik dari partai politik yang sama maupun partai politik yang berbeda. Dengan kata lain, persaingan antar-Caleg semakin sengit dan keras.

Dalam bukunya, "Pembiayaan Pemilu di Indonesia" (Bawaslu, 2018), pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menggambarkan fenomena persaingan antar-Caleg yang ketat, termasuk persaingan Caleg di internal partai politik yang sama. Burhanuddin menulis, rata-rata margin kemenangan yang membedakan seorang Caleg yang lolos hanya 1,65%. Artinya, seorang Caleg hanya memerlukan selisih 1,65% untuk bisa lolos ke Senayan. "Maka tidak heran banyak Caleg yang masih berharap meraih kemenangan dengan menggunakan strategi politik uang," tulisnya.

Tak heran, efek samping dari penerapan sistem proporsional terbuka dengan sistem perolehan suara terbanyak bagi Caleg untuk mendapatkan kursi membuka kompetisi politik lebih bebas dan tidak terkendali, ditambah kentalnya praktik politik transaksional atau money politics. Dalam sistem pemilu proporsional terbuka, potensi transaksi politik uang lebih luas dan menyebar.

Faktor berikutnya adalah banyaknya partai politik yang lebih mengutamakan Caleg populer ketimbang Caleg berkualitas. Peralannya, dalam sistem proporsional terbuka, sosok Caleg sangat menentukan bagi perolehan suara. Partai politik tidak ingin repot dengan mengajukan para tokoh kompeten, namun tidak dikenal masyarakat. Itu sebabnya, partai politik memilih jalan yang paling mudah dengan menggaet sosok yang dikenal dan memiliki hati di masyarakat. Dengan popularitas tinggi, para artis terbukti lebih mudah memenangkan kontestasi politik (lihat boks "Fenomena Artis Sebagai Caleg").

Fenomena artis sebagai Caleg menjadi sebuah tren baru. Para artis yang sudah dikenal oleh masyarakat menjadi poin plus

bagi partai politik. Tujuannya hanya satu, yakni menjadikan para artis sebagai mesin untuk meraih kursi di parlemen. Terkait dengan kualitas, partai politik sejatinya tidak meributkan kompetensi para artis yang menjadi Caleg tersebut. Yang penting, seorang artis bisa menyumbang kursi di parlemen.

Namun, data menunjukkan persentasi keberhasilan Caleg artis dalam setiap pemilu terus menurun. Berturut-turut dari Pemilu

2009, 2014, dan 2019, persentase Caleg artis yang menang adalah 31%, 29%, dan lantas menjadi 12%. Namun, bukti itu tidak mengurangi minat partai politik memining para artis. Berdasarkan jumlah, partai politik justru makin banyak menggaet artis. Begitu pun pada Pemilu 2024, partai politik mendaftarkan artis sebagai Caleg.

Di sisi lain, fenomena artis Caleg atau Caleg artis ini bisa diputus bila partai politik secara sungguh-sungguh melaksanakan

kaderisasi. Dengan program kaderisasi yang matang, maka akah dihasilkan Caleg-Caleg yang bisa menangkap aspirasi rakyat.

Partai politik menjadi pintu penentu bagi kualitas Caleg. Apapun sistem pemilu, baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup, partai politik tetap menjadi garda terdepan dalam menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas, yang kapabel dan berintegritas. □

BSC

Fenomena Artis Sebagai Caleg

PARTAI politik (Parpol) telah mengajukan nama-nama sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang. Partai politik pun telah mendaftarkan bakal Caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masyarakat menyoroti beberapa nama bakal Caleg. Pasalnya, masih banyak partai politik yang menggaet para artis atau pelaku seni di Indonesia untuk maju sebagai Caleg. Mereka antara lain pemain sinetron, presenter televisi, chef, musisi, model, atlit, selebgram, pendakwah, hingga pelawak.

Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, menjadi modal bagi partai politik untuk memining Caleg artis sebanyak-banyaknya. PDI Perjuangan, misalnya, mencalonkan petahana seperti Krisdayanti, Rieke Diah Pitaloka, dan Rano Karno. PDI Perjuangan juga mendaftarkan beberapa nama baru artis sebagai Caleg. Sebut saja ada musisi Once Mekel, pelawak Denny Cagur, budayawan Taufik Hidayat Udjo, Marcel Siahaan, Tamara Geraldine, Sari Yok Kuswoyo, Andre Hehanusa .

Tak mau ketinggalan, dalam Partai Gerindra ada nama-nama seperti Ahmad Dhani, Ari Sihalale, Derry Drajat, Didi Mahardika, Jamal Mirdad, Melly Goeslaw, Moreno Suprpto, Rachel Maryam, Taufik Hidayat. Dari Partai Golkar ada nama-nama seperti Charles Bonar Sirait, Nurul Arifin, Tetty Kadi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada nama-nama Arzetti Bilbina, Norman Kamaru, Tommy



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kurniawan, Zora Vidyanata. Partai Demokrat mengajukan nama-nama artis seperti Dede Yusuf, Dina Lorenza, Emilia Contessa, Ingrid Kansil.

Partai Nasdem juga mengajukan kader artisnya menjadi Caleg, di antaranya penyanyi dangdut Anisa Bahar, Reza Artamevia, presenter Choki Sitohang, Nafa Urbach, Ramzi. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) memang sudah dikenal sebagai Partai Artis Nasional. Partai berlambang Matahari ini mendaftarkan antara lain Adelia Wilhemina, Astrid Kuya, Bebizie, Desy Ratnasari, Eko Patrio, Eksanti, Ely Sugigi, Haji Faisal, Lula Kamal, Opie Kumis, Primus Yustisio, Pasha Ungu, Uya Kuya, Verrel Bramasta. Sedangkan PKS

hanya ada satu nama artis yaitu Narji Cagur.

Partai politik mengharapkan para artis yang sudah dikenal masyarakat ini sebagai mesin untuk mendulang kursi di parlemen. Dalam beberapa kali pemilu, para artis dengan popularitas tinggi terbukti lebih mudah meraih suara dan memenangkan kontestasi politik dibanding Caleg yang tidak populer. Para artis juga menjadi kampanye gratis memperkenalkan partai politik. Tentu saja, partai politik bisa menghemat biaya kampanye karena para artis ini mampu memaksimalkan kapasitas dan media platform mereka untuk menggaet suara masyarakat. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA Wakil Ketua MPR RI

Sistem Proporsional Terbuka, Semua Caleg Harus Siap

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah memutuskan, Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam putusan tersebut, Hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dengan putusan itu, MK menolak seluruh gugatan terkait permohonan sistem proporsional tertutup.

Pada 14 November 2022, sebanyak 6 orang warga negara mengajukan gugatan untuk mengembalikan pemilu ke sistem proporsional tertutup. Salah satu alasan meminta sistem proporsional tertutup adalah karena partai politik mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh sebab itu, parpol berwenang menentukan Caleg yang akan duduk di lembaga legislatif. Sistem proporsional

tertutup merupakan sistem pemilihan yang memungkinkan pemilih hanya memilih partai politik saja.

Dengan putusan MK kembali ke sistem proporsional terbuka maka pemilih tetap bisa memilih Caleg secara langsung, bukan hanya memilih parpol. MK juga menyatakan, persoalan kualitas pemilu maupun kualitas Caleg DPR/DPRD bukan karena pada sistem pemilu apakah mencoblos parpol atau mencoblos Caleg.

Terkait dengan persoalan itu, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

MK resmi menolak gugatan permohonan uji materi mengenai sistem proporsional terbuka. Artinya, pemilu 14 Februari 2024, tetap akan menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos Caleg (calon legislatif). Sebelumnya, 8 fraksi DPR telah me-

nolak sistem proporsional tertutup. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap putusan MK, bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka?

Keputusan MK tersebut sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia. Paling tidak keinginan masyarakat itu direpresentasikan oleh delapan partai di DPR RI yang sudah sejak lama menyampaikan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup, dan menghendaki MK menolak gugatan judicial review untuk mengembalikan pada sistem proporsional tertutup. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia menghendaki Pemilu 2024 dilaksanakan seperti pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka.

Keputusan MK itu sesuai dengan pilihan kami di Partai Demokrat yang sedari awal meyakini bahwa sistem proporsional terbuka merupakan pilihan yang terbaik untuk diterapkan pada Pemilu Legislatif 2024. Apalagi, dari sisi persiapan dan

semangatnya jelas-jelas para kader menghendaki sistem proporsional terbuka.

Jadi, seperti kebanyakan kader partai yang lain, kita menyambut baik keputusan MK itu dan sekarang tinggal bagaimana agar keputusan itu bisa benar-benar terimplementasikan dalam pemilu nanti dengan bagus.

Baik sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Apa pengaruh dari sistem pemilu itu terhadap kualitas Pemilu dan Caleg?

Memang kita mengakui tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Tetapi, untuk saat sekarang, sistem proporsional terbuka merupakan pilihan yang terbaik. Bagi Partai Demokrat dan partai-partai lain beserta para kader, untuk saat ini sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik. Sebab, sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan seluas-luasnya yang sama kepada masing-masing Caleg untuk dipilih oleh rakyat. Kita akui memang ada kelemahan sistem proporsional terbuka. Tetapi kita bisa mengeliminir kelemahan dalam sistem proporsional terbuka.

Bagaimana cara mengeliminir kelemahan dalam sistem proporsional terbuka?

Pertama, harus ada pengawasan yang ketat. Kedua, harus ada komitmen dari para peserta pemilu legislatif, yaitu para Caleg, partai, dan kadernya, untuk tidak menghalalkan semua cara agar menang. Karena menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Kita harus saling menghormati satu sama lain, apakah antarsesama internal partai maupun dengan partai lain.

Dengan cara itu kita bisa meminimalisir semua persoalan yang mungkin timbul dengan penggunaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 nanti. Bawaslu harus netral, KPU juga demikian. Jadi, semua aturan itu sebenarnya sudah bagus. Kita juga sudah punya pengalaman dengan sistem proporsional terbuka pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu, semakin sering kita menggunakan sistem proporsional terbuka maka semakin kecil kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi ketidakpuasan terhadap Pileg.

Bagaimana dengan usulan kom-

binasi antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup?

Wacana pemakaian sistem proporsional kombinasi juga dimaksudkan untuk mengeliminir kelemahan kedua sistem yang ada. Pada kenyataannya memang ada pekerja partai yang setiap hari, dari pagi sampai sore, mengurus partai, sehingga tidak memiliki kesempatan ke Dapil (daerah pemilihan). Mereka adalah pekerja partai yang memiliki loyalitas sangat tinggi terhadap partai. Keadaan seperti ini menjadi persoalan, karena mereka tidak punya kesempatan bertemu dengan konsituen. Mereka juga kurang dikenal masyarakat di Dapilnya. Para pekerja partai ini pasti kalah dibanding orang-orang yang selama ini selalu berada di Dapil. Para pekerja partai juga kalah dengan pegiat



organisasi atau institusi manapun yang memang selalu di situ. Kalau dia selalu di dapilnya, memang akan dikenal.

Kedua, bagi orang-orang yang aktif di entertainment (dunia hiburan) misalnya, rata-rata sudah dikenal rakyat. Kalau dia maju menjadi Caleg dari Dapil tertentu maka dia pasti sudah dikenal oleh konsituen. Ini juga membuat pekerja partai yang loyal setiap hari di kantor tidak populer. Dengan pemakaian proporsional kombinasi, diharapkan kesenjangan itu bisa teratasi.

Sistem proporsional terbuka memberi peluang lebih besar kepada Caleg yang punya modal besar. Bagaimana pendapat Bapak?

Memang ada benarnya. Tetapi tidak selalu seperti itu. Banyak juga Caleg yang memiliki

modal, namun tidak terpilih. Artinya, beberapa Caleg dapat leluasa menggunakan kekuatan uangnya untuk kampanye. Katakanlah mereka menggunakan semua cara, termasuk menghamburkan uang untuk menarik konsituen, sekalipun cara itu tidak pantas diterapkan. Inilah contoh lain kelemahan sistem proporsional terbuka, sehingga ada pihak-pihak yang menginginkan menjadi sistem proporsional tertutup, dan langsung diberlakukan pada pemilu tahun 2024.

Apakah para Caleg dengan situasi sekarang tetap bisa menang dengan cara yang elegan?

Sekarang, setelah MK menetapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024, banyak partai menyambut putusan MK itu dengan antusias. Keadaan ini akan

membawa dampak kepada persaingan yang sehat. Dengan sistem proporsional terbuka, mau atau tidak mau, semua Caleg juga harus siap. Dengan sistem proporsional terbuka semua Caleg memiliki kesempatan juga peluang yang sama.

Bisa saja Caleg yang memiliki nomer urut satu, dua, atau tiga, tetapi mereka malah tidak terpilih. Atau Caleg yang menempati nomer urut di atas memang mereka yang berhasil. Tetapi, keberhasilan itu bukan karena nomor urut. Mereka berhasil karena memang sudah melakukan persiapan. Caranya, ya harus kerja, harus terjun di tengah konsituen. Siapa yang lebih sering terjun ke rakyat, itulah yang akan terpilih. Jadi, satu-satunya cara untuk memenangkan Pileg mereka harus mau kerja keras pagi, siang, sore hingga malam. □

Rapat Pimpinan MPR RI

Rencanakan Sidang Tahunan MPR RI pada 15-16 Agustus



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI direncanakan mulai pada 15 Agustus untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga tinggi negara dan dilanjutkan tanggal 16 Agustus mendengarkan laporan presiden dan pidato kenegaraan.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya memantapkan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023. Mengingat pandemi Covid-19 yang sudah mereda, Sidang Tahunan MPR RI 2023 diusahakan diselenggarakan terpisah dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI direncanakan mulai pada 15 Agustus untuk mendengarkan laporan kinerja lembaga tinggi negara langsung kepada rakyat Indonesia melalui forum ini dari mulai MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, BPK, hingga KY. Dilanjutkan tanggal 16 Agustus untuk mendengarkan laporan presiden dan pidato kenegaraan.

“Untuk merealisasikannya, pimpinan MPR akan segera melakukan pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara. Pertemuan konsultasi pertama dilakukan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan DPD RI pada akhir Juni 2023. Pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya masih dalam penyesuaian,” ujar Bamsot usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III MPR/ DPR/DPD RI, di Jakarta, Rabu (14/6/23).

Turut hadir para pimpinan MPR RI, antara lain Ahmad Basarah,

Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Yandri Susanto, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani (daring).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hingga saat ini MPR RI belum memiliki agenda untuk melakukan amendemen terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945. Jikapun ada usulan dan urgensi untuk melakukan amendemen akan dibahas setelah selesai Pemilu 2024, disaat kondusifitas bangsa sudah lebih sejuk.

“Kebutuhan amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang paling mendesak, yakni untuk menghadirkan kembali haluan negara yang kini dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pimpinan MPR RI yang juga merupakan representasi politik kebangsaan karena terdiri dari 9 partai politik dan satu DPD RI, telah sepakat bahwa rapat gabungan untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait PPHN, ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan, selesai pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga situasi lebih kondusif dan tenang,” jelas Bamsot.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menerangkan, terkait



peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2023 akan dipersiapkan secara matang sehingga Hari Konstitusi ini diperingati setiap tanggal 18 Agustus sebagai peringatan terhadap lahirnya

konstitusi Indonesia berjalan secara hikmat dan meriah.

Bamsoet mengingatkan bahwa pada bulan Agustus setidaknya terdapat tiga peristiwa bersejarah penting yang bangsa

ini peringati. Pertama, setelah dicengkram penjajahan selama berabad-abad, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dengan satu tekad menjadi bangsa merdeka, bangsa yang bebas menentukan nasibnya sendiri, bangsa yang mandiri, berani bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari paksaan dan intervensi pihak-pihak lain.

Kedua, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, untuk melaksanakan amanat Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai sebuah badan perwakilan, yang menjadi cikal bakal dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. □

HUT ke-20 Forum Silaturahmi Anak Bangsa

Bamsoet Ajak Tidak Mewariskan Konflik dan Tidak Membuat Konflik Baru

Seberat apapun beban yang ditanggung akibat konflik di masa lalu mampu diringankan oleh silaturahmi yang dijalin para generasi selanjutnya untuk menuju rekonsiliasi nasional.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi perjalanan 20 tahun Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Sekaligus mendukung hadirnya FSAB Muda sebagai generasi ketiga atau cucu dari para tokoh dan pelaku sejarah yang telah mengilhami terbentuknya organisasi FSAB.

Sebagai gerakan moral yang terus menyebarkan benih perdamaian ke berbagai penjuru tanah air, di dalam FSAB berkumpul berbagai anak cucu anggota TNI maupun anak cucu berbagai gerakan. Antara lain Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Perjuangan

Rakyat Semesta (PERMESTA), Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII), maupun Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).

“Melalui semangat berhenti mewariskan konflik, dan tidak membuat konflik baru, FSAB telah menjadi mercusuar yang menjaga perdamaian dan persatuan bangsa. Para anak cucu dari pelaku sejarah konflik di masa lalu mampu memaafkan dengan tidak melupakan. Maksudnya, memaafkan konflik yang terjadi di masa lalu dikarenakan kesadaran bahwa semua elemen bangsa dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi yang sama, namun tidak melupakan kejadian tersebut sehingga bisa dijadikan pelajaran bagi generasi masa kini dan mendatang,” ujar

Bamsoet dalam perayaan HUT ke-20 FSAB, di Jakarta, Rabu (14/6/23).

Turut hadir, antara lain Anggota Wantimpres RI Sidarto Danusubroto, Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam, serta Wakil Pemred Harian Kompas Paulus Tri Agung Kristanto. Hadir pula Para Penasihat FSAB, antara lain Dubes Amelia Yani, Dubes Nurrachman Oerip, Catherine Pandjaitan, Nina Pane, dan Joesoef Faisal. Serta FSAB Muda, antara lain Mayang Panggabean (cucu DI Pandjaitan), serta Anna (cucu SM. Kartosoewirjo).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setiap negara dunia memiliki sejarah konflik di masa lalu.



Uni Soviet, misalnya, bahkan terpecah menjadi 15 negara yang hingga kini masih terlibat konflik seperti antara Rusia dengan Ukraina. Indonesia patut bersyukur, walaupun dihadapkan pada berbagai konflik, namun tidak membuat kondisi bangsa tercerai berai.

“Luka konflik yang berat di masa lalu mampu dibasuh oleh kehadiran FSAB. Membuktikan bahwa sejarah bukanlah hanya milik pemenang, melainkan milik semua orang, milik segenap elemen bangsa. Seberat apapun beban yang ditanggung akibat konflik di masa lalu mampu diringankan oleh

silaturahmi yang dijalin para generasi selanjutnya untuk menuju rekonsiliasi nasional,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menerangkan, momentum HUT ke-20 FSAB semakin menguatkan kiprah dan kontribusi FSAB dalam mengaktualisasikan tiga nilai keutamaan ‘Ikrar Anak Bangsa’ FSAB. Terdiri dari menghargai kesetaraan; menghormati hak asasi dan perbedaan, serta tidak mewariskan konflik dan tidak membuat konflik baru.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, urgensi

memperjuangkan tiga nilai keutamaan tersebut masih sangat relevan. Misalnya, terkait isu kesetaraan, hingga saat ini masih banyak yang harus diperjuangkan. Contohnya, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi. Laporan Bank Dunia bertajuk ‘Women, Business, and the Law 2023’ yang dirilis pada awal Maret 2023, untuk indeks kesetaraan gender di bidang ekonomi, posisi Indonesia hanya berada di peringkat ke-8 dari 11 negara di ASEAN.

“Dalam aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun secara kuantitatif terdapat sedikit peningkatan pada Indeks Kinerja HAM pada tahun 2022 (naik 0,3 poin), namun dari aspek kualitatif masih menyisakan beberapa catatan yang cukup kritis, terutama dalam aspek keadilan dan komitmen memutus mata rantai konflik sebagai legasi kesejarahan. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia, memiliki akar kesejarahan yang cukup lama tertanam. Misalnya peristiwa Perang Padri di tanah Batak, yang dimulai sejak tahun 1803, ditengarai sebagai penyebab terbelahnya kehidupan sosial masyarakat Batak (bagian utara dan bagian selatan),” terang Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, contoh lain, di Jawa Barat, sejarah Perang Bubat pada abad ke-14, telah membuat masyarakat Jawa Barat bersikap ‘antipati’ terhadap nama-nama, seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Majapahit. Baru pada tahun 2018 stigma tersebut secara simbolis terhapus dengan diresmikannya nama Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk di Bandung.

“Referensi kesejarahan berikutnya, konflik yang muncul pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, telah memiliki perluasan spektrum dengan menyangkut muatan ideologi, isu keagamaan, hingga separatisme. Misalnya yang cukup menonjol adalah peristiwa pemberontakan G30S/ PKI tahun 1965. Setelah beberapa generasi berlalu, anak cucu dari keturunan pelaku sejarah, yang sama sekali tidak tahu-menahu atau tidak terlibat dalam peristiwa sejarah harus ikut menanggung dosa warisan atau dosa turunan dari nenek moyang mereka,” pungkas Bamsuet. □



Sarasehan Nasional Pancasila dan Haul Bung Karno

Ahmad Basarah: Elastisitas Pancasila Diuji oleh Kesetiaan Rakyat Pendukungnya

Jika Pancasila tidak dipompakan terus-menerus ke tengah masyarakat sangat mungkin elastisitas ideologi ini tak lagi kenyal berhadapan dengan ideologi-ideologi lain.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengingatkan bahwa di Abad 21 dan abad berikutnya, zaman terus berubah dan masyarakat akan berkembang. Dia menilai sebagai ideologi bangsa, elastisitas Pancasila diuji oleh kesetiaan rakyat pendukungnya.

"Ketika zaman berubah interaksi masyarakat dunia juga semakin intensif dan masif, saya ingatkan bahwa nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat dunia juga berubah. Di sinilah Pancasila diuji, sejauhmana sila-sila yang terkandung di dalamnya tetap dihayati dan dijalankan oleh rakyat pendukung ideologi ini," tegas Ahmad Basarah dalam Sarasehan Nasional Pancasila dan Haul Bung Karno yang digelar oleh Universitas Negeri Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (27/6/23).

Dalam sarasehan berjudul "Soekarno dan

Pancasila di Abad 21" itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Malang Raya itu menjelaskan mengapa bulan Juni dimenangkan sebagai "Bulan Bung Karno". Ahmad Basarah berpendapat, Juni dimenangkan sebagai Bulan Bung Karno bukan hanya karena sang proklamator lahir, wafat, dan melahirkan Pancasila di bulan Juni, tapi lebih penting lagi adalah memompakan ideologi Pancasila kepada semua generasi bangsa.

"Jika Pancasila tidak kita pompakan terus-menerus ke tengah masyarakat, sangat mungkin elastisitas ideologi ini tak lagi kenyal berhadapan dengan ideologi-ideologi lain yang sangat mudah diakses di Internet, mulai dari komunisme, kapitalisme, sampai khilafah," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Dia mencotohkan, desukarnoisasi yang pernah terjadi di masa lalu berhasil membuat

stigma bahwa Bung Karno jauh dari umat Islam, sangat dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, banyak kajian mengungkapkan bahwa pemikiran Bung Karno tentang sinergi antara Islam dan Pancasila yang melahirkan nasionalisme religius banyak diungkap oleh banyak akademisi.

"Ada pemahaman dikotomis yang sengaja dikembangkan di masa lalu bahwa nasionalisme bertentangan dengan Islam. Jadi, jika Bung Karno dianggap kelompok yang menganut paham kebangsaan, otomatis beliau dinilai tidak Islami. Ini salah kaprah," tandas Ahmad Basarah dalam acara yang disenergikan dengan perayaan Haul ke-53 Bung Karno itu.

Padahal, tandas Sekretaris Dewan Penasihat PP Bamusi ini, pemahaman dikotomis itu tidak tepat sebab Bung Karno sendiri menegaskan ia adalah seorang Mus-



lim, yang karena Islam yang dianutnya, ia menjadi nasionalis.

“Dalam tulisan-tulisannya di masa muda, Bung Karno menegaskan Islam memerintahkan umat Muslim membela tanah air di mana mereka hidup. Itulah yang beliau sebut sebagai nasionalisme Islam yang juga diperjuangkan oleh para pemikir Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan pemikir Timur Tengah lainnya di era itu,” tegas Ahmad Basarah.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Malang (UNM), Prof. Hariyono, dalam presentasinya sebagai narasumber kedua menyayangkan akibat distorsi sejarah, masih ada dosen sejarah di kampus lain yang

menolak Pancasila lahir 1 Juni 1945.

“Mengapa sampai saat ini masih ada anggapan ada tiga orang yang merumuskan Pancasila? Ini terjadi karena distorsi. Ayo cek, apakah Bung Hatta orang jujur atau tidak? Saat menerima gelar doctor honoris causa, Bung Hatta menegaskan, Pancasila adalah pidato Bung Karno pada 1 Juni. Ini bisa kita temukan dalam tulisan Bung Hatta, Pancasila Jalan Lurus, testimoni Panitia Lima, dan lainnya,” tegas Hariyono.

Hadir dalam sarasehan nasional itu, antara lain Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD Kota Malang Made Riandiana. Kartika serta CEO Tugu Media Group, Irham Thoriq. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memaki hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berpang dada
- Berhentilah berstat tidak, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Bamsoet Apresiasi MK Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Untuk menguatkan sistem proporsional terbuka, masyarakat juga harus cerdas dalam menentukan sikap politik. Jangan mau menerima uang Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu dari para kontestan politik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Pemilu Legislatif 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka. Di satu sisi, sistem tersebut dapat

mendorong kedekatan emosional antara caleg dan konstituennya. Namun disisi lain, harus diakui bahwa sistem tersebut juga membuat masyarakat terjebak dalam politik pragmatis jangka pendek, terjebak dalam politik angka-angka.

“Karena itu, untuk menguatkan sistem

proporsional terbuka, masyarakat juga harus cerdas dalam menentukan sikap politik. Jangan mau menerima uang Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu dari para kontestan politik. Karena, setelah itu bisa jadi ketika terpilih caleg akan mudah meninggalkan konstituennya. Pilihlah Caleg, Capres, Cagub, Cabup, dan Cawalkot sesuai hati nurani. Dengan mempertimbangkan rekam jejak, kapabilitas, dan profesionalitas. Jangan memilih hanya berdasarkan nominal rupiah,” ujar Bamsoet usai taping saat menjadi narasumber program Q&A, BEB, Bamsoet Emang Beda, di Studio Metro TV, Jakarta, Jumat (16/6/23).

Turut hadir menjadi panelis, antara lain Budayawan Sudjiwo Tedjo, penulis Kang Maman, wartawan Virgie Baker, pengamat politik Pangi Syrwi Chaniago, serta konten kreator Sharlie Anavita.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, putusan MK tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemilu 2024 masih on the track. Sehingga wacana penundaan Pemilu menjadi tidak relevan lagi untuk dibahas dan diperbincangkan.

UU No. 7/2017 tentang Pemilu, khususnya dalam pasal 431 memang telah mengatur tentang penundaan Pemilu. Yakni, disebabkan terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian dan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Hingga saat ini, berbagai prasyarat penundaan Pemilu tersebut belum terpenuhi.

“Walaupun Pemilu tidak ditunda, kita tetap harus memikirkan terkait perlunya bangsa Indonesia membahas lebih lanjut tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/



Kota. Sehingga apabila suatu saat terjadi penundaan Pemilu yang disebabkan berbagai hal yang sudah diatur oleh UU, kita sudah mempunyai aturan yang jelas tentang pengisian berbagai jabatan publik tersebut. Mengingat hingga saat ini, tidak ada ketentuan dalam konstitusi maupun dalam perundangan manapun tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indone-

sia ini menerangkan, pekerjaan rumah kebangsaan lainnya yang perlu diselesaikan, yakni tentang pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sehingga siapapun presidennya, tidak perlu cawe-cawe, tidak perlu khawatir terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalkannya. Karena siapapun penggantinya memiliki kewajiban untuk melanjutkan berbagai program pembangunan sesuai pedoman PPHN.

“Tidak hanya PPHN, MPR RI juga menerima banyak aspirasi tentang pentingnya

menghadirkan kembali Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI. Utusan Golongan dalam lembaga perwakilan merupakan amanat dan legasi kesejarahan yang telah diwariskan sejak cita-cita awal kemerdekaan. Keberadaan Utusan Golongan memperkuat ikhtiar agar tidak ada satupun unsur elemen bangsa yang ditinggalkan. Sekaligus dapat menjadi penyeimbang peran dari keterwakilan politik yang dipegang oleh DPR dan keterwakilan daerah yang berada ditangan DPD,” pungkas Bamsoet. □

Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

M. Syukur: Putusan MK Merupakan Kemenangan Demokrasi

Dengan adanya putusan sistem proporsional terbuka seharusnya partai politik tidak perlu khawatir kalau calon-calon yang terpilih nantinya bukan dari kader-kader potensial yang punya loyalitas tinggi di partai politik.

DENGAN adanya putusan sistem proporsional terbuka seharusnya partai politik tidak perlu khawatir kalau calon-calon yang terpilih nantinya bukan dari kader-kader potensial yang punya loyalitas tinggi di partai politik. Dengan adanya putusan sistem proporsional terbuka seharusnya partai politik tidak perlu khawatir kalau calon-calon yang terpilih nantinya bukan dari kader-kader potensial yang punya loyalitas tinggi di partai politik. Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah dipastikan akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Kepastian ini diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).

Menanggapi hasil putusan MK tersebut. M. Syukur sebagai Ketua Kelompok DPD menilai, putusan MK yang menolak gugatan terhadap sistem proporsional terbuka merupakan angin segar bagi masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Pemilu dengan sistem proporsional



terbuka sudah berjalan tiga kali dari pemilu 2009, 2014, dan 2019. Jika kemudian kembali ke sistem proporsional tertutup itu merupakan langkah mundur,” terang Syukur yang juga anggota DPD dari Provinsi Jambi.

Menurut Syukur, dalam setiap sistem pemilu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula membandingkan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Maka dengan melihat iklim demokrasi di Indonesia, menggunakan sistem proporsional terbuka tentunya masih

relevan untuk kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Apalagi, sejak masa reformasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, diberikan ruang sebesar-besarnya untuk menentukan figur yang dianggap pantas mewakilinya ketimbang hanya mencoblos partai politik, tetapi tidak tahu siapa yang mewakilinya karena semua ditentukan oleh partai politik.

“Ini yang membuat suara rakyat seperti teramputasi karena dikalahkan oleh kepentingan partai politik”, ungkap Syukur

Syukur menambahkan, seharusnya partai politik itu cukup melakukan rekrutmen pencalonan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, setelah itu biarkan rakyat yang memutuskan di bilik suara siapa-siapa yang mereka pilih. Karena, prinsip dari demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Oleh karena itu adanya putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan penggugat untuk kembali ke proporsional tertutup merupakan bagian dari kemenangan demokrasi di Indonesia,” kata Syukur. Dan, dengan adanya putusan sistem proporsional

terbuka itu seharusnya partai politik juga tidak perlu khawatir kalau calon-calon yang terpilih nantinya bukan dari kader-kader potensial yang punya loyalitas tinggi di partai politik.

Untuk menghindari hal tersebut, partai politik perlu meningkatkan kualitas calon wakilnya di parlemen dengan melakukan pembinaan dan kaderisasi jauh-jauh hari sebelum pemilu, agar kader partai yang potensial dan punya kemampuan bisa mendapat dukungan dari masyarakat dan bisa berbuat di parlemen.

“Sehingga yang terpilih bukan kader yang hanya menumpang nyalon tetapi tidak tahu akan perjuangan partai,” tutup Syukur.

Seperti diketahui, permohonan uji materi diajukan pada 14 November 2022. MK menerima permohonan dari lima orang yang keberatan dengan sistem proporsional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terbuka. Mereka menginginkan sistem proporsional tertutup yang diterapkan. Alasannya, dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon

anggota legislatif langsung. Pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. □

Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

HNW: Agar MK Konsisten Mengawal dan Menjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menolak permohonan uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu agar diubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Dengan penolakan itu maka Pemilihan Umum 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA.,— yang berulang kali menyampaikan pendapat publiknya agar MK konsisten mengawal dan melaksanakan Konstitusi — mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu agar diubah dari proporsional terbuka menjadi kembali tertutup. Dengan penolakan MK itu maka Pemilihan Umum 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka.

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, selanjutnya mengingatkan agar MK terus konsisten menjaga konstitusi dan menjadi teladan dalam melaksanakan ketentuan konstitusi, untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan rakyat bahwa konstitusi tetap dipentingkan pelaksanaannya oleh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lembaga negara (MK) yang bisa berdampak pada meningkatnya kualitas demokrasi. “Adalah hal yang sangat dipentingkan,

apalagi bangsa Indonesia kini berada di tahun politik, jelang Pemilu 2024,” katanya. Lebih lanjut HNW menyampaikan, kita perlu

mengapresiasi MK yang telah menjaga kredibilitas diri dengan konsisten terhadap keputusan sebelumnya, dan komitmen menjalankan konstitusi, dan tetap mementingkan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan menolak permohonan perubahan sistem Pemilu dari terbuka ke sistem pemilu tertutup tersebut. Dengan demikian, MK konsisten terhadap keputusannya sendiri pada tahun 2008, yang mengarahkan perubahan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka.

Berbicara usai mengikuti pembacaan putusan MK via daring, di Jakarta, Kamis (15/6), HNW menyebutkan, putusan MK ini menunjukkan konsistensi MK pada putusannya sendiri pada tahun 2008, yang mengarahkan sistem pemilu berubah menjadi proporsional terbuka. Ia juga mengapresiasi MK yang menghormati kelembagaan DPR RI yang telah menyampaikan keterangannya, meski ada salah satu fraksi yang menyampaikan pandangan berbeda.

Menurut HNW, di dalam putusan tersebut terungkap bahwa ada salah satu fraksi yang

menyampaikan pendapatnya berbeda dengan DPR. Hal itu tentu tidak lazim dalam sidang MK, karena yang didengarkan pendapatnya adalah DPR, bukan pendapat fraksi. “Jadi, MK sudah benar hanya mempertimbangkan pendapat resmi DPR yang memang menolak sistem pemilu tertutup. Apalagi DPR sebagai wakil rakyat yang sah dan konstitusional sudah berkali-kali sesuai sila ke-4 dari Pancasila, yaitu sebagai lembaga perwakilan rakyat bermusyawarah dengan pihak Pemerintah dan KPU, Bawaslu, DKPP, dan sejak Januari lalu menyampaikan putusan bahwa Pemilu 2024 tetap dengan sistem Terbuka,” tukasnya.

Meski mengapresiasi putusan MK, HNW juga mengingatkan agar euforia terjaganya kedaulatan rakyat ini jangan justru membuat publik terlena. Apalagi, baru saja ada laporan terbuka dari suatu LSM bahwa ada 52 jutaan data pemilih sementara dari KPU bermasalah. Ia berharap, semua pihak untuk tetap konsisten mengawal dan mengawasi proses Pemilu 2024 ini agar berjalan dengan baik dan benar, serta berkualitas sesuai

aturan. “Dan, MK juga perlu terus kita kawal dan awasi agar tak jemu untuk konsisten menjaga dan melaksanakan konstitusi dengan baik dan benar, untuk terjadinya proses dan hasil demokrasi yang lebih substantif dan lebih berkualitas. Karena bisa jadi, ke depan, akan ada lagi permohonan-permohonan judicial review yang tak sesuai dengan spirit demokrasi dan reformasi, dan menginginkan demokrasi Indonesia mundur ke belakang, ke era Orde Baru saat diberlakukannya sistem pemilu tertutup,” ujarnya.

“MK juga harus terus konsisten menjaga kepercayaan publik, dengan mengawal pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dengan baik dan benar, dan menjaga kualitas demokrasi dengan dikedepankannya pelaksanaan prinsip konstitusi dan kedaulatan rakyat. Apalagi, di tahun politik jelang Pemilu 2024, mengingat MK juga memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu, Pilpres, serta Pilkada semuanya di tahun 2024. Itu semua bisa jadi sumbangsih MK untuk perubahan Indonesia menjadi yang lebih baik,” pungkasnya. □

Diskusi Sistem Pemilu

Jimly Asshiddiqie: Putusan MK Telah Menjaga Stabilitas Persiapan Pemilu

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sistem pemilu, yaitu Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan itu sudah final dan mengikat sehingga tidak usah dibicarakan lagi.

ANGGOTA MPR dari DPD, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH., mengatakan, semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan itu final dan mengikat sehingga stabilitas tetap terjaga dan persiapan pemilu bisa berjalan lancar.

“Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sistem pemilu, yaitu Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan itu sudah final dan mengikat sehingga tidak usah dibicarakan lagi. Kita



hormati dan kita laksanakan saja putusan MK tersebut sehingga stabilitas tetap terjaga dan persiapan Pemilu dan Pilpres, serta Pilkada 2024 bisa berjalan lancar,” kata Jimly Asshiddiqie dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Diskusi dengan tema: “Putusan MK Dengan Sistem Pemilu Terbuka Memperkuat NKRI” juga menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi PKB, H. Syaiful Huda, dan praktisi media Jhon Oktaveri.

Menurut Jimly, munculnya ide sistem pemilu proporsional tertutup bukan tanpa sebab. “Pasti ada alasan-alasan logisnya. Kita juga perlu mendengar alasan sistem pemilu tertutup ini. Karena itu, ke depan perlu juga dipikirkan apakah sistem proporsional terbuka ini sudah ideal atau masih banyak kelemahannya. Mana yang lebih banyak, manfaatnya atau mudharatnya,” ujarnya.

Jimly menambahkan, sistem proporsional terbuka tidak membantu pelembagaan partai politik, di antara caleg satu partai bisa bermusuhan. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup jangan dianggap tidak bermanfaat. Sebab, dengan proporsional tertutup maka terjadi pelembagaan dan penguatan kepartaian lebih efektif. Selain itu, dengan sistem proporsional tertutup bisa mencegah demoralisasi politik.

“Pemilu bukan soal menang atau kalah. Kualitas dan integritas demokrasi kita juga ditentukan oleh moralitas dalam politik, moralitas kepemimpinan. Jangan semua pemimpin yang kita pilih ini transaksional. Ini berbahaya,” imbuh Senator dari DKI Jakarta ini.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Namun, lanjut Jimly, sistem proporsional tertutup juga harus ada syaratnya. “Kalau partai masih tertutup seperti sekarang dan demokrasi di internal partai belum tumbuh, maka proporsional tertutup bisa berbahaya karena hanya satu orang yang menentukan, yaitu Ketua Umum Partai, yang regenerasinya turun temurun menjadi dinasti politik,” jelasnya.

“Sembilan partai (di parlemen) saat ini hanya ada sembilan orang Ketua Umum. Dia yang menentukan capres, cawapres, termasuk nomor urut Caleg. Artinya, tidak ada demokrasi di internal partai. Partai tertutup sama sekali,” sambungnya.

Jimly melanjutkan, syarat untuk penerapan sistem proporsional tertutup, antara lain ada proses demokrasi di internal partai, adanya keterbukaan partai, modernisasi partai sudah

berjalan. “Ke depan, menurut saya, memang lebih tepat menggunakan sistem proporsional tertutup. Tetapi, dengan syarat-syarat tadi,” katanya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda mengatakan, pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup masing-masing memiliki plus dan minusnya. “PKB siap dengan sistem manapun. Ketika MK memutuskan sistem proporsional terbuka, kita menangkap semangatnya adalah jangan sampai terjadi politik transaksional yang lebih parah lagi ke depan. Sistem proporsional terbuka atau tertutup punya potensi (politik transaksional) yang sama. Tapi, prinsipnya kita ingin mengakhiri secepatnya politik transaksional ini,” katanya.

Syaiful Huda menambahkan, tantangan sistem proporsional terbuka lebih berat. Selain harus memperkuat peran partai, partai juga harus mampu menyeleksi banyak figur (caleg). “Kita harus jujur, dengan sistem proporsional terbuka, caleg harus berkompetisi dalam dua level sekaligus, yaitu level di internal partai dan level di luar partai. Di dalam internal partai terjadi kompetisi antarcaleg untuk mendapatkan suara terbanyak. Pada saat yang sama, caleg harus berkompetisi dengan caleg eksternal dari partai politik lain. Ini tentu tidak mudah,” terangnya.

Sementara narasumber lain, praktisi media Jhon Oktaveri menyoroti soal konsistensi dan identitas partai. Indonesia pernah menggunakan sistem proporsional tertutup, juga pernah dengan sistem proporsional terbuka. Indonesia pernah mengalami demokrasi terpimpin, pernah juga memiliki perdana menteri. “Inilah persoalan konsistensi. Kita selalu berubah-ubah dan akhirnya bingung sendiri dengan perubahan itu,” katanya.

Selain itu, sambung Jhon Oktaveri, identitas partai politik di Indonesia lemah karena ketidak-konsistenan tadi menyebabkan partai politik tidak pernah membumi. “Banyak partai baru tetapi tidak memiliki ideologi dan program yang kuat selain pro rakyat. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menunjukkan partai politik tidak memiliki ideologi. Karena tidak memiliki ideologi akhirnya terjadi money politik, one man, one vote, dan one amplop,” ucapnya. □



Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lestari Moerdijat: Perlu Kepedulian dan Gerak Bersama

Negara harus berani mengakui kegagalan dalam penanganan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) selama ini, karena kejahatan kemanusiaan ini tidak pernah tuntas dan sudah berlangsung cukup lama.

PERLU gerak bersama dan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan dan aparaturnya penegak hukum dalam penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dihadapi para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Sindikat TPPO yang dibekingi oknum aparaturnya keamanan ini merupakan kondisi yang tidak main-main. Perlu sebuah gerakan dan kepedulian semua pihak untuk mengatasinya. Bersyukur saat ini ada Satgas TPPO, peran semua pihak sangat diharapkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam diskusi daring bertema: ‘Perlindungan TKI Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/6).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Benny Rhamdani (Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI), Brigjen. Pol. Drs. R. P. Mulya, S.H., M.H. (Direktur Intelijen Keimigrasian, Kemenkumham RI), dan Kombes. Pol. Johanson Ronald Simamora, S.I.K., S.H., M.H., (Direktur Reserse Kriminal Umum/Dirreskrim Polda Jawa Tengah) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., (Anggota Komisi III DPR RI) dan Eva Kusuma Sundari (Direktur Institut Sarinah/ Koordinator Koalisi Sipil Untuk RUU PPRT) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, TPPO bukan kriminalitas biasa tapi lebih dari itu, merupakan kejahatan kemanusiaan. Apalagi, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, konstitusi kita mengamanatkan negara untuk melindungi setiap warga negara, termasuk PMI yang bekerja di sejumlah negara.

Namun, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, hingga saat ini masalah PMI terkait TPPO masih menjadi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

momok bagi bangsa Indonesia, jumlah PMI korban TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, ragam peristiwa terkait kemanusiaan itu semestinya mendorong pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan untuk mengedepankan aspek perlindungan bagi setiap anak bangsa di mana pun berada.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Benny Rhamdani, mengungkapkan, TPPO merupakan isu yang tidak berdiri sendiri. Lembaga yang dipimpinnya, ujar Benny, bukan saja mengawasi penempatan dan perlindungan PMI, tetapi juga berupaya melawan sejumlah kasus TPPO yang terjadi.

Menurut dia, pada 2017, Bank Dunia memperkirakan ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Namun, yang tercatat hanya 3,6 juta pekerja.

Saat ini, ungkap Benny, BP2MI memiliki 4,721 juta data PMI by name by address sebagai data dasar dalam penanganan

sejumlah kasus TPPO. Dan, saat ini pula, tambahnya, tercatat lebih dari 100 ribu PMI mengalami kendala dalam bekerja di luar negeri, yang 90%-nya adalah perempuan.

Menurut Benny, praktik TPPO terkesan sulit untuk diatasi, karena kerap kali dibekingi oleh oknum aparaturnya kepolisian, TNI, kementerian/lembaga, kedutaan besar dan oknum di BP2MI.

Menurut Benny, negara harus berani mengakui kegagalan dalam penanganan kasus-kasus TPPO selama ini, karena kejahatan kemanusiaan ini tidak pernah tuntas dan sudah berlangsung cukup lama. Benny sangat yakin, bila para pemangku kebijakan memiliki komitmen yang kuat pasti bangsa ini bisa mengatasi berbagai kasus TPPO yang terjadi saat ini.

Namun, tambahnya, sangat disayangkan antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan TPPO belum memiliki pemahaman yang sama.

Benny menegaskan, perlu sosialisasi masif untuk mengedukasi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum, serta para

pemangku kebijakan terkait upaya pemberantasan TPPO agar peraturan dan UU yang ada dapat efektif melindungi PMI.

Direktur Intelijen Keimigrasian, Kemenkumham RI, Brigjen. Pol. R. P. Mulya, mengungkapkan, perspektif keimigrasian terkait TPPO sebagai WNI/WNA yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tanda keluar dari pejabat imigrasi dapat meninggalkan wilayah Indonesia.

Menurut Mulya, imigrasi tidak membuat aturan atau mengatur ketenagakerjaan yang merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait. Meski begitu, ujar Mulya, pihaknya ikut serta mencermati dokumen perjalanan yang dipakai para calon PMI.

Sehingga pada kurun waktu 2017-2023, tambah dia, pihak imigrasi melakukan penundaan penerbitan 21.198 paspor dan mencegah keberangkatan 9.938 calon PMI.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Jawa Tengah, Kombes. Pol. Johanson Ronald Simamora, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan, dalam penanganan TPPO yang menimpa para PMI, Kapolri sudah menginstruksikan aparatnya untuk menindak

tegas sindikat dan jaringan TPPO.

Menurut Johanson, instruksi Kapolri ditindaklanjuti Polda-Polda di tanah air. Khusus Polda Jawa Tengah, ungkapnya, sudah melakukan pengungkapan secara masif kasus-kasus TPPO. Hasilnya, ujar Johanson, pada rentang 6-13 Juni 2023 Polda Jateng mengungkap 31 kasus TPPO dengan 38 orang tersangka.

Pada kesempatan itu, Johanson mengungkapkan, temuan dalam sejumlah kasus TPPO bahwa negara tujuan PMI bisa mengeluarkan visa kerja, meski paspor para PMI untuk keperluan wisata. Pada rentang waktu 2019- Juni 2023 tercatat 1.150 pekerja Indonesia diberangkatkan ke luar negeri.

Direktur Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, berpendapat, kasus-kasus TPPO tidak hanya menimpa para pekerja Indonesia di luar negeri, tetapi juga para pekerja rumah tangga (PRT) di dalam negeri.

Nasib para PRT di dalam negeri, ujar Eva, masih 'dipasung' oleh DPR karena RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tidak kunjung disahkan menjadi UU. Sementara di luar negeri para PMI terancam

kasus-kasus TPPO.

Meski perangkat dan data sudah lengkap untuk mengatasi kasus TPPO, menurut Eva, sangat dibutuhkan upaya ekstra untuk melindungi TKI baik yang bekerja di dalam dan luar negeri, bukan sekadar upaya parsial dari kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengungkapkan bahwa TPPO merupakan kasus yang sangat kompleks karena banyak melibatkan sejumlah pihak. Sehingga, ujar Tobas sapaan akrab Taufik Basari, kasus TPPO harus diatasi secara komprehensif agar bisa dituntaskan hingga akar masalahnya.

Tobas menyambut baik tekad pemerintah dalam penindakan dan penanganan kasus-kasus TPPO di tanah air. Data yang dimiliki, ujar Tobas, harus segera dimanfaatkan sebagai dasar membuat peta permasalahan untuk mengatasi berbagai kasus TPPO yang terjadi.

Sejumlah pekerjaan rumah dalam penuntasan kasus TPPO harus segera dituntaskan dalam bentuk kerja bersama pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga imigrasi. □

Sekolah Politik Perempuan ICMI

Bamsoet Dorong Peran Perempuan di Panggung Politik Nasional

Kehadiran Perempuan ICMI serta Sekolah Politik Perempuan ICMI memiliki rujukan nilai kesejarahan yang telah diwariskan oleh R.A. Kartini lebih dari seabad yang lalu.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Wakil Ketua Umum ICMI Jafar Hafsa meluncurkan Sekolah Politik Perempuan ICMI. Bersamaan dengan pelantikan Pengurus Pusat Perempuan ICMI yang dipimpin oleh Ketua Umum Welya Saftiri, Sekretaris Jenderal Syifa Fauzia, dan Bendahara Umum Sharmila.

Sekolah Politik Perempuan ICMI yang digagas Pengurus Pusat Perempuan ICMI merupakan terobosan positif dalam



meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Kader perempuan dari berbagai partai politik bisa belajar di sini. Sehingga bisa melahirkan perempuan kapabel yang dapat mengisi berbagai posisi strategis di legislatif, eksekutif, hingga BUMN dan berbagai sektor lainnya.

"Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang telah mengamanatkan bahwa dalam menentukan komposisi di panggung politik harus memerhatikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, realisasinya masih belum terlaksana. Pada periode 2019-2024,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

per Januari 2021 hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39%," ujar Bamsuet usai launching Sekolah Politik Perempuan ICMI, pelantikan Pengurus Pusat Perempuan ICMI, sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung Nusantara IV Komplek MPR RI/DPR RI/DPD RI, di Jakarta, Kamis (6/7/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kehadiran Perempuan ICMI serta Sekolah Politik Perempuan ICMI memiliki rujukan nilai

kesejarahan yang telah diwariskan oleh R.A. Kartini, lebih dari seabad yang lalu. Yakni, tentang emansipasi, tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta tentang pentingnya pendidikan bagi kaum hawa.

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kita masih bisa bersyukur bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 hingga 2022, Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia sebagai salah satu tolok ukur keadilan dan kesetaraan gender, terus mengalami peningkatan. Data BPS mencatat Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2017

mencapai skor 71,74, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,59," jelas Bamsuet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender tersebut juga tercermin dari kenaikan tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen, yang dari tahun ke tahun cenderung terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada tahun 1999 baru mencapai 9%, kemudian meningkat menjadi 11,8% pada tahun 2004.

Capaian tersebut kembali meningkat pada tahun 2009 menjadi 18,3%, namun sedikit menurun tahun 2014 menjadi 17,3%. Pada tahun 2021, capaian ini kembali meningkat menjadi 21,39%. Menempatkan Indonesia pada peringkat ke-105 dari 188 negara, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata persentase perempuan anggota parlemen di tingkat global yang mencapai 26,5%.

"Belum optimalnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, mengisyaratkan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat memanfaatkan berbagai bentuk dukungan dan keberpihakan yang diberikan bagi kaum perempuan dengan lebih optimal. Karena itu, kehadiran Perempuan ICMI dengan Sekolah Politik Perempuan ICMI menjadi sangat relevan dan kontekstual," pungkas Bamsuet. □



Menjaring Masukan **untuk** Menyempurnakan Konstitusi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sejumlah anggota MPR dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) bertemu di Malang dalam acara Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah satu metode digunakan MPR untuk menerima masukan guna untuk penyempurnakan konstitusi. Berbagai tema dipaparkan oleh para pengajar dari perguruan tinggi ternama di Jawa Timur itu.

UNTUK kesekian kalinya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar kerjasama dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang. Kerjasama yang digelar pada 20 Juni 2023 di Kota Malang, Jawa Timur, itu berupa kegiatan *focus group discussion* (FGD). FGD merupakan salah satu metode Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR.

FGD yang terlaksana atas jalinan kerjasama antara Badan Pengkajian MPR dan Fakultas Hukum (FH) UB itu bertema: *Pengaturan Pelaksanaan Wewenang MPR*. Hadir dalam FGD yang diliput oleh banyak media itu, anggota MPR Fraksi Demokrat Benny K. Harman, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Partai Golkar, Andreas Hugo Pareira dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Misharti, anggota MPR dari Kelompok DPD.

Benny K. Harman dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika FH UB yang telah memberi masukan

kepada Badan Pengkajian MPR. "Para anggota MPR yang hadir di kampus ini mendapat banyak masukan dari pengajar FH UB", ujarnya. "Mereka memberi masukan tentang pentingnya dilakukan assesment evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan UUD hasil amandemen," ujar Benny K. Harman kepada para wartawan.

Pria yang di Badan Pengkajian menjabat sebagai wakil ketua itu mengungkapkan, konstitusi yang ada saat ini sudah berusia lebih dari 20 tahun. Dari perjalanan waktu yang ada, MPR banyak mendapat masukan dari para pakar hukum tata negara tentang pentingnya dilakukan assesment dan evaluasi pada penyelenggaraan pemerintahan negara.

Benny K. Harman yang juga alumni FH UB itu secara terbuka menyebut, MPR memang menemukan sejumlah masalah pada UUD pada tingkat implementasi. Masalah yang ada, menurutnya, tidak bisa diselesaikan pada level peraturan perundang-undangan, namun



harus dengan amandemen UUD.

Untuk itu, perubahan adalah keniscayaan. Ditegaskannya, amandemen UUD urgent dilakukan. Selain agar konstitusi dapat menjadi pedoman menyelenggarakan pemerintahan, hal demikian juga adanya masukan dari para pakar hukum yang diserap dalam FGD. Dengan amandemen UUD maka adanya tumpah tindih kewenangan bisa dicegah. Untuk itulah, Badan Pengkajian berusaha menampung dan mendapatkan aspirasi dari berbagai stakeholder masyarakat, termasuk para akademisi di kampus.

Tujuan lain dari amandemen, menurut pria asal Nusa Tenggara Timur, itu adalah untuk menjamin kesinambungan program yang dilaksanakan oleh pemerintahan, termasuk mengantisipasi berbagai situasi kondisi yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Misalnya, lanjut Benny K. Harman, terkait

dengan pandemi Covid-19, semua harus diwadahi dalam UUD jika amandemen dilakukan. "Dalam kaitan dengan Pesta Demokrasi 2024, juga menjadi bagian kecil dari urgensi untuk amandemen," tutur Benny, dikutip dari berbagai web berita.

Dalam kesempatan yang sama, Andreas Hugo Pareira menyebut, amandemen UUD perlu dilakukan. Untuk itu, MPR tidak perlu ragu melakukan perubahan. Langkah ini perlu dilakukan sekaligus untuk menjawab kritikan yang menilai bahwa amandemen dilakukan hanya untuk kepentingan MPR. Padahal, MPR mengubah UUD, tegas Andreas Hugo, untuk kepentingan bangsa, kepentingan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam regulasi, serta berbagai macam peraturan-perundangan yang berkaitan dengan UUD.

Dalam *beritajatim.com*, 22 Juni 2023, pria

asal Nusa Tenggara Timur itu menegaskan, amandemen perlu dilakukan melalui proses audit konstitusi dan berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Negara ini, menurutnya, membutuhkan haluan negara sebagai *guidance* kebijakan yang sangat fundamental. Itu demi kepentingan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Diungkapkan dalam web itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berakhir pada 2025. Meski telah disusun RPJMN yang baru, namun model pembangunan seperti ini diketahui ada kelemahannya bahwa tidak ada jaminan akan berlanjut dan tidak terdapat jaminan adanya konektivitas antarpusat dan daerah. Jadi, "Di lapangan kebijakan pusat di daerah terkadang tidak connect," katanya.

Melalui kegiatan FGD, Andreas Hugo merasa gembira, karena mendapat masukan

dari para akademisi, sehingga tidak perlu ragu untuk melakukan amandemen. “Amandemen memang perlu dukungan dan penguatan dari akademisi, sehingga MPR—dalam hal melakukan perubahan—tidak mengalami sebuah keraguan”, tuturnya.

Dalam *jurnalismalang.com*, 20 Juni 2023, dia mengungkapkan, sebenarnya amandemen UUD sudah hampir selesai dilakukan, namun dikarenakan munculnya berbagai isu terkait isu tiga periode masa jabatan presiden dan lain sebagainya,

proses amandemen terpaksa ditunda. “Sebenarnya amandemen sudah hampir jadi, namun kemudian kemasukan isu tiga periode, hingga akhirnya daripada rebut, gaduh, mendingan kita *pending* lagi”, ujarnya seperti termuat dalam web itu.

Dalam FGD itu, sejumlah dosen memaparkan makalahnya dengan tema yang telah ditentukan. Seperti Muhammad Akbar Nursasmita menyampaikan makalah dengan tema *Peluang dan Tantangan Penguatan Kewenangan MPR*. Ria Casmi Arrsa Firdaus

Izza Prayuda menyampaikan makalah bertema *Pokok-Pokok Penataan dan Penguatan Kewenangan MPR Dalam Bidang Ketetapan MPR, Pokok-Pokok Haluan Negara dan Wawasan Kebangsaan*. Mohamad Rifan menyampaikan makalah bertema, *Kewenangan MPR Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Menakar Konsistensi Layout dan Orientasi Pembangunan)*. Ibnu Sam Widodo makalah bertema *MPR dan Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. □

Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR/Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Golkar

Good Governance dan Fungsi Partai Politik di Indonesia

BARU-BARU ini kita dikagetkan dengan laporan Transparency Internasional Indonesia (TII) yang menyatakan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot empat poin, dari nilai 38 pada tahun 2021 menjadi nilai 34 di tahun 2022. Kondisi itu bukan hanya membuat peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi posisi 110 secara global, namun juga menjadi penurunan paling drastis selama era reformasi.

Korupsi yang masih menjadi masalah serius bisa menjadi indikasi bahwa impian terwujudnya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang digembargemborkan selama era reformasi hanya berjalan di tempat. Padahal, penerapan *good governance* menjadi salah satu tuntutan penting sejak awal reformasi 1998, sebagai antitesa penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru yang dianggap belum mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak memiliki akuntabilitas negara, sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.

United Nations Development Programme (UNDP) memaknai *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dicapai melalui sistem pemerintahan yang kapabel, responsif, inklusif, dan transparan (Parkhurst, 2017). Sedangkan (Ishiyama, 2015) merumuskan tiga indikator

good governance, yaitu: 1). Efektifitas pemerintahan, 2). Kontrol atau pengendalian terhadap korupsi, dan 3). Stabilitas politik.

Harapan mewujudkan *good governance* masih memerlukan kerja keras. Indikatornya jelas, tingginya angka korupsi. Hal ini terkait dengan kesimpulan bahwa gejala tata kelola pemerintahan yang buruk akan menciptakan lahan subur bagi penyebaran korupsi. (Setiyono dalam Ghosh dan Siddique, 2015).

Berdasarkan data yang dirilis TII empat tahun terakhir, setidaknya membuktikan bahwa pada 2019 Indonesia hanya mendapat skor 40 dan masuk kategori negara dengan masalah korupsi serius. Setahun berikutnya (2020) Indonesia memperoleh skor lebih buruk, yaitu 37, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di antara negara-negara G20.

Sedangkan pada tahun 2021 Indonesia memperoleh skor 38, dengan predikat sebagai negara dengan masalah korupsi yang serius. Kemudian di tahun 2022, IPK Indonesia merosot empat poin menjadi 34.

Benahi Fungsi Partai Politik

Dengan indeks IPK terbaru terlihat bahwa upaya menciptakan *good governance* di era reformasi ini terkendala di titik korupsi yang tak kunjung membaik. Perlu dilakukan strategi pendekatan lain. Jika selama ini melihat *good*

governance dengan perspektif administrasi, padahal ada perspektif lain, yaitu politik.

Selama ini dalam menciptakan *good governance* kita seakan melupakan satu institusi penting dan berpengaruh besar di republik ini sejak era reformasi, yaitu partai politik (parpol). Padahal parpol adalah di antara pihak yang memainkan peran penting dalam mengerek skor indeks persepsi korupsi di Indonesia. Untuk itulah pentingnya penguatan fungsi parpol, terutama dalam tata kelola fungsi utamanya, yakni fungsi representasi dan fungsi rekrutmen.

Besarnya peran tata kelola parpol ditegaskan (Warjio, Othman dan Ladiqi, 2021), bahwa tidak mungkin membangun pemerintahan yang baik tanpa didahului pengelolaan parpol yang baik.

Melalui fungsi representasi, parpol akan bertanggung jawab mewujudkan *good governance* dengan cara menyerap dan mengelola aspirasi publik, mengkaji, merumuskan, membentuk, dan menjalankan kebijakan publik, serta mengawasi pelaksanaannya. Fungsi representasi parpol juga meliputi fungsi membentuk dan menjalankan pemerintahan yang akuntabel (Ezrow, 2011). Lebih tegas lagi, (Ishiyama, 2015) menyebutkan bahwa parpol berfungsi membentuk *good governance*, yaitu pemerintahan efektif, mengendalikan

korupsi, dan mewujudkan stabilitas politik politik yang mampu menjamin secara kapasitas, kapabilitas, dan integritas (eligible), serta teruji akuntabilitas publiknya (Norris, 2006).

Fungsi rekrutmen parpol ini sangat strategis karena ia adalah satu-satunya institusi yang berwenang mencalonkan para pemegang kekuasaan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif.

Terbentur Tantangan

Pembenahan tata kelola parpol mutlak diperlukan demi terwujudnya good governance. Akan tetapi, pembenahan fungsi ini, terutama dari sisi rekrutmen dan representasi sampai saat ini masih belum optimal.

Beberapa penyebabnya, antara lain masih terjabaknya parpol pada demokrasi elektoral, belum sepenuhnya otonom, terjebak dalam

menempatkan parpol sebagai institusi di Indonesia yang paling tidak dipercaya publik.

Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tata kelola fungsi rekrutmen, diakibatkan oleh rekrutmen yang belum sepenuhnya demokratis dan inklusif, belum berjalannya mekanisme fit and proper test. Cenderung dinastik, oligarkis, pragmatis dan transaksional. Partai politik juga dinilai harus pragmatis dengan lebih mementingkan vote getter (pendulang suara), untuk meraih dukungan besar dan pemilih.

Melihat berbagai kendala tersebut maka ada beberapa yang perlu dibenahi dalam upaya memperkuat tata kelola parpol: *Pertama*, Pendanaan. Faktor tersebut selama ini dianggap menjadi masalah yang menyebabkan parpol lemah secara pembiayaan sehingga tidak otonom dan bergantung pada pemodal, menimbulkan pragmatisme, politik transaksional, dan

akuntabilitas keuangan.

Kedua, Sistem pemilihan umum (pemilu). Terlepas dari sistem pemilu menggunakan mekanisme proporsional terbuka, tertutup, atau gabungan, yang terpenting adalah bagaimana sistem Pemilu pada Undang-undang Pemilu harus mengatur terkait mekanisme kandidasi secara rinci dan rigid. Sehingga, lebih menjamin para kandidat yang terpilih adalah orang-orang yang bersih dan layak.

Ketiga, Undang-undang Parpol. Selama ini Undang-undang Parpol dianggap sebagai salah satu pintu masuk lemahnya pelaksanaan good governance oleh kader partai yang terpilih di ranah eksekutif dan legislatif. Hal tersebut karena adanya celah masuk yang membuat parpol tidak patuh menjalankan nilai-nilai demokrasi sekaligus tidak mampu menjalankan fungsinya secara ideal, yaitu terkait proses rekrutmen yang diserahkan kepada AD/ART Parpol, yang kadang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah demokrasi.

Melihat fakta terkait posisi parpol yang amat strategis dan signifikan dalam mewujudkan good governance ini, sungguh amat disayangkan jika selama era reformasi, Parpol masih belum diperhatikan serius oleh kita semua, sehingga tidak mampu berperan optimal mewujudkan cita-cita reformasi. Bahkan, parpol saat ini dianggap gagal dan tidak dibutuhkan dalam sistem politik di Indonesia.

Hal itu diperkuat hasil survei polling center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017 yang menyatakan, parpol dan DPR sebagai dua lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah terkait agenda pemberantasan korupsi. Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan Parpol itu, lantaran banyak pelaku korupsi berasal dari dua lembaga itu.

Demi menempatkan parpol pada peran penting terwujudnya good governance maka parpol harus bangkit mengoptimalkan segala potensi melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola fungsi representasi dan rekrutmen. Dengan demikian terbentuk sebuah model tata kelola parpol yang amanah, sekaligus mampu mewujudkan good governance, yaitu mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif, mampu dalam pengendalian korupsi dan menjaga stabilitas politik. Semoga. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lingkaran oligarki dan korupsi. Selain itu, belum hadirnya lembaga khusus artikulasi, lembaga penelitian, pengkajian, dan perumusan kebijakan publik atau agregasi, di dalam parpol.

Kondisi lemahnya fungsi representasi itu tentu akan membuat parpol tidak mampu menjalankan mekanisme pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan publik yang demokratis dan kredibel. Sehingga membuat parpol semakin berjarak dan kurang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Lemahnya fungsi representasi parpol terlihat dari survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2022, yang

melahirkan budaya korupsi politik.

Terkait keuangan parpol yang relatif minim dan tidak layak dalam membiayai operasional itu, setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian terkait Dana Bantuan Parpol yang hasilnya mengusulkan bantuan dari Negara sebesar 50% dari total biaya operasional Parpol dalam setahun. (Kompas.com - 11/12/2019, 16:05 WIB). Hal itu sangat rasional demi memperkuat keuangan parpol menjalankan fungsi utamanya secara ideal, pun parpol lebih bisa dituntut pertanggungjawaban dari sisi



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Menanggapi Eskalasi Ketegangan di Laut Cina Selatan

INDONESIA, bersama para tetangga dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memang harus menanggapi eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan (LCS). Demi menjaga dan merawat stabilitas kawasan Asia Tenggara, tak ada pilihan lain bagi ASEAN kecuali mengerahkan kekuatan militernya untuk mengantisipasi dan menyusun ragam strategi yang diperlukan untuk merespons situasi terburuk.

Untuk keperluan itulah sepuluh negara anggota ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) telah bersepakat untuk menggelar latihan militer gabungan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Rencananya, latihan militer gabungan itu digelar pada September 2023, dan menghadirkan Timor-Leste sebagai anggota pemantau. “Kami akan menggelar latihan militer bersama di Laut Natuna Utara,” kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Panglima TNI mengumumkan rencana ini usai menggelar pertemuan para Panglima Angkatan Bersenjata anggota ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/6). Latihan ini akan berfokus pada keamanan maritim dan penyelamatan SAR, serta pelayanan sosial di wilayah Natuna. Seluruh angkatan bersenjata ASEAN, baik dari angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara, akan terlibat dalam latihan ini.

Tentu saja ada alasan atau pertimbangan sangat strategis yang mendorong para pejabat tinggi bidang pertahanan dari semua anggota ASEAN untuk menyepakati latihan gabungan militer itu. Dan, sangat menarik untuk dipahami lebih mendalam,

karena agenda militer ini tercatat sebagai yang pertama kalinya pernah diinisiasi bersama oleh negara-negara di Asia Tenggara. Soalnya, sejak didirikan tahun 1967, ASEAN belum pernah menggelar latihan militer gabungan.

Eskalasi ketegangan di LCS tampaknya menjadi faktor paling relevan yang mendorong militer ASEAN bersepakat untuk memberi tanggapan, sekaligus mempersiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga dan merawat stabilitas Asia Tenggara. Sejak berakhirnya perang Vietnam pada 1975, Asia Tenggara tercatat sebagai kawasan paling kondusif. Namun, ketegangan di LCS akhir-akhir ini berpotensi merusak kondusivitas itu, terutama karena hampir semua anggota ASEAN memiliki kepentingan di wilayah perairan itu.

Memang, ketika ketegangan di LCS terus meningkat akhir-akhir ini, ASEAN tidak bisa berdiam diri atau bersikap minimalis. Ketika perkembangan di LCS semakin tak terkendali, stabilitas Asia Tenggara akan terdampak karena beberapa anggota ASEAN akan tergerak untuk mempertahankan dan mengamankan kepentingannya di LCS. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1947, Tiongkok mengklaim LCS sebagai wilayahnya. Tiongkok kemudian mempertegas klaim itu dengan membuat sembilan garis putus-putus (the nine-dash line). Tindakan Tiongkok itu ditentang oleh sejumlah anggota ASEAN. Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga mengklaim sebagian dari LCS sebagai wilayah mereka.

Salah satu indikator tentang eskalasi ketegangan di LCS bisa dibaca dari pernyataan pemimpin

Tiongkok, Presiden Xi Jinping. Dalam forum pertemuan Komisi Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini, Presiden Xi meminta para pejabat tinggi keamanan nasionalnya untuk memikirkan skenario terburuk dan bersiap menghadapi 'lautan badai'. "Kompleksitas dan kesulitan masalah keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat secara signifikan," kata Xi pada pertemuan itu.

Bukan isu baru jika para pemimpin Tiongkok di Beijing selalu tidak nyaman karena merasa lingkungan internasional menunjukkan perilaku kurang bersahabat. Setidaknya, tercatat ada dua masalah yang menyebabkan para elit di Beijing selalu terusik. Kalau dilihat dari rentang waktu, keduanya nyaris jadi masalah permanen. Pertama, niat Beijing untuk mengklaim Taiwan yang hingga kini belum terwujud. Sebaliknya, Taiwan bahkan selalu menunjukkan perlawanan. Masalah kedua adalah klaim Tiongkok atas LCS yang juga selalu ditentang komunitas internasional, termasuk ASEAN.

Ketika Presiden Xi mengingatkan para pejabat tinggi keamanan segera mengkaji skenario terburuk untuk merespons gangguan terhadap keamanan nasional, dia tentu mengacu pada aktivitas militer asing di LCS. Faktor lain yang tak jarang membuat Beijing geram adalah kegiatan militer Taiwan yang sering berlatih untuk memperkuat ketahanan negara itu dari kemungkinan invasi Tiongkok. Taiwan menjadi isu sangat sensitif bagi Beijing. Saat Taiwan dikunjungi Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, Beijing yang jelas-jelas merasa diremehkan langsung memberi respons dengan menggelar latihan militer.

Beijing jelas merasa tidak nyaman melihat AS yang terus memperkuat aliansi keamanan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Terlebih, akhir-akhir ini, aktivitas militer di LCS memang meningkat. Pengerahan mesin perang di LCS dengan dalih latihan bersama tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh Beijing.

Beberapa hari lalu, AS, Filipina, dan Jepang memperkuat kerja

sama maritim dengan melakukan latihan bersama. Ketiga negara itu mengerahkan kapal-kapal penjaga pantai dalam latihan gabungan berdurasi seminggu yang digelar dekat Manila Bay di LCS. Latihan bersama ini digambarkan sebagai jawaban atas agresivitas Tiongkok di LCS.

Tidak tinggal diam, Beijing pun memerintahkan kekuatan militernya untuk merespons kegiatan militer di LCS. Sebagaimana telah dipublikasikan oleh pers, aktivitas militer di LCS sering diwarnai dengan manuver-manuver yang cukup berbahaya antara militer AS dan sekutunya dengan militer Tiongkok. Ketidakmampuan mengendalikan diri atau salah pengertian di antara dua kekuatan yang berseberangan itu bisa menyulut perang.

Sejauh ini, belum ada upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk membawa persoalan klaim LCS ke meja perundingan. Tiongkok menolak mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menyatakan Beijing itu tidak punya dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan itu. Dengan luas 3,685 juta kilometer persegi, LCS berbatasan dengan Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Klaim Tiongkok atas LCS dengan sembilan garis putus-putus itu sejatinya juga mengganggu kepentingan Indonesia di Laut Natuna Utara, meliputi kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi. Mau tak mau, eskalasi ketegangan di LCS pun akan menghadirkan masalah bagi Indonesia. Dalam Keputusan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 7/2016, disebutkan bahwa Laut Natuna kaya sumber daya laut dengan beragam jenis ikan dan biota laut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) juga mencatat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam potensial lainnya di Laut Natuna Utara.

Adalah keniscayaan jika TNI pun harus pro aktif mengamankan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan LCS. □

Ahmad Basarah Ajak Lemhanas

Luruskan Sejarah Pancasila di Buku Ajar Sekolah

Di sejumlah buku ajar sekolah, perguruan tinggi, bahkan di bahan pengajaran kedinasan tertentu masih ditemukan kerancuan tentang sejarah lahirnya Pancasila.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia meneliti dan meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), dan bahan pengajaran lembaga pendidikan kedinasan. Lemhannas bisa bekerjasama dengan badan atau lembaga lain yang menaruh perhatian pada geopolitik dan ideologi negara.

“Di sejumlah buku ajar sekolah, perguruan tinggi, bahkan di bahan pengajaran kedinasan tertentu, masih ditemukan kerancuan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ada yang menyebut tokoh yang melahirkan Pancasila adalah Bung Karno, ada yang menyebut Mohammad Yamin. Sejarah kelahiran ideologi bangsa harus ditulis secara valid dan seragam,” tegas Ahmad Basarah di depan peserta kursus PPRA LXV dan PPAS XXIV tahun 2023 Lemhannas RI, Rabu (5/7/23).

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, jika Lemhannas RI bersama MPR RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga-lembaga riset di banyak kampus duduk bersama melakukan riset untuk meluruskan sejarah kelahiran Pancasila di semua buku ajar, hasilnya akan sangat bermanfaat buat bangsa dan negara.

“Masyarakat Indonesia kini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang sama sekali terputus dari sejarah kemerdekaan masa lalu. Mereka adalah generasi cerdas, kritis, melek internet. Jika disodorkan kepada mereka sejarah yang tidak masuk akal, mereka cenderung mempertanyakan atau menolaknya,” tegas Ahmad Basarah.

Untuk itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengusulkan agar kepada generasi ini didoktrinkan hanya ada satu Pancasila, tidak ada Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, atau Pancasila 18 Agustus 1945. Hanya saja, agar generasi muda bangsa tidak bingung



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan begitu banyak informasi di dunia virtual, kepada mereka harus disodorkan penulisan sejarah yang simpel, enak dibaca, dan masuk akal.

“Pertama-tama di buku ajar harus disampaikan sejarah Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya, lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang berkembang di Nusantara. Ini yang saya maksud penyajian fakta-fakta sejarah secara rasional dan membangkitkan kecintaan pada Pancasila,” tutur Ahmad Basarah.

Setelah pembaca paham bagaimana nilai-nilai Pancasila digali, kata Basarah, barulah mengusulkan tahap kedua agar kepada generasi muda yang kritis itu disodorkan sejarah kelahiran Pancasila secara komprehensif, dimulai dari pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di Sidang BPUPK, lalu rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, hingga sidang PPKI pada 18 Agustus 1945.

“Hanya dengan menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila dengan runtut seperti inilah maka sejarah kelahiran Pancasila akan mudah dimengerti dan jauh dari resistensi generasi muda,” tandas Doktor Ilmu Hukum Tata Negara lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu.

Ahmad Basarah mengingatkan, dalam meralat buku ajar sekolah itu, hendaknya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tetap menghormati setiap pelaku sejarah kelahiran Pancasila. Misalnya, selama ini diketahui dalam versi Nugroho Notosusanto bahwa Muhammad Yamin adalah tokoh yang pertama kali mengusulkan Pancasila dalam sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945.

“Saat sejarah versi Nugroho ini diralat, jangan sampai ketokohan dan peran sejarah Muhammad Yamin terabaikan. Kita harus terus menghormati jasa para pahlawan. Ingat, Pancasila dilahirkan oleh semua pendiri bangsa. Bahwa sumber kelahirannya adalah pidato Bung Karno 1 Juni 1945, itu hanyalah bagian sejarah. Bung Karno dan semua pahlawan itu adalah milik bangsa Indonesia,” jelas Ahmad Basarah.

Hadir dalam acara itu Wakil Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah; Sestama Lemhannas RI, Komjen Pol. Rudy Sufahriadi; Deputi Pendidikan Lemhannas RI (Marsda TNI Andi Heru Wahyudi); Deputi Kebangsaan Lemhannas RI Laksda TNI Edi Sucipto; dan Deputi Pengkajian Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni. □

Kawasan Wisata Taman Laut Olele

Tawarkan Surga Bawah Laut Terbaik di Dunia

Ketika masih menjabat Gubernur Gorontalo pada tahun 2005, Fadel Muhammad mencanangkan Olele sebagai kawasan wisata. Taman laut Olele, sebagai spot diving, tak kalah bagus dibanding spot diving yang ada di luar negeri.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SIAPA sangka di daerah terpencil kawasan perkampungan nelayan di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, ini menyimpan surga bawah laut yang sangat kaya dengan biota laut.

Di antaranya, Koral Salvador Dali yang langka dan hanya dapat ditemukan di Gorontalo, Ikan Napoleon dan Baracuda.

Kawasan yang dikenal sebagai Taman Laut Olele ini juga menjadi salah satu spot diving terbaik di dunia. Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad yang juga seorang divers profesional dan sangat berpengalaman, sangat merasakan luar biasanya pemandangan bawah laut Olele. Saat itu dia

beberapa kali melakukan diving di kawasan wisata bahari yang mendapat julukan 'The Hidden Paradise in Sulawesi' ini.

"Saya sudah merasakan diving di beberapa lokasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata, lokasi diving di Taman Laut Olele tidak kalah bagus. Olele betul-betul merupakan surganya para divers dunia. Ada sekitar 20 spot yang bisa dijelajahi," katanya, usai melakukan diving ditemani dua Divemaster dari Miguel Diving Gorontalo, Ahad (18/6/2023).

Untuk diketahui, ternyata yang mencanangkan Olele sebagai kawasan wisata pada tahun 2005 adalah Fadel Muhammad, yang pada saat itu menjabat

sebagai Gubernur Gorontalo. Satu tahun berikutnya, Taman Laut Olele ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

Namun, dalam perkembangannya, Fadel Muhammad mengakui bahwa Taman Wisata Laut ini belum begitu terekspos secara masif, dibanding kawasan wisata bahari lainnya, seperti di Manado.

"Pemda setempat harus secepatnya melakukan berbagai upaya untuk lebih memperkenalkan Olele. Seperti menggelar berbagai festival atau gebyar wisata level nasional dan dunia, sehingga jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara makin meningkat," tambahnya.

Fadel sendiri mengaku, sangat konsen akan hal tersebut. Berbagai upaya juga dilakukannya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Di antaranya, melakukan dialog dan pendekatan dengan beberapa pihak, seperti maskapai penerbangan agar ada rute penerbangan rutin langsung dari Manado ke Gorontalo.

"Komunikasi baru dilakukan dengan salah satu grup maskapai besar di Indonesia. Saya berharap, dengan dukungan besar dari Pemda Gorontalo, mudah-mudahan akan terwujud di minggu depan," terangnya.

Di kesempatan yang sama, Yunis Amus, seorang Divemaster asli Gorontalo, mengungkapkan bahwa memang ada beberapa spot diving bagus untuk divers pemula dan profesional di Taman Laut Olele. Dua di antaranya yang dia rekomendasikan adalah 'spot Traffic Circle dan 'Sentinel'. "Di dua spot itu, divers bisa melihat dan memberi makan banyak ikan yang sangat indah dan jinak," katanya.

Yunis juga memberi saran agar bisa menikmati keindahan alam Olele lebih maksimal maka kunjungan lebih baik dilakukan pada bulan Oktober hingga Mei. Sebab, di rentang waktu itu, arus laut tidak begitu kencang dan cuaca sangat bersahabat. □



Terima Puteri Otonomi Indonesia 2023

Bamsoet Ajak Bantu Optimalkan Pemberdayaan Desa

Slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia, akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengajak para Puteri Otonomi Indonesia 2023 turut mengembangkan pembangunan desa melalui program Desa Wisata Agro (Dewa), Desa Wisata Industri (Dewi), dan Desa Digital (Dedi). Program Desa Wisata Agro, Desa Wisata Industri, dan Desa Digital digagas oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Melalui pemberdayaan desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa.

"Dalam APBN 2023, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana desa mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 kabupaten/kota. Setiap desa bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar. Para Puteri Otonomi Indonesia harus mampu menyosialisasikan agar pemanfaatan dana desa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujar Bamsoet saat menerima para Puteri Otonomi Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (28/6/23).

Hadir, antara lain Puteri Otonomi Indonesia 2023 Elisha Gabriell, Runner Up 1 Puteri Otonomi Indonesia Karina Moudy, Puteri Otonomi Indonesia Duta Anti Narkoba Octava Mahmuda, Puteri Otonomi Indonesia Duta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Energi Terbarukan Dinda Rahmadani, Puteri Otonomi Indonesia Duta Empat Pilar Kebangsaan Sanggia Nur, Puteri Otonomi Indonesia Duta Olahraga Tjokorda Istri A.D.P, Puteri Otonomi Indonesia Duta Rupiah Geok Mengwan, serta Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjanrang.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di desa terdapat

banyak kekayaan alam yang berlimpah. Seperti nikel, batu bara, emas, timah, hingga gas. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat di desa yang hidup dalam garis kemiskinan.

"Masa depan Indonesia sebenarnya ada di pedesaan. Sehingga kemakmuran desa harus diupayakan agar mampu bersaing dengan perkotaan. Kekayaan alam yang berlimpah di desa, harus benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat desa," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, apabila dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif, maka timbul perputaran ekonomi di desa dan desa akan berkembang. Dengan begitu, masyarakat desa tidak perlu mengadu nasib ke kota dan membuka lapangan pekerjaan.

"Slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia, akan menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Menjadi magnet yang akan menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang," pungkas Bamsoet. □





Pekan Raya Jakarta dari Masa ke Masa **Ide Haji Mangan Dukungan Bang Ali**

Berkat ide Haji Mangan dan dukungan Bang Ali, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair digelar. Mereka bisa jadi tidak menyangka ‘pasar malam’ itu dari tahun ke tahun semakin membesar dan memberi keuntungan banyak pihak yang nilainya tidak kecil. Lingkup pameran pun tak lagi local, namun sudah menginternasional. Produk yang diujajakkan mulai dari kerak telur hingga mobil terancang. Untuk memberi ruang yang lebih lega, tempat pameran digeser ke Kemayoran.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEMERIAHAN kembali terjadi di Jakarta International Expo Kemayoran (JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Berbagai stand berdiri memenuhi bagian dalam gedung dan halaman. Di stand-stand yang ada, berbagai produk ditawarkan kepada mereka yang datang ke sana, mulai dari barang kebutuhan dapur hingga mobil terancang.

Pameran yang digelar sejak tahun 1968, tahun ini sangat istimewa. Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Fair (JF), atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi ini sudi membuka kegiatan tersebut, karena nilai yang diraih dari aktivitas yang sebelumnya digelar di Lapangan Ikada (Lapangan Monas) itu tidak sedikit. “Dengan mengucap Bismillah...., pada malam hari ini secara resmi saya buka JF 2023. Terima kasih,” ujar Jokowi.

Dalam *setkab.go.id*, Jokowi mengatakan, PRJ selalu ditunggu oleh masyarakat, khususnya warga Jakarta (14 Juni 2023). Pameran ini disebut sudah sangat akrab dengan warga Jakarta. “Setiap tahun kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat dan menjadi penanda hari ulang tahun (HUT) Kota Jakarta”, ujarnya.

Diungkap, PRJ tahun 2022, sebanyak 6,9 juta orang mengunjungi acara itu. Nilai yang didapat dari transaksi pada tahun lalu mencapai Rp 7,3 triliun. “Jumlah yang tidak kecil”, tutur Jokowi.

Jumlah yang tidak kecil selalu ditunggu warga, dan sebagai penanda HUT Jakarta, membuat PRJ rutin digelar setiap tahun. Selama perjalanan sejarah, pameran yang disebut terbesar di Asia Tenggara itu hanya dua kali ditiadakan, tahun 2020 dan 2021. Penyebab Pemerintah Provinsi Jakarta tidak menggelar acara tersebut karena wabah Covid-19.

Menurut catatan sejarah, kali pertama PRJ digelar pada tahun 1968. Awal mulanya, kegiatan PRJ mengambil lokasi di Lapangan Monas. Tentu wajah Monas pada masa itu berbeda dengan wajah Monas saat ini. Pada masa itu lapangan Monas tidak seramai saat ini, dan berhawa segar.

Kali pertama diadakan, langsung mendapat perhatian dari Presiden Soeharto. Pada 5 Juni 1968, dengan melepas burung merpati, Soeharto menandai Pekan Raya



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Djakarta (PDF) atau Djakarta Fair (DF), masih menggunakan ejaan lama, dibuka.

Sebab lebih banyak berlangsung pada malam hari, maka pasar malam itu mendapat respon yang antusias dari masyarakat. Pengunjung yang datang dari waktu ke waktu tidak hanya warga Jakarta, namun melebar dari wilayah sekitar seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, bahkan dari tempat-tempat yang lebih jauh. Sebab memberi keuntungan dan sukses menghibur masyarakat, pada tahun-tahun berikutnya PRJ digelar secara rutin.

Dari sekian orang yang merasa bangga dan senang dari suksesnya PRJ adalah Syamsudin Mangan. Pria yang akrab

dipanggil Haji Mangan itu pada masanya adalah pengusaha tekstil. Dirinya merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Sebagai seorang pengusaha sejati, naluri bisnisnya muncul bahwa perlu ajang atau wahana untuk mempromosikan, memamerkan, dan menjual berbagai produk dalam negeri buatan para pengusaha lokal. Ide itu muncul pada tahun 1967.

Ide Haji Mangan sendiri didapat setelah kerap melihat dan mengunjungi berbagai macam pameran internasional di berbagai negara. Pengalaman itulah yang menginspirasi untuk membuat kegiatan yang sama di Jakarta. Tak hanya pameran internasional yang menginspirasi dirinya,



Presiden Joko Widodo



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

juga pameran yang sebelumnya sudah rutin diadakan, yakni Pasar Malam Gambir, juga menjadi alasan yang sama.

Haji Mangan tidak hanya melontarkan ide, namun juga bagaimana gagasan tersebut bisa terealisasi. Untuk itu, dia *sowan* kepada Gubernur Jakarta yang pada masa itu dijabat oleh Ali Sadikin. Kepada Bang Ali, panggilan akrab Ali Sadikin, Haji Mangan mengatakan bla, bla, bla.

Mendapat pemaparan yang menarik, penuh tantangan, dan menjanjikan, Bang Ali langsung setuju dan mengiyakan. "Gagasan yang bagus," ujar pria yang pernah aktif di kesatuan marinir TNI AL itu.

Bang Ali mendukung keinginan Haji Mangan, karena apa yang digagas sejalan

dengan program Pemerintah Jakarta, yakni pentingnya suatu pameran besar yang terpusat dan berlangsung dalam waktu yang lama.

Pada masa itu di Jakarta sebenarnya sudah ada pasar malam, namun keberadaannya tersebar di berbagai tempat, seperti di Gambir, Pasar Minggu, Tebet, Jatinegara, dan tempat-tempat yang lain. Pasar malam yang ada terkesan jalan sendiri-sendiri, lepas dari campur tangan pemerintah, dan lama kegiatan terbilang sporadis meski ada yang terjadual rutin.

Selepas pertemuan di Balaikota, selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan untuk mematangkan rencana hingga akhirnya terbentuklah panitia di mana event

organizer-nya adalah KADIN. Agar keberadaan kegiatan tersebut kuat hukumnya, maka dikeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1968. Dalam peraturan ini ada pasal dan ayat yang mengatur, seperti: *Pertama*, PRJ menjadi agenda tetap tahunan dan diselenggarakan menjelang HUT Jakarta yang dirayakan setiap tanggal 22 Juni. *Kedua*, dibentuk Yayasan Penyelenggara Pameran dan Pekan Raya Jakarta yang bertugas sebagai penyelenggara PRJ. *Ketiga*, dibentuk penyelenggara Arena Promosi dan Hiburan Jakarta (APHJ). Badan ini diberi mandat untuk bekerja sepanjang tahun.

Berkat ide Haji Mangan dan dukungan kuat Bang Ali maka PRJ hadir di Jakarta dan





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berlangsung terus hingga saat ini. Kali pertama diadakan, disebut dari sumber sejarah, PRJ Tahun 1968 mampu mengundang sekitar 1,4 juta orang ke Lapangan Monas. Berbagai acara pun digelar di sana sehingga PRJ yang pertama itu disebut sukses meraih keuntungan.

Kegiatan PRJ yang pertama rupanya memberi kesan yang mendalam bagi para pengunjung dan masyarakat, sehingga kegiatan itu dinantikan. Buktinya, pada PRJ tahun berikutnya, 1969, kegiatan yang diadakan lebih dahsyat. Pada PRJ kedua ini berlangsung sampai dua bulan lebih,

tepatnya 71 hari.

PRJ tahun itu juga membawa kedahsyatan yang lain, yakni mampu menarik Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, yang saat itu melakukan lawatan ke Indonesia, mampir ke PRJ. Dalam kunjungan itu Nixon menyapa kepada para pengunjung.

Kegiatan pameran dan hiburan itu rupanya seperti bola salju, menggelinding dan semakin membesar. Lapangan Monas sebagai tempat acara digelar pun sepertinya tidak memadai lagi di samping bisa jadi area di sekitarnya semakin padat dan sesak oleh lalu lalang lalu lintas dalam berbagai

kegiatan.

Agar kenyamanan tidak terusik maka kegiatan PRJ selanjutnya di pindah di Kemayoran, masih tetap di Jakarta. Dari sinilah sebutan JFK melekat padanya. Di bekas area lapangan terbang Kemayoran itu, ruang yang ada dirasa lebih lega sebab menempati lahan seluas 44 hektar. Untuk parkir mobil dan sepeda motor lebih nyaman bila dibanding masih berada di Lapangan Monas.

Sejak tahun 1992, PRJ sudah tak lagi di Lapangan Monas dan beralih di Kemayoran. Dari sinilah acara itu semakin membesar, lingkup pesertanya pun semakin tambah banyak, tidak hanya dari produk lokal bahkan sudah dibanjiri produk mancanegara, hal demikian membuat PRJ menjadi semacam pameran internasional.

Diungkap dalam setkab.go.id, PRJ tahun 2023 ini digelar sejak tanggal 14 Juni hingga 16 Juli 2023. Ajang pameran ini menampilkan produk unggulan dari berbagai macam sektor industri, seperti otomotif, teknologi informasi, olahraga, mode dan pakaian, kosmetik, peralatan dan perabotan rumah tangga, elektronik, kuliner, kerajinan tangan dan kreatif, herbal and obat-obatan, perbankan, serta produk jasa. Perhelatan ini juga dimeriahkan oleh Jakarta Fair Music Concert, yang menghadirkan sejumlah musisi dan band papan atas dalam negeri, serta hiburan atraktif lainnya.

Di laman www.jakartafair.co.id, disebut JFK 2023 dilaksanakan dengan tema:



Richard Nixon Menyapa Para Pengunjung PRJ



'Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia.' Tahun 2023, ajang JFK tetap menjadi destinasi hiburan bagi masyarakat Jakarta maupun luar daerah yang merindukan keseruan acara JFK.

JFK menggelar Jakarta Fair Music Concert selama 33 hari penuh dengan musisi dan band papan atas dalam negeri. Hiburan atraktif lainnya terdiri dari wahana permainan anak, parade karnaval, kontes pemilihan Miss Jakarta Fair, dan pesta kembang api spektakuler. Tak ketinggalan stand kuliner Nusantara yang tersebar di seluruh area Jiexpo. □

AWGI dari berbagai sumber



Gemerlap Pasar Gambir, Inspirasi PRJ

Saat ini tidak ada jejak Pasar Gambir, namun pasar itu pernah ada. Pasar Malam yang pernah hidup pada masa pemerintahan Kota Batavia digelar untuk memperingati hari lahir Ratu Wilhelmina. Pada masanya, pasar itu menjadi daya tarik bagi etnis Eropa, Betawi, dan lainnya untuk berduyun-duyun ke pasar. Keberadaannya memberikan keuntungan puluhan ribu gulden pada pemerintah kota. Gemerlap Pasar Gambir disebut menjadi inspirasi lahirnya PRJ.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BILA tidak ada Pasar Gambir tidak ada Pekan Raya Jakarta (PRJ). Ungkapan demikian bisa jadi benar adanya, sebab ide Haji Mangan untuk menggelar PRJ terinspirasi, salah satu adanya Pasar Gambir. Meski Pasar Gambir

sekarang sudah tiada, namun jejak sejarahnya tercatat kuat yang menceritakan sisi-sisi kehidupan kolonialisme Belanda di Indonesia.

Banyak catatan tentang Pasar Gambir. Diungkap pasar itu sudah ada sejak tahun

1898. Pasar Gambir diadakan oleh Pemerintah Kota Batavia sebagai rangkaian untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oran-Nassau. Ia lahir pada 31 Agustus 1880. Sedang dia bertahta mulai 1890 hingga 1948. Dengan mengacu pada hari lahir sang ratu maka Pasar Gambir diselenggarakan setiap tanggal 31 Agustus.

Pasar malam ini diadakan di Koningsplein (Alun-Alun Raja) yang berada di Gambir. Lokasi tepatnya saat ini adalah Lapangan Monas. Selama masa pendudukan Belanda di Indonesia, Pasar Gambir rutin diadakan setiap tahun dan bubar saat Jepang datang ke Indonesia yang menggantikan Belanda sebagai penjajah.

Rutinitas pasar yang digelar ratusan tahun itu membuat ada anggapan Belanda yang menciptakan budaya pasar malam di Indonesia. Adanya anggapan Belanda yang mengkreasi Pasar Gambir dibantah oleh Tjalie Robinson, intelektual keturunan Inggris-Belanda-Jawa dan sastrawan yang mengembangkan bahasa Petjok.

Dalam *republika.co.id*, 26 Juni 2013, Tjalie mengatakan, orang Belanda bukan



Dari antusiasmenya masyarakat maka keuntungan diraih oleh pemerintah kota. Mereka yang masuk ke pasar untuk kaum pribumi dikenai karcis sebesar 10 sen. Sedang untuk orang Belanda sebesar 25 sen. Dari pendapatan karcis, surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* pada 23 September 1921 menyebutkan, laba bersih yang didapat dari penyelenggaraan Pasar Gambir adalah 18.848.38 Gulden dengan jumlah pengunjung mencapai 334.985 orang.

Meski disebut sukses dari segi raihan pengunjung dan laba, namun majalah bulanan yang terbit di Belanda, *Elsevier Illustrated*, mengabarkan cerita yang kurang sedap dari gelaran Pasar Gambir. Diungkap,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

penggagas pertama penyelenggaraan Pasar Gambir. Tanpa menyebut sumber sejarahnya, ia menulis bahwa Sir Thomas Stamford Raffles pernah menyelenggarakan pasar malam tahun 1812 untuk memperingati ulang tahun Raja George III.

Lebih lanjut, dikatakan Tjalie, Raffles mengajak seluruh penduduk kulit putih, Inggris, non-Inggris, dan penduduk Batavia, berpesta bersama di Pasar Gambir. Setelah Raffles pergi dan Belanda kembali ke Jawa, orang-orang Belanda mengorganisir pasar malam, tapi bukan di Gambir. Orang-orang Belanda lebih suka membuat pasar malam di kawasan Lunapark.

Terlepas dari masalah siapa yang membuka, Pasar Gambir yang digelar oleh Belanda memiliki banyak cerita. Disebut dalam *Wikipedia*, pasar ini merupakan sarana hiburan rakyat pada masanya. Di dalam pasar ada berbagai macam pertunjukan seperti wayang, ronggeng, dan topeng. Tak hanya tontonan kesenian

budaya nusantara, namun di sana juga ada berbagai macam uji ketangkasan atau permainan seperti panjat pinang, balap karung.

Waktu buka pasar oleh pemerintah kota dipatok selama satu minggu, namun antusiasme warga Belanda, Betawi, dan etnis lainnya yang demikian tinggi membuat lama buka pasar diperpanjang hingga dua minggu. Berbagai wahana melayani pengunjung mulai jam 10 pagi hingga 12 malam. Antusias warga menikmati Pasar Gambir termuat dalam harian *Java-bode*, yang mengungkap Pasar Gambir tak pernah gagal menarik perhatian orang-orang Betawi untuk datang.

Bukti antusiasmenya warga kepada pasar itu juga terungkap dari pemberitaan harian lainnya. Di *Wikipedia* diceritakan tahun 1906 jumlah pengunjung kegiatan ini tercatat mencapai 75.000 orang dari dalam dan luar Batavia. Jumlah pengunjung yang melimpah pada masa itu.

pada dekade pertama tahun 1900-an, Pasar Gambir tidak ubahnya pasar biasa. Stand dan paviliun tidak menarik dan kawasan sekujur pasar hanya disesaki berbagai atraksi permainan dan hiburan.

Lebih lanjut dalam kisah yang terungkap di *republika.co.id*, tahun 1921 Pasar Gambir sempat kehilangan daya tarik. Penduduk kulit putih Belanda menyebutnya sebagai pasar untuk *inlander* kelaparan. Meski demikian, pemerintah kota tetap menyelenggarakan Pasar Gambir pada tahun berikutnya.

Entah karena berita dari majalah bulanan itu, pada tahun-tahun selanjutnya wajah Pasar Gambir dipercantik. Diceritakan, pintu gerbang pasar dirancang dengan ornamen bangunan khas nusantara. Setiap tahun berbeda ornamen. Misalnya, tahun ini ornamen Bali, selanjutnya ornamen Minang. Untuk mempercantik Pasar Gambir, sampai-sampai pemerintah kota membentuk tim insinyur yang menentukan tema pintu gerbang pasar.



Tak hanya itu, untuk menjawab berita dari *Elsevier Illustrated*. Dalam setiap pembukaan, penutupan, dan di puncak acara HUT Ratu Belanda, panitia menyalakan kembang api sehingga suasana Kota Batavia pada masa itu seperti tahun baru pada saat ini.

Sosok yang mengubah Pasar Gambir menjadi cantik adalah JH. Antonisse. Dalam *republika.co.id*, dipaparkan, Antonisse adalah seorang arsitek otodidak. Ia tiba di Batavia dari Belanda pada tahun 1914. Di masa usianya yang terbilang masih muda, 26 tahun, pada saat berada di Batavia, dia memperdalam ilmu arsitektur di bidang konstruksi bambu untuk rumah-rumah semi permanen.

Di tahun 1920, oleh pemerintah kota dia diangkat menjadi Kepala Departemen Teknik. Selanjutnya dia diberi tugas untuk mempercantik Pasar Gambir agar pasar itu kembali dikunjungi warga kulit putih.

Apa yang dilakukan anak muda itu ternyata sukses. *Elsevier Illustrated* yang awalnya mengejek Pasar Gambir selanjutnya memujinya. Disebut oleh majalah



itu, Pasar Gambir 1934 tidak ubahnya kota fantasi. Di Pasar Gambir, ayam dan kambing melompat-lompat selama dua pekan dan burung di tongkat tak berhenti mengalungkan suara agar pengunjung terhibur.

Orang-orang kulit berwarna putih berpakaian Yogya dan Solo hilir mudik, or-

ang-orang Arab mengerumuni pusat penjualan furnitur, para *inlander* hanya sempat melihat-lihat bunga sisik mutiara, sedangkan orang Eropa memadati restoran-restoran yang menyajikan kuliner khas Jawa, Sunda, dan Batavia. □

AWG/dari berbagai sumber

Pekan Raya di Berbagai Daerah

Gemerlap PRJ memancar ke seluruh pelosok negeri. Di berbagai daerah juga ada acara serupa. Di pekan raya itu dipamerkan berbagai produk UMKM dan budaya lokal. Rutinitas mereka tergantung anggaran dan kepentingan pimpinan daerah.

GEMERLAP PRJ memancar ke seluruh pelosok negeri. Di berbagai daerah juga ada acara serupa. Di pekan raya itu dipamerkan berbagai produk UMKM dan budaya lokal. Rutinitas mereka tergantung anggaran dan kepentingan pimpinan daerah. Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair (JF) sejak diadakan di Lapangan Monas hingga Kemayoran, Jakarta, tidak hanya dinikmati oleh warga Jakarta. Gemerlap PRJ mampu mengundang warga, bupati, bahkan gubernur dari berbagai daerah untuk melihat, menikmati, dan belajar tentang gelaran pameran itu. Mereka tidak hanya ingin menikmati suasana yang tidak ada di kampung halaman, namun juga bagaimana acara serupa bisa diadakan di daerah masing-masing.

Dari kunjungan itu serta gemerlap dan derap Jakarta yang menjadi acuan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pembangunan di Indonesia, maka acara seperti PRJ juga menular ke berbagai daerah, dari provinsi sampai desa di seluruh Indonesia. Kegiatan pameran yang ada diberi

nama pekan raya atau fair. Di sana mereka memamerkan produk UMKM dan budaya setempat.

Lihat saja Pemerintah Provinsi Sumatera



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Utara (Sumut) mengadakan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Kegiatan yang demikian juga rutin diadakan setiap tahun. Dalam sumutprov.go.id, 11 Mei 2023, disebut Pemerintah Provinsi Sumut menggelar PRSU pada 16 Juni hingga 17 Juli 2023. Kegiatan yang terselenggara atas Kerjasama Pemerintah Sumut, BUMN, BUMD, dan swasta itu diadakan di Kompleks PRSU Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Sumut.

Dikatakan oleh Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Refli Yuner, PRSU tahun ini diharap menjadi momen yang baik bagi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas diri, dan optimalisasi sosial budaya.

Lebih lanjut dikatakan, PRSU 2023 juga akan menjadi stimulus dan promosi pembangunan bagi masyarakat dan stake-

holder pasca pandemi. Diharap ada perubahan yang lebih baik di banyak sektor kehidupan masyarakat menjadi fokus dari seluruh rangkaian kegiatan yang ada di PRSU. Serta menguatkan kembali rasa optimis masyarakat Sumut setelah tiga tahun pembatasan aktivitas karena pandemi.

Jawa Tengah (Jateng) pun juga memiliki acara serupa. Di provinsi ini kegiatan yang ada disebut dengan *Jateng Fair*. Pada tahun ini Jateng Fair digelar selaman 17 hari, dari 30 Juni hingga 16 Juli 2023. Dikatakan Direktur PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Perseroda, Titah Listyorini, Jateng Fair digelar di area PRPP Kota Semarang, mulai dari Bale Merapi, Bale Merbabu, Bale Sindoro, Sasana Muria, Sasana Ungaran, dan seluruh area luar ruangan di kawasan tersebut (pantura.tribunnews.com/2023/06/22/).

"Jateng Fair 2023 bertepatan dengan

momen libur sekolah, jadi kami memberi alternatif hiburan atau rekreasi untuk mengisi libur sekolah anak-anak," ujar Titah seperti termuat dalam web itu. Jateng Fair tahun ini mengusung tema: 'Inspiring Batik' dengan tagline 'Jateng Fair Is Back,' dan momen ini bertepatan dengan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jateng.

Sulawesi Selatan (Sulsel) juga memiliki pekan raya. Di sulselprov.go.id diberitakan Pemerintah Provinsi Sulsel bekerja sama dengan PT. Wahyu Promo Citra menggelar Pekan Raya Sulsel VIII di Hotel Claro Makassar, Selasa (1/11/2022). Pekan raya itu bertema: *Pro UMKM* digelar sebagai rangkaian dari Hari Jadi ke-353 Sulsel. Acara yang berlangsung 1-4 November 2022 merupakan acara pameran multiproduk, pariwisata, investasi dan produk unggulan di Sulsel.

Dalam web resmi pemerintah provinsi Sulsel itu lebih lanjut disebut, pekan raya dibuka oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dikatakan Andi Sudirman, "Saya targetkan sampai lima puluh binaan setiap tahunnya. Dibina kemudian ditampilkan di seluruh event, supaya UMKM kita merasa ada tempat untuk promosi".

Tidak hanya di tingkat provinsi, di desa pun juga ada pekan raya. Dikabarkan oleh tribunpontianak.co.id, setelah vakum selama 6 tahun, Pekan Raya Antibar (PRA) XV di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kembali dihelat pada tahun 2023. Bupati Mempawah, Erlina, mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Pekan Raya Antibar. "Hal ini sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan masyarakat di Kabupaten Mempawah, khususnya Desa Antibar, yang telah rutin melaksanakan PRA hingga masuk pelaksanaan yang ke-15," ujar Erlina seperti tertulis dalam web itu.

Selain di daerah di atas, tercatat di Kalimantan Timur, Brebes, Pekalongan, Banjarmasin, Gorontalo, Pontianak, serta provinsi, kota, dan kabupaten lainnya juga memiliki acara pekan raya. Mereka mengemas pameran dengan tema dan keunggulan masing-masing daerah. Pekan raya di daerah, ada yang diadakan secara besar-besaran, ada pula yang sederhana. Semua tergantung pada anggaran daerah masing-masing. □

AWGI dari berbagai sumber



Yunis Amu

Divemaster

Potensi Wisata Daerah Perlu Dukungan Pemerintah

SEJAK pertama kali ditemukan spot wisata laut, terutama diving, di Wisata Taman Laut Olele, Gorontalo, telah memberikan kesan sebagai kawasan wisata yang luar biasa indahnya. Bahkan, menurut Divermaster, Yunis Amu, Taman Laut Olele tidak kalah indahnya dengan kawasan wisata di Bali atau Lombok. Bahkan, dinilai sejajar dengan kawasan wisata diving di luar negeri.

Di sini, kata Yunis, beberapa spot diving sangat bagus untuk divers pemula dan profesional. Dua di antara yang direkomendasikan adalah *Spot Traffic Circle* dan *Sentinel*. Di dua spot itu, divers bisa melihat dan memberi makan banyak ikan yang sangat indah dan jinak.

Namun, hingar bingar taman laut ini tidak begitu menggelegar. Wakil Ketua MPR MPR, Fadel Muhammad, dalam kesempatan meninjau kawasan wisata Taman Laut Olele, baru-baru ini, berharap agar pemerintah daerah dan pusat membantu dan mendukung potensi pariwisata di sini dengan melakukan upaya-upaya promosi, misalnya kegiatan festival dan semacamnya.

“Alhamdulillah, sekarang mulai diperhatikan dan sedang dilakukan upaya-upaya itu, diantaranya,” ujar Fadel. Bahkan, Pimpinan MPR dari kelompok DPD RI ini akan mengupayakan agar ada penerbangan langsung dari Manado ke Gorontalo. □

DER



M. Soleh

Mahasiswa FH IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Karya Mahasiswa Harus Bisa Masuk di Parlemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR adalah rumahnya rakyat, rumah kebangsaan. Artinya, artinya setiap warga negara Indonesia boleh menyumbang saran, pikiran, dan pendapat, serta aspirasi di MPR. Mahasiswa sebenarnya banyak menyumbang pikirannya, tidak hanya melalui debat, diskusi, dan demo tapi juga melalui karya tulis.

Menurut saya, sebagai mahasiswa, berharap, jika dimungkinkan karya tulis buah pikiran para mahasiswa terkait kelembagaan MPR atau secara luas terkait kebangsaan, bisa diterima MPR dan disimpan sebagai arsip atau bisa juga sebagai bahan atau materi kajian di MPR.

Karya tulis atau buah pikir mahasiswa juga diharapkan bisa dibentuk jadi satu buku dan disimpan di Perpustakaan MPR. Jika hal ini bisa dilakukan akan menjadi satu kebanggaan buat mahasiswa dan merupakan sumbangsih pikiran mahasiswa untuk bangsa dan negara. □

DER

Joniwarsito Waruwu

Pejuang Pendidikan dari *Pulau Nias*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JELANG perayaan HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023 pemerataan kesejahteraan dan keadilan masih jauh api dari panggung. Daerah-daerah terpencil dan terluar belum memperoleh kemudahan, sebagaimana saudara-saudara mereka yang hidup di pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya.

Kabar kurang sedap itu salah satunya datang dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Hingga saat ini, siswa-siswi lulusan SLTA di Nias masih kesulitan menjangkau pendidikan tinggi negeri. Jangankan menjadi mahasiswa di universitas negeri untuk bersaing ikut tes masuk saja kesempatan mereka sangat terbatas.

“Banyak di antara alumni SLTA tidak memiliki akses serta informasi tentang perguruan tinggi negeri. Selain itu, kemiskinan membuat mereka tidak berani mengikuti tes masuk PTN, lantaran ketiadaan biaya. Untuk menjual sawah, mereka ragu, karena tidak yakin diterima dan melanjutkan pendidikan, sehingga semua berakhir begitu saja,” ungkap Joniwarsito Waruwu, pengagas Gerakan Haga Pendidikan Ono Niha (terang pendidikan untuk generasi suku Nias), kepada Majelis *Majelis* MPR RI beberapa

waktu lalu.

Lokasi, menurut Joni, menjadi salah satu kendala yang relatif sangat berat bagi siswa-siswi alumni SLTA di Pulau Nias untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena, untuk ikut tes masuk PTN mereka wajib datang ke Medan, yang jarak tempuh sekitar satu hari perjalanan darat. Padahal, kebanyakan siswa-siswi SMA di sana belum pernah pergi ke Medan.



Sementara untuk menggunakan pesawat biayanya relatif mahal, tidak terjangkau oleh kebanyakan orangtua yang anaknya ingin melanjutkan sekolah.

“Jadi persoalannya memang tidak sederhana, karena itu perlu kehadiran negara untuk memberikan kesempatan yang sama, seperti siswa-siswi dari daerah lain. Mereka memiliki akses dan informasi yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri,” kata anak dari pasangan Yanofati Waruwu dan Kami Gulo.

Sebelum pemerintah hadir untuk memberi keadilan, menurut Joni, Gerakan Haga Pendidikan Ono Niha berusaha mengisinya dengan sepuh kekuatan yang mereka punya. Meskipun kualitas dan kuantitasnya tidak sebanyak yang dibutuhkan. Tetapi, sejak kurun waktu 2021 Gerakan Haga Pendidikan Ono Niha sudah melakukan sosialisasi untuk berbagai SLTA. Mereka juga memfasilitasi lulusan SLTA ikut dalam tes masuk ke PTN.

“Tahun ini kami membawa 12 anak, 8 di antaranya berhasil masuk di berbagai perguruan tinggi negeri favorit. Mulai dari UGM, ITB, hingga UNS. Ini adalah bukti jika ada kesempatan, anak-anak Pulau Nias juga bisa berprestasi, bersaing dengan pelajar lain di seluruh Indonesia,” ungkap Joni.



Gagal di semester enam

Apa yang diperjuangkan Joni dalam membantu pelajar Nias agar bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tak lepas dari perjalanan hidup yang pernah dilaluinya. Ceritanya, pada 2014, Joni lulus dari SMA Negeri 3 Gunungsitoli dan bermaksud melanjutkan pendidikan di PTN. Tetapi, keinginannya itu bertepuk sebelah tangan. Orangtuanya tak cukup memiliki biaya untuk mengantarkan anak mereka ke jenjang perguruan tinggi.

"Waktu itu Bapak hanya bilang, ini ada uang Rp 400 ribu. Kalau kau ambil silakan, tapi kalau tidak, kau bisa bekerja di kebun menjaga karet dan menanam pisang," ungkap pria kelahiran Onanamolo II, 20 Juni 1995, itu.

Akhirnya uang tersebut dia ambil. Tetapi

bukannya senang, malah masalah lain langsung muncul. Uang sebesar Rp 400 ribu dari orangtuanya tak cukup untuk ongkos perjalanan dan hidup di Medan selama mengikuti tes masuk PTN. Joni pun memutar otak. Akhirnya, ia memutuskan ikut menumpang truk agar saat menyeberang maupun menuju medan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.

Tetapi pilihan itu bukan tanpa risiko. Selama perjalanan dia harus rela tersengat terik matahari juga hembusan angin kencang. Ia juga harus pasrah saat hujan turun, dan membiarkan sekujur tubuhnya basah hingga menggigil.

Beruntung, perjuangan tersebut membuahkan hasil. Joni diterima di Universitas Sumatera Utara, program studi Fakultas Ekonomi Pembangunan. Tetapi ujian yang

dihadapi belum selesai. Minimnya kiriman dari kampung memaksa Joni bekerja. Ia pernah menjadi operator wartel hingga waitress sebuah café. Dia juga harus rela menahan lapar karena memang tidak memiliki cukup uang untuk biaya hidup.

"Sampai satu saat saya mengalami sakit mag akut, lantaran sering tidak makan. Saya juga mengalami masalah ketika jam kuliah kerap berganti dari pagi menjadi sore, sementara waktu itu saya juga harus bekerja. Karena persoalan itu saya harus berhenti kuliah sejak semester enam," ujarnya.

Untuk menutupi sebagian penyesalannya karena gagal merampungkan kuliah, Joni berusaha agar nasib kurang beruntungnya itu tidak dialami oleh siswa siswi SLTA Nias. Ia berharap, pemerintah, dalam hal Kemendikbud, segera turun tangan. Membuka kesempatan bagi alumni SLTA di Nias mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri tanpa harus ke Medan.

"Kalau terus harus ke Medan maka jumlah anak yang bisa ikut tes masuk PTN sangat kecil. Tahun ini ada sekitar 17.429 siswa, dan yang ikut tes PTN hanya sekitar 400 siswa. Selebihnya tidak bisa ikut tes dengan alasan biaya," untkapsnya.

Untuk itu, Joni akan terus berusaha meminta pemerintah hadir dan mengurai benang kusut persoalan pendidikan di Nias. Dan, untuk memperjuangkan upayanya itu, sejak 26 Juni 2023, Joni berkendara sepeda motor ke Jakarta dari Pulau Nias untuk memasang spanduk berisi permohonan agar pelaksanaan tes masuk PTN bisa dilaksanakan di Pulau Nias.

"Ini adalah tuntutan pelajar SLTA di Nias. Kalau tahun depan tuntutan tersebut belum bisa dituruti niscaya akan ada lebih dari 17 ribu lulusan SLTA yang berhenti bersekolah begitu saja. Semoga negara mendengar permohonan ini," tutupnya. □

MBO

Upaya Menjaga Stabilitas Politik di Tahun 2024

Keinginan bersama agar di tahun politik tahun 2024 situasi tetap adem. Meski ada kontestasi partai politik diharap semua tetap dalam bingkai aturan hukum yang ada. Lalu bagaimana menciptakan kondisi demikian? Berikut pendapat wakil rakyat dari beragam fraksi.

Herman Khaeron, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

Berpegang pada Empat Pilar MPR

DALAM politik ada ilmunya, ada *high politic*, ada *low politic*. Berbicara persoalan *low politic*, ya saya berbicara persoalan bagaimana memenangkan Partai Demokrat. Hal demikian adalah tataran kita berbicara persoalan di *low politic*. Namun, kalau kita berbicara pada *high politic*, berbicara persoalan tataran kebangsaan, kenegaraan, saya berbicara persoalan bagaimana memikirkan nasib bangsa dan negara. Berbicara tentang Indonesia Emas 2045 karena negara ini milik bersama. Negara ini milik bersama, bukan milik golongan.

Kontestasi hanya sebagai kompetisi yang temporer. Durasinya sebentar, seperti kami di DPR. Kalau mau masuk pemilu maka berkontestasi. Setelah itu ya biasa lagi. Di internal partai ada kegaduhan itu pasti. Ada kompetisi karena ada kursi yang diperebutkan, ada jabatan tertinggi negara, atau jabatan tinggi negara yang diperebutkan baik di legislatif maupun di eksekutif, ini realitasnya begitu.

Kalau kemudian dalam konteks bagaimana kita bisa menenteramkan atau membuat situasi lebih *adem* dalam tensi politik yang tinggi, mari kita naikkan pembicaraan politik kepada tatanan politik kebangsaan. Contoh nyata, kemarin di beberapa media televisi ketika Ketua PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

masuk dalam radar bacawapres di PDI Perjuangan, kok tiba-tiba menjadi *adem* Demokrat dengan PDI Perjuangan.

Ini menunjukkan saling membuka ruang akan ada proses-proses dialog dan komunikasi politik. Kita buka ruang itu karena dalam tataran *high politic*, dalam tataran berbicara persoalan nilai-nilai kebangsaan, kita sama tujuannya untuk bisa mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat yang adil dan sentosa, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan tentu mempertahankan kemerdekaan.

Ini menjadi ciri dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya kira di negara-negara lain sama, di Amerika pertarungan dua komunitas besar partai. Ketika bertarung di kompetisi pemilu ya mereka juga saling menjatuhkan, saling menyinggikan dirinya masing-masing, namun setelah itu ya semua berjalan dengan normal.

Tinggal bagaimana kemampuan seorang politisi betul-betul memahami nilai-nilai kebangsaan. Kalau berbicara nilai-nilai kebangsaan di lingkungan MPR semestinya malu dengan dirinya sendiri kalau masih

sering mengangkat perbedaan. Masih sering kemudian merasa menang sendiri. Menurut saya, itu tidak memahami seutuhnya nilai-nilai Empat Pilar MPR karena kami setiap saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konteks dan tataran *high politic* dalam nilai-nilai kebangsaan, menurut saya, politisi memiliki satu visi dan misi yang sama sebagai negara bangsa, tetapi pada tataran ataupun konteks pemilu memang ada kontestasi, tetapi ini sudah biasa. Situasi

boleh panas, tetapi hati tetap dingin, kita tidak boleh berpecah belah walau berbeda partai, berbeda baju, tetapi dalam konteks membangun bangsa harus bersama. Tidak ada kawan sejati, tak ada lawan abadi yang ada adalah kesamaan kepentingan. □

AWG

Muhammad Misbakhun, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Bikin Pemilu yang Menyenangkan Semua



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PARTAI yang paling tua di republik ini adalah Golkar. Paling tua menjalani perjalanan waktu yang panjang dalam pemilu damai maupun pemilu yang ribut. Semua pernah dijalani oleh Golkar. Kalau melihat perjalanan sejarah maka yang ideal pemilu itu diadakan dalam posisi politik dan keamanan yang stabil. Karena kita mengatakan sebagai pesta demokrasi, kita bikin pemilu yang menyenangkan bagi siapa saja, baik peserta pemilu atau orang yang berperan serta di dalam pemilu.

Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua. Menjadi kepentingan bersama, kepentingan bersama oleh semua warga bangsa. Ketika kita berbicara *high politic*, nilai-nilai kebangsaan, bagaimana *high politic* dan politik kebangsaan itu kita tujukan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan kekuasaan, bukan juga kepentingan partai demi partai.

Dalam sejarah republik ini, partai itu timbul dan tenggelam. Ada partai yang baru berdiri, ada partai yang sudah lama berdiri seperti Golkar, dan kemudian ada partai-partai yang

baru didirikan oleh pecahan dan sebagainya.

Inilah yang menjadi tugas kita bersama, karena pemilu yang damai itu bukan *givent*, bukan datang dari langit, itu harus di kondisikan oleh semua. Dengan nilai-nilai kebangsaan yang tinggi kita sampaikan menjadi pesan bersama kepada seluruh rakyat Indonesia.

KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan sebagai pengawas, mereka juga harus mempunyai peran serta bagaimana membangun sistem pemilu yang kredibel sesuai yang kita sepakati bersama di dalam undang-undang pemilihan umum.

Kontestasi politik itu adalah salah satu upaya untuk tetap menjaga kesinambungan proses demokrasi berjalan. Kita sudah tidak membicarakan lagi penundaan pemilu. Sudah tidak lagi berbicara tentang tahapan-tahapan yang lain di luar periode 5 tahun. Jadi disiplin terhadap waktu 5 tahun ini kita ikuti dengan tertib dalam rangka melaksanakan konstitusi negara, mengimplementasikan undang-undang yang mengatur soal itu.

Peran saya sebagai politisi di bawah partai, bagaimana membawa partai saya kredibel, menjadi peserta pemilu yang kredibel, dipercaya oleh rakyat pada saat pemilu, dalam bingkai aturan main yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yang ada. □

AWG

Diskusi Empat Pilar MPR

Pilihan Pemimpin yang **Memiliki** Moral dan Berintegritas Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid menyebutkan, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sudah final. Namun, makna Pancasila dalam implementasi dan praktik sehari-hari belum final, karena mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah.

Jazilul mencontohkan makna sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pada masa Presiden Soekarno dikenal Demokrasi Terpimpin. Kemudian, pada masa Soeharto, pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung. Sedangkan pada masa reformasi, rakyat secara langsung memilih presiden.

“Artinya, implementasi dari makna Pancasila, khususnya makna hikmah kebijaksanaan, makna permusyawaratan, makna perwakilan, berubah-ubah,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema: “Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Diskusi yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ini juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, dan Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago.

Jazilul menambahkan, makna Pancasila juga tergantung para pemimpin dan orang-orang yang mengamalkannya. “Makna terkait Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat dinamis, tergantung pemimpinnya. Karena itu, pada Pemilu tahun 2024 pilihlah presiden yang Pancasilailais,” ujarnya.

Pada Pemilihan Presiden dan Pilkada, lanjut Jazilul, hanya melalui soal elektabilitas. Iman dan taqwa tidak pernah menjadi ukuran, karena memang tidak bisa diukur. Iman dan taqwa hanya sekadar pemanis saja. “Makanya kalau disebut carilah pemimpin yang Pancasilailais, semua pasti ketawa. Padahal hal itu sesuatu yang menurut saya penting. Itu (Pancasilais) menjadi dasar bagi seorang pemimpin yang punya moral Pancasila, yang mempunyai integritas Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan menyebutkan, Pancasila merupakan ideologi dan falsafah bangsa yang mempersatukan Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang



besar, Indonesia dipayungi oleh Pancasila. “Jika tidak ada Pancasila, mungkin kita sudah menjadi negara federal. Tetapi, negara Pancasila yang berpenduduk 275 juta jiwa ini tetap utuh sebagai sebuah negara,” katanya.

Lebih lanjut Syarif Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, mengatakan, masyarakat jangan memperbesar perbedaan, tetapi sebaliknya mengedepankan persamaan. “Perbedaan jangan diperbesar. Perbedaan tetap ada tapi jangan membuat kita terpecah belah. Dan, yang paling penting, kita saling merangkul,” imbuhnya.

Syarief Hasan juga mengingatkan agar kita jangan membiarkan tumbuhnya benih-benih perpecahan di antara anak bangsa. “Kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada Pancasila,

saling menghargai, dan menghormati satu sama lain, untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam konteks Pemilu 2024, Syarif Hasan mengatakan, Pemilu 2024 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Pemilu adalah sebuah proses mengembalikan hak kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagai tujuan, melainkan alat untuk menuju kesejahteraan rakyat. “Pemilu adalah proses demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

“Pemerintah harus memfasilitasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil serta lancar dan damai. Berbeda pilihan adalah bagian dari demokrasi. Semuanya agar tidak menyalahi ideologi Pancasila dan kesatuan dan persatuan bangsa,” imbuhnya.

Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi

Chaniago menekankan pentingnya nilai Pancasila dalam konteks demokrasi, yaitu demokrasi yang terbuka, demokrasi yang berkeadilan, dan demokrasi yang menghadirkan persaingan atau kontestasi. “Kalau misalnya, ada partai diambil dengan cara menggunakan kekuatan hukum, sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena tidak ada persaingan yang sehat,” katanya.

Pangi juga menekankan sikap kenegarawanan dari para pemimpin. Dalam konteks Pemilu 2024, negarawan harus memastikan trust yang kuat. “Pemilu hari ini ada distrust, saling curiga, ada intervensi, cawe-cawe. Ini juga mengganggu nilai-nilai Pancasila. Padahal yang penting dalam konteks Pemilu adalah legitimasi kepercayaan,” katanya. □

Terima Pansus Ranperda Provinsi Kaltim

Ahmad Basarah Dorong Setiap Pemda Buat Perda Pembinaan Pancasila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah mendorong semua DPRD Provinsi di Indonesia mengeluarkan Perda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, seperti yang dilakukan DPRD Yogyakarta dan kini tengah dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Semua Perda itu akan menjadi benteng kokoh yang menjaga Pancasila dari gempuran ideologi

asing.

“Saat ini pembinaan Pancasila secara nasional memang dibebankan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, tapi ingat BPIP tidak punya kaki ke daerah seperti BRIN. Karena itu, jika setiap provinsi punya Perda tentang pembinaan Pancasila, ini akan sangat membantu semua pihak melakukan sosialisasi ideologi negara Pancasila,” tegas Ahmad Basarah, saat

menerima tim Pansus Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gedung MPR RI, Jumat (23/6/23).

Delegasi yang diterima oleh Ahmad Basarah berjumlah 11 orang dari tujuh fraksi, dipimpin oleh Romadhony Putra Pratama dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Sosialisasi Empat Pilar, Ahmad Basarah mengusulkan agar judul Raperda diganti dari semula Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Raperda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Jika digunakan kata Pendidikan, nomenklatur ini sudah digarap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Perda yang sedang Anda semua susun ini ‘kan akan mengatur bagaimana membina masyarakat agar mengenal, menghayati, dan merawat Pancasila. Jadi, seharusnya digunakan kata pembinaan,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Ahmad Basarah, era digital saat ini telah membawa Pancasila ke persimpangan jalan yang memperhadapkan



ideologi bangsa Indonesia ini dengan ideologi-ideologi asing, mulai dari yang beraliran kapitalisme, komunisme, bahkan transnasionalisme. Mereka yang merongrong ideologi Pancasila ini, kata dia, biasanya melakukan penetrasi ideologi lewat masyarakat desa dan dusun yang jauh dari pusat pemerintahan di ibukota.

"Kita bisa lihat sendiri banyak tersangka teroris ditangkap di pelosok-pelosok dusun dan desa. Karena itu, jika setiap Pemda punya Perda sendiri-sendiri yang mengatur tentang pembinaan Pancasila, gerakan ini akan sangat bagus. Kearifan lokal yang terkandung di setiap Perda tentu punya kelebihan sendiri-sendiri dalam membentengi Pancasila dari gempuran

ideologi asing," tandas Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Ketua Pansus Romadhony Putra Pratama mengaku, mendapat banyak masukan dari Ahmad Basarah. Ia menjelaskan bahwa Raperda yang tengah disusun ini memang ditujukan untuk menjadi benteng ideologi tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya menjelang Ibukota Nusantara diresmikan.

"Kami berharap, saat Raperda ini menjalani uji publik, Bapak Ahmad Basarah bisa memenuhi undangan kami menjadi salah satu narasumber. Kami ingin betul-betul mendapat masukan tentang Pancasila dari para ahlinya," jelas Romadhony. Delegasi ini mengaku sudah melakukan studi banding ke

DPRD Yogyakarta untuk mendapatkan hasil terbaik.

Delegasi yang diterima oleh Ahmad Basarah ini terdiri atas Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sigit Wibowo (Fraksi PAN), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun (Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur H. Seno Aji (Fraksi Gerindra), H. Romadhony Putra Pratama (Fraksi PDI Perjuangan), Ananda Emira Moeis (Fraksi PDI Perjuangan), Ekti Imanuel (Fraksi Gerindra), Harun Al Rasyid (Fraksi PKS), Hj Puji Setyowati (Fraksi Demokrat), H. Amiruddin (Fraksi Golkar), Ir. Sutomo Jabir (Fraksi PKB), dan Safuad (Fraksi PDI Perjuangan). □

Kuliah Umum di UNS Solo

Bamsoet Ajak Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktorat (S3) Universitas Borobudur dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, guna menyukseskan Visi Indonesia Emas 2045 yang terangkum dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah diluncurkan

Presiden Joko Widodo, maka MPR RI akan memperkuatnya dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Mengingat Visi Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud, setelah melalui beberapa periodisasi pemerintahan.

"Lima sasaran Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari: menjadi negara dengan pendapatan perkapita setara negara maju, menurunnya angka kemiskinan menuju nol persen dan berkurangnya tingkat

ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di pentas global, meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission," ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum dan Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Auditorium GPH Haryo Mataram, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Jumat (23/6/23).

Turut hadir jajaran Rektorat UNS, antara

Forum Komunikasi Publik di Bogor

Siti Fauziah: MPR Dukung Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBAGAI generasi muda harapan bangsa, anak-anak Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius. Kelompok milenials ini memiliki potensi menjadi manusia unggul di masa depan, namun sangat rentan dari aksi kekerasan, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Administrasi

Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., mengungkapkan bahwa seringkali kekerasan pada anak, bukan hanya terjadi secara fisik tapi juga kekerasan mental. "Saya rasa apapun alasannya tindakan kekerasan pada anak, baik fisik ataupun mental, tidak bisa dibiarkan. Harus dilakukan pencegahan sedini mungkin," katanya.

Hal tersebut disampaikan Ibu Titi, sapaan

akrab Siti Fauziah, saat membuka acara Forum Komunikasi Publik (FKP) dalam rangka Sarasehan Kehumasan MPR RI bekerjasama dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kantor MUI Jl. Raya Pajajaran No.10 Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023).

Acara yang mengusung tema: 'Peran FKDT dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkungan Pendidikan' ini, juga dihadiri oleh Anggota MPR RI yang juga Sekretaris Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., MM., Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH., Ketua FKDT Kota Bogor Moh. Nurdat Ilhamsyah, M.Pd., dan Penasihat FKDT Edy Kholky Zaelani, S.Sos., serta anggota FKDT Kota Bogor.

Dalam kesempatan itu, Ibu Titi juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia bahwa sebentar lagi bangsa ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilu tahun 2024. Walaupun, masih agak lama, namun hingar bingarnya sudah mulai terasa saat ini. "Hal inilah yang mesti diwaspadai dan kita sama-sama jaga," ujar Ibu Titi.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, lanjut Ibu Titi, jangan sampai nanti ada aura-aura negatif yang akan memengaruhi masyarakat sampai ke anak-anak. Inilah tugas Bapak dan Ibu sebagai orang tua di rumah dan pendidik di sekolah untuk senantiasa bisa membina dan memberikan edukasi yang tepat pada anak didiknya, sehingga bisa menghadirkan suasana sejuk, nyaman, dan damai. "Jangan sampai terjadi, suasana luar yang 'panas' terbawa hingga di lingkungan rumah maupun lingkungan pendidikan. Hal ini kita lakukan sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan mental terhadap anak sebagai generasi penerus," terangnya.

"Terkait hal ini, MPR sendiri sangat concern. Gelaran Forum Komunikasi Publik hari ini adalah upaya yang tepat sebagai sarana edukasi bagi kita semua. Apalagi, peserta



yang hadir dari kalangan pendidik serta guru ngaji dari madrasah, jadi sangat tepat. Sekali lagi, saya tekankan, MPR sangat mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, melalui berbagai bidang kegiatan, tidak

terkecuali kegiatan pada hari ini," terangnya.

Di akhir sambutannya, Ibu Titi berharap, kasus kekerasan pada anak ke depan bisa diminimalisir atau bahkan hilang sama sekali. "Dan, satu lagi, saya mengajak

semua elemen bangsa untuk berdoa agar Pemilu 2024 nanti berlangsung lancar, aman, dan pada akhirnya pasca pemilu, Indonesia menjadi semakin sejahtera," tandasnya. □



Sarasehan Kehumasan MPR Bogor

Guru Garda Terdepan Pencegahan Kekerasan Pada Anak

SEKRETARIS Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., MM., mengungkapkan bahwa tenaga pendidik atau para guru adalah garda terdepan pencegahan kekerasan pada anak. Kiprah dan peran para guru sangat penting, untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada anak didik dalam menghadapi potensi kekerasan.

Hal ini disampaikan dalam acara Forum Komunikasi Publik (FKP) dalam rangka Sarasehan Kehumasan MPR RI, bekerjasama dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) di Kantor MUI Jl. Raya Pajajaran No. 10 Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023).

Acara yang mengusung tema: 'Peran FKDT dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkungan Pendidikan' ini diikuti oleh lebih dari 75



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

peserta dari kalangan guru ngaji.

Acara dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt)

Deputi Administrasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM. Dilanjutkan pemaparan materi oleh



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

4 (nara sumber), yakni: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Indro Gutomo, SH., MH.; Ketua FKDT Kota Bogor Moh. Nurdad Ilhamsyah, M.Pd.; dan Penasihat FKDT Edy Kholky Zaelani, S.Sos.

Lebih jauh, Eem Marhamah menjelaskan, sebenarnya kasus-kasus kekerasan dan bullying terhadap anak itu seperti gunung es. Apalagi, kekerasan seksual. Sebab, banyak korban anak yang tidak berani untuk mengungkapkan karena malu atau takut.

“Edukasi dan pemahaman yang benar dari para guru akan membuat anak berani menolak, menghindar, dan melaporkan jika ada potensi kekerasan atau sudah mengalami kekerasan, di sinilah peran guru diperlukan,” katanya.

Satu lagi yang penting kemudian harus disosialisasikan, yakni sekarang sudah ada peraturan Menteri Agama terkait kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak. Itu sebisa mungkin harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Nara sumber berikutnya, Indro Gutomo menyampaikan bahwa acara ini merupakan tugas konstitusional MPR RI, yakni dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 tentang Pendidikan.

Berbicara mengenai tema sarasehan ini, Indro Gutomo menyatakan, sangat tepat. “Sebab, peran para guru sebagai garda terdepan sangat dibutuhkan untuk membangun generasi muda yang unggul di masa depan,” ujar Indro.

“Kita harus pahami bahwa 2045 adalah seratus tahun Indonesia Emas. Lalu, siapa yang akan mengisi perjuangan pembangunan di Indonesia saat itu? Tentu anak-anak kita semua. Bapak dan ibu para pendidiklah yang bertanggung jawab membentuk manusia unggul itu sejak sekarang,” katanya.

Untuk mencetak manusia unggul, menurut Indro, anak didik tidak hanya dibekali dengan kecerdasan intelektual semata, tapi perlu juga dibekali dengan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual.

“Dengan bermodal 3 (tiga) kecerdasan ini, kekerasan terhadap anak juga dapat diminimalisir, karena siswa akan semakin cerdas memilah apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya,” papar Indro. □



Reuni Akbar Alumni STIDI Al Hikmah

HNW Ajak Alumni Lanjutkan Perjuangan Bapak-Bapak Bangsa

SEKITAR 200 alumni STIDI (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islam) Al Hikmah pada Ahad, 18 Juni 2023, memenuhi Amphi Theatre, Museum Keprajuritan, TMII, Jakarta. Kehadiran mereka di sana sejak pagi adalah dalam rangka mengikuti silaturahmi/Reuni Akbar. Serangkaian acara disiapkan dalam Reuni Akbar itu, salah satunya Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPRI.

Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut terasa istimewa, antara lain karena diselenggarakan oleh alumni Sekolah Tinggi Islam dan materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA. (HNW). “Kepada para alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islam Al Hikmah, saya ucapkan selamat reuni,” kata HNW mengawali pemaparannya di depan para alumni perguruan tinggi beralamat di Mampang Prapatan, Jakarta, itu.

Selanjutnya, kepada peserta sosialisasi, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, materi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR bisa dipahami dengan baik dan benar oleh para alumni. Selanjut, menurut HNW, para alumni yang sudah dibekali pengetahuan Empat Pilar ini hendaknya menyebarkan nilai-nilai Empat Pilar ini ke seluruh warga bangsa pada saat berkiprah di tengah masyarakat Indonesia.

Jadi, ketika warga masyarakat di berbagai pelosok tanah air telah memahami Empat Pilar dengan baik dan benar maka saat berinteraksi akan menjadi solusi dan pencerah. Sehingga, tidak lagi mengenal pembelahan dalam masyarakat, dan justru akan menjadi solusi dan pencerah. Dengan demikian, di masyarakat tidak ada lagi kelompok keagamaan dan kelompok kebangsaan, yang ada keagamaan berwawasan kebangsaan, dan kebangsaan berwawasan keagamaan.

“Sebagaimana dahulu diteladankan oleh para Bapak-Bapak Bangsa saat membahas



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pancasila sebagai dasar negara, UUD 45 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa,” ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

Bersatunya nilai keagamaan dan kebangsaan, menurut HNW, bukanlah sesuatu yang baru bagi Al Hikmah. “Saya pernah menjadi dosen di sana, Al Hikmah,” tutur alumni Pondok Pesantren Gontor itu. Dia mengungkapkan, apa yang diajarkan di Al Hikmah tidak ada materi atau pelajaran yang bertentangan dengan nilai-

nilai Empat Pilar MPRI.

Dari sinilah, menurut HNW, alumni Al Hikmah merupakan alumni yang bisa mempraktikkan cinta agama, bangsa, dan negara dalam waktu bersamaan. Dia mendorong agar alumni Al Hikmah melanjutkan peran bersejarah para ulama dan tokoh umat Islam terdahulu, bersama tokoh bangsa lainnya bersatu padu berjuang untuk memerdekakan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. “Sekaligus menjawab berbagai tantangan membaru



pada saat ini," tuturnya.

Alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu juga mengakui kompetensi alumni Al Hikmah ketika terjun di masyarakat. "Dengan ijazah yang ada mereka diterima di berbagai instansi," ujarnya. Hal demikian bisa terjadi karena apa yang diberikan di kampus berkorelasi atau nyambung dengan apa

yang menjadi peluang dan harapan di masyarakat.

Oleh sebab itu, HNW berharap, mereka yang masih menuntut ilmu di Al Hikmah untuk memaksimalkan diri saat kuliah agar lapangan kerja yang terbuka saat ini bisa diraih. Kemudian, dia mengingatkan, bila sudah berada di tengah masyarakat, bekerja, agar

tetap membawa nilai-nilai yang hikmah, penuh kebaikan, kebajikan, dan kemaslahatan demi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Dengan cara itu, para alumni benar-benar bisa melanjutkan kiprah Bapak-Bapak Bangsa untuk kejayaan Indonesia menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka,"pungkasnya. □

Forum Konsultasi Publik MPR di Cirebon

Siti Fauziah Minta Mahasiswa Beri Masukan Seputar Layanan Publik MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara milik rakyat. Sebagai 'Rumah Kebangsaan,' rumahnya seluruh rakyat, tentu MPR bukanlah Menara Gading yang terlarang didekati rakyat. MPR justeru membuka pintu selebar-lebarnya untuk melayani rakyat

MPR melalui supporting system-nya, yakni Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, berupaya dengan sangat sungguh-sungguh membuka akses layanan publik, seperti layanan audiensi penerimaan delegasi dan layanan informasi dalam berbagai bentuk dan metode, yang semuanya memberikan

kemudahan serta kenyamanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah, yang akrab disapa Ibu Titi, saat membuka secara resmi gelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Majelis Permusyawaratan Rakyat (FKP MPR RI) di Ruang Onyx, Hotel Aston Cirebon, Kota Cirebon, Jumat (23/6/2023). Acara mengambil tema: 'Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik MPR RI (Layanan Audiensi Penerimaan Delegasi dan Layanan Informasi MPR RI) ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag Pemberitaan dan Hubungan

Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH.; Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani; Warek I Prof. Dr. Jamali, M.Ag.; Warek II Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag.; Warek III Prof. Dr. Hajar, M.Ag.; dan para mahasiswa FH Ketatanegaraan sebagai peserta.

Lebih lanjut Ibu Titi menyebutkan, beberapa bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan MPR untuk masyarakat, antara lain: *Pertama*, PPID yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik seperti MPR, sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, Penerimaan Delegasi. Masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, serta siapapun secara berkelompok bisa juga datang berkunjung langsung ke MPR, melakukan dialog, diskusi dan tanya jawab segala hal tentang MPR. Pimpinan, anggota atau Setjen MPR dengan senang hati akan menerima kunjungan delegasi dari masyarakat.

Ketiga, Perpustakaan MPR, yang menyediakan buku-buku tentang kenegaraan dan produk-produk MPR. Masyarakat bisa datang berkunjung untuk membaca bahkan meminjam buku dengan mengikuti aturan sudah ditetapkan. "Selain itu, MPR juga menyediakan layanan informasi publik secara *online*, yakni melalui aplikasi Buku Digital MPR yang bisa di download di *play store* android. MPR juga membuat akses media sosial seperti, *YouTube*, *Twitter*, dan *Instagram* bagi milenials yang kerap

berselancar di dunia maya,” terang Siti Fauziah.

Ibu Titi menegaskan, kepuasan akan kualitas layanan publiklah yang ingin dicapai MPR. “Tapi, semaksimal mungkin upaya kami untuk mewujudkan hal itu, pasti ada beberapa yang perlu diperbaiki untuk kemudian lebih disempurnakan lagi ke depan. Itulah, maksud dan tujuan diselenggarakannya FKP MPR ini. Kami ingin bertukar pikiran, menyerap aspirasi sekaligus meminta masukan dari peserta tentang layanan publik MPR,” tandasnya.

Setelah membuka secara resmi, Siti Fauziah mewakili Setjen MPR dan Rektor Prof. Aan Jaelani mewakili IAIN Syekh Nurjati Cirebon menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Indro Gutomo: Layanan Publik MPR Perlu Ditingkatkan

Usai dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., kegiatan Forum Konsultasi Publik MPR di Cirebon ini kemudian dilanjutkan acara sarasehan. Tampil sebagai narasumber: Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH.; Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag., serta Yenita Revi, SE., dan Yenita Revi, SE., dan Try Syilvani, SE., keduanya dari Biro Humas Setjen MPR RI.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Indro Gutomo, SH., MH., dalam pengantar diskusi mengungkapkan bahwa FKP MPR RI ini adalah program kegiatan baru yang diinisiasi oleh Biro Humas Setjen MPR RI. FKP MPR yang dilaksanakan di Cirebon ini merupakan penyelenggaraan yang kedua setelah FKP pertama yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Februari 2023.

“Kenapa untuk penyelenggaraan kedua ini dipilih IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena selain merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkualitas, civitas academica IAIN Syekh Nurjati juga adalah sahabat MPR yang selalu bersinergi dengan MPR dalam membahas masalah kebangsaan,” ujar Indro



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Gutomo.

Lebih lanjut Indro menjelaskan, FKP MPR ini adalah wadah MPR meminta masukan kepada masyarakat, tentang layanan publik MPR yang sudah berjalan. “Semua ini merupakan implementasi amanah dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang kemudian dilengkapi dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tiga tahun kemudian muncullah PP tentang Pelayanan Publik, khususnya pelayanan publik secara terpadu, yakni di PP 96 Tahun 2012,” tambahnya.

PP 96 Tahun 2012, tutur Indro, mengamanatkan bahwa salah satu syarat

peningkatan pelayanan publik adalah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat terhadap evaluasi peningkatan pelayanan publik itu sendiri. “Begitupun di MPR. Mekanisme pelayanan publiknya perlu dievaluasi juga oleh masyarakat. Nah, adik-adik mahasiswa ini adalah perwakilan dari masyarakat itu, apalagi adik-adik semua pernah dua kali berkunjung ke gedung MPR RI, sehingga tahu persis apa saja yang perlu dibenahi,” imbuhnya.

Terkait pelayanan publik, Indro Gutomo menjelaskan bahwa ada tiga jenis pelayanan publik yang perlu ditingkatkan dan perlu mendapat masukan dari mahasiswa



sekalian. *Pertama*, Pelayanan Informasi. Yakni, masyarakat yang datang dan meminta informasi kepada MPR. *Kedua*, Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Di sini, masyarakat menyampaikan aspirasi langsung maupun tak langsung. Dan, *ketiga*, Pengaduan Masyarakat. Artinya, ada masyarakat yang mengadukan permasalahannya dan ingin ada solusi serta tindak lanjutnya.

Tiga hal itu, menurut Indro, diwadahi oleh dua elemen, yakni: PPID, sebuah pelayanan informasi, kemudian sistem Penerimaan

Delegasi. "Nah, di poin-poin itulah adik-adik diharapkan bisa memberikan masukan bagaimana Penerimaan Delegasi menjadi lebih baik, lalu bagaimana PPID juga menjadi lebih efektif," paparnya.

Masukan atau rekomendasi yang dihasilkan dalam acara ini, jelas Indro Gutomo, ada dua jenis. Yakni: *Pertama*, masukan dari narasumber yaitu Rektor. *Kedua*, rekomendasi yang datang dari mahasiswa sebagai peserta. Kemudian, nanti diakhir acara (penutup) tentu saja mod-

erator akan merangkum apa intisari rekomendasi Rektor maupun mahasiswa. Semuanya, nanti akan tercatat dan akan ditindaklanjuti dengan baik oleh MPR RI.

Usai pemaparan pandangan dari Indro Gutomo, acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi seputar tema, yang dibawakan oleh narasumber pakar, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag dan narasumber dari Biro Humas Setjen MPR RI, Yenita Revi, SE dan Try Syilvani, SE. □

Pondok Pesantren Raudhatul Islamiah Bogor

Sjarifuddin Hasan: Ikut Pemilu Wujud Pelaksanaan Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., mengapresiasi dan juga menyanjung keberhasilan kerja TNI di Provinsi Papua. Khususnya kegiatan di luar tugas pokok sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara, yaitu suksesnya TNI dalam berkontribusi memutar roda perekonomian masyarakat. Karena keberhasilan tersebut membuat

masyarakat semakin membutuhkan dan bergantung pada TNI.

"Keberhasilan ini patut diacungi jempol dan kita dukung bersama. Sukses ini membuktikan bahwa TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat bukan isapan jempol semata. Terbukti, keberadaan TNI di sana semakin dibutuhkan, bukan hanya untuk menjaga keamanan tetapi juga meningkatkan perekonomian warga," kata Syarif Hasan.

Sanjungan Syarif Hasan itu disampaikan menjawab pertanyaan seputar ramainya pemberitaan terkait penolakan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang akan segera ditinggalkan Satuan Tugas Organik Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 305/Tengkorak, Kostrad, TNI Angkatan Darat yang akan kembali ke markas mereka di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat.

"Kita berharap, TNI semakin menunjukkan jati dirinya seperti yang dulu ditunjukkan oleh Panglima Besar Soedirman, yaitu selalu ada bersama rakyat," ungkap Syarif Hasan usai menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Raudhatul Islamiah, Jl. Pembangunan Kaum, Rt 5 RW 11 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Sabtu (24/6/2023). Ikut hadir pada acara tersebut pengasuh ponpes Raudhatul Islamiah H. Ahmad Syifuddin.

Dalam kesempatan itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menekankan, seluruh warga negara harus patuh dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komit pada NKRI,



dan menghargai Bhinneka Tunggal Ika. “Kalau semua itu sudah dijalankan dengan baik berarti lengkaplah sudah kewajibannya sebagai warga negara, dan hidup yang lebih baik pasti akan segera dinikmati,” katanya.

“Salah satu ciri masyarakat yang patuh, taat pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta komit pada NKRI dan menghargai Bhinneka Tunggal Ika adalah ikut aktif dalam Pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2023. Mari manfaatkan kesempatan itu untuk memilih para pemimpin kita, dan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin,” pungkasnya. □

MBO

Terima Mahasiswa IAIN Cirebon

Indro Gutomo: Di MPR Banyak Pengetahuan yang Bisa Digali



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKITAR 100 mahasiswa lintas semester Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon bersama beberapa dosen pendamping mengunjungi Gedung MPR RI, pada hari Senin (12/6/2023).

Rombongan delegasi kemudian diterima di Ruang GBHN Lantai III, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Indro Gutomo,

SH., MH., dan Kasubbag Hubungan Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR, Yenita Revi, SE.

Dalam sambutannya mewakili para mahasiswa, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Cirebon, Jefik Zulfikar Hafizd, memberikan apresiasi yang tinggi kepada MPR, terutama Biro Humas, Setjen MPR, yang menyambut kedatangan para mahasiswa dengan hangat.

“Kegiatan ini adalah Kunjungan Edukasi yang telah lama berlangsung dan menjadi agenda rutin kampus setiap tahun dengan menyambangi beberapa tempat yang dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan ketatanegaraan bagi mahasiswa, seperti kunjungan ke gedung MPR ini. Tujuan utama pihak kampus melakukan kegiatan ini adalah untuk mendukung mahasiswa memperoleh

pengalaman, sekaligus menyerap wawasan baru seputar tempat yang kami kunjungi,” ujarnya.

Merespon hal tersebut, Indro Gutomo menyampaikan bahwa sebagai Rumah Kebangsaan, rumah besarnya seluruh rakyat Indonesia, MPR dengan keleluasaan hati menyambut kedatangan masyarakat dari berbagai lapisan. “Pintu MPR terbuka luas untuk seluruh masyarakat Indonesia, siapapun itu,” tambahnya.

Kepada para mahasiswa, Indro Gutomo mengungkapkan bahwa di MPR begitu

banyak hal terkait pengetahuan seputar ketatanegaraan Indonesia yang bisa digali untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Bahkan, segala persoalan tentang tata negara dikaji di MPR atau tepatnya di Badan Pengkajian MPR, yang merupakan salah satu alat kelengkapan MPR.

Di Badan Pengkajian MPR, lanjut Indro Gutomo, banyak sekali kajian yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dan malah bisa dijadikan bahan atau materi untuk menyelesaikan skripsi. Contohnya, munculnya isu tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Satu tema ini saja bisa adik-adik mahasiswa jadikan lebih dari satu judul atau pokok pembahasan. Ada yang menulis dari dasar hukumnya, atau bagaimana sanksinya jika PPHN ini tidak dijalankan oleh Presiden, dan banyak yang lainnya. Intinya, kami di MPR sangat terbuka. Silahkan kalian datang dan mengeksplor seputar MPR dan ketatanegaraan,” tandasnya.

Pemaparan materi dari Indro Gutomo ini adalah salah satu bagian dari beberapa rangkaian acara yang diperoleh rombongan delegasi mahasiswa IAIN Cirebon tersebut di MPR RI. Sebelumnya, rombongan delegasi melakukan kunjungan ke Museum DPR RI, Perpustakaan MPR RI, dan sesi terakhir berkeliling gedung Parlemen dan berfoto di berbagai *spot* yang *intragamable* di seputar kompleks Parlemen. □



Sosialisasi di Tanjungpinang

HNW: Empat Pilar MPR Menguatkan Cinta Bangsa dan Negara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, mengingatkan, agar masyarakat Kepulauan Riau dalam memasuki tahun politik, jelang Pemilu 2024, untuk menguatkan pemahaman berkonstitusi guna melanjutkan peran sejarah Riau yang cinta pada bangsa dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, dari Riau (Kepulauan dan Daratan) ada peran sejarah yang fenomenal yang terbukti bisa menghadirkan dan menguatkan Indonesia merdeka. Dia menyebutkan, Kongres Pemuda Indonesia dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menyepakati Bahasa Indonesia yang asalnya bahasa Melayu dari Riau menjadi bahasa Nasional yang menyatukan bangsa Indonesia.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengemukakan hal itu saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR yang

diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan DPW PKS Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (26/6/2023). Sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat Riau itu juga menghadirkan narasumber; Anggota MPR RI yang juga

Presiden PKS, Ahmad Syaikh.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR, apalagi di tahun politik seperti sekarang ini, dimaksudkan agar semua anak bangsa semakin mengenal sejarah, ideologi bangsa, dan cita-cita Indonesia merdeka, agar semua



warga bangsa, apalagi kalangan milenial dan generasi Z, makin cinta pada bangsa dan negara. Persis sebagaimana pepatah mengatakan: Tak kenal maka tak sayang,” papar HNW.

HNW mengaku sangat terkesan dengan animo masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kepulauan Riau itu. “Bukan hari sembarang hari, hari ini luar biasa sekali. Bukan sosialisasi sembarang sosialisasi, sosialisasi di Kepri kini berkesan sekali,” katanya berpantun mengawali penyampaian materi sosialisasi. Berpantun adalah bagian dari tradisi masyarakat Melayu di Riau.

Bagi HNW sangat mengesankan karena Sosialisasi Empat Pilar MPR yang mengambil tempat di Ballroom Hotel CK Tanjungpinang itu berlangsung di hari kerja dan malam hari. Para peserta yang memenuhi Ballroom itu bertahan hingga acara usai, pukul 23.00 WIB. “Pulau Penyengat pulau Bintan, tempat bermula para Raja. Melalui Empat Pilar Kebangsaan, mari kuatkan cinta pada bangsa dan negara,” ujar HNW kembali berpantun.

Menurut HNW, sosialisasi Empat Pilar MPR di Kepri ini mengingatkan peran bersejarah Kepulauan Riau dan Riau Daratan yang menghadirkan dan menguatkan Indonesia merdeka. “Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kepri ini menyegarkan kembali sejarah tentang Riau. Dulu para tokoh Riau berjuang dan berjasa untuk Indonesia merdeka. Ini adalah fakta sejarah yang harus disegarkan,” tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

HNW menyebutkan, Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda pertama dan kedua menyepakati Sumpah Pemuda. Poin ketiga dari Sumpah Pemuda adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. “Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu dari Riau. Kesadaran itu sering dilupakan,” katanya.

HNW menambahkan, pada awal masa Indonesia merdeka, Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Indrapura di Riau menyampaikan kepada Bung Karno bahwa Kerajaannya menyatakan, masuk/bergabung ke dalam Republik Indonesia. Tidak hanya menyatakan bergabung, Sultan Syarif Kasim II memberikan 13 juta gul-

den atau setara Rp 1,3 triliun kepada pemerintah RI.

“Dari Kepulauan Riau dan Riau Daratan kita diingatkan kembali bahwa dari daerah ini ada kontribusi penting melahirkan Indonesia merdeka, dan dengan inspirasi itulah sekarang kita menyosialisasikan lagi Empat Pilar MPR RI agar peran mensejarah itu dapat terus dilanjutkan, apalagi di tahun politik menjelang Pemilu 2024,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Dalam paparannya, HNW menegaskan bahwa sangat penting bagi rakyat untuk memahami konstitusi, yang merupakan bagian penting dari Empat Pilar MPR RI. Memahami konstitusi, katanya, untuk

langsung, umum, bebas dan rahasia. Tidak dikenai intimidasi, manipulasi maupun politik uang yang bisa merusak kedaulatan rakyat, dan bisa berdampak rakyat salah pilih pemimpin maupun wakilnya di DPR,” imbuhnya.

HNW mengatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan dengan UUD. Rakyat memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

memastikan semua proses berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik dan benar.

“Dengan memahami konstitusi, rakyat memiliki kedaulatan mempunyai pemahaman tentang hak-hak konstitusionalnya yang penting dilaksanakan dan tidak dimubazirkan, agar demokrasi dengan Pemilunya dapat menghadirkan hasil yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka,” terangnya.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR diberikan ke semua kalangan supaya rakyat tahu betul UUD mengatur banyak hal baru, termasuk di antaranya membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, dan pemilu diselenggarakan lima tahun sekali. Rakyat dapat berpesta demokrasi melalui pemilu

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Pemilu adalah hak rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Teksnya memilih anggota, bukan sekadar tanda gambar partai saja. Karena itu, rakyat jangan memubazirkan hak untuk memilih yang diberikan konstitusi, agar rakyat bisa memberikan reward bagi yang terbukti bisa melaksanakan amanat rakyat, dan dengan pilihannya rakyat juga bisa melakukan punishment dengan tidak memilih pihak yang telah terbukti gagal mewujudkan kinerja yang baik dan janji-janjinya saat berkampanye. Agar cita-cita proklamasi dan reformasi dapat diwujudkan,” pungkasnya. □

Forum Komunikasi Publik Solo

Siti Fauziah Ajak Mahasiswa Lestarikan Budaya

PELAKSANA Tugas (Plt.) Deputy Administrasi Setjen MPR/Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., mengungkapkan bahwa salah satu upaya untuk mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi adalah dengan meningkatkan pemahaman dan implementasi karakter dan jati diri bangsa.

“MPR sendiri sangat *concern* akan hal itu. Sebab, kita harus menjaga generasi muda jangan sampai terbawa arus negatif,” ujar Ibu Titi, sapaan Siti Fauziah, saat membuka secara resmi Forum Komunikasi Publik (FKP) dalam rangka Sarasehan Kehumasan MPR RI di Ruang Sidoluhur Universitas Islam Batik Surakarta (Uniba) Solo, Jawa Tengah, Jumat (07/07/2023).

Untuk meningkatkan dan menguatkan karakter generasi muda berbagai upaya dilakukan oleh MPR RI. Salah satunya, jelas Bu Titi, adalah menggelar acara FKP ini. Program acara yang diselenggarakan MPR bekerjasama Uniba Solo ini mengusung tema: ‘Peran MPR RI dan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Bangsa.’

Acara FKP di Solo ini dihadiri pula oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR, Indro Gutomo, SH., MH.; Rektor UNIBA, Dr. H. Amir



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Junaidi besera jajarannya; Dr. Pramono Hadi, ketua LP3M.; Serta 100 mahasiswa Uniba Solo sebagai peserta.

Pelestarian budaya, lanjut Ibu Titi, juga salah satu cara untuk menanamkan karakter terhadap anak-anak muda. Ibu Titi memberikan apresiasi kepada Uniba yang memfasilitasi bahkan mendorong aktivitas budaya mahasiswanya, seperti seni tari Jawa dan seni batik.

“Saya berharap, mahasiswa di sini tetap

menjaga kebudayaan. Walaupun tidak dilarang untuk mengenal kebudayaan negara lain sebagai penambah wawasan, tapi saya sangat tekankan, kebudayaan Indonesia jangan dilupakan. Sepakat ya adik-adik? Jadi, kita tidak melupakan kebudayaan bangsa sendiri. Intinya, itulah pendidikan karakter bangsa,” katanya.

Forum Komunikasi Publik dalam rangka Sarasehan Kehumasan MPR RI ini, menurut Ibu Titi, adalah program yang diinisiasi Biro





Humas, Setjen MPR. Sasaran pesertanya adalah para mahasiswa dan civitas academica perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah, ingin lebih mendekatkan MPR kepada mahasiswa, generasi muda Indonesia, dengan *tagline* 'Sahabat Kebangsaan', karena MPR ingin menjadi sahabat dari para mahasiswa.

Sebagai sahabat kebangsaan, sahabatnya mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia, jelas Ibu Titi, tentunya MPR—yang juga sebagai Rumahnya Rakyat—sudah pasti akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk dikunjungi. "Silahkan, dengan mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan, MPR menerima kunjungan rakyat yang ingin serap aspirasi, diskusi, meminta informasi soal MPR dan produk MPR (tempatnya di PPID). Bagi mereka yang ingin berwisata edukasi dan sejarah bisa ke perpustakaan, dan berkeliling ke beberapa spot menarik untuk berfoto," imbuhnya.

MPR, lanjut Ibu Titi, memberikan kemudahan bagi yang ingin mengetahui apa itu MPR dan produknya. MPR juga membuka akses informasi lebih luas lagi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

melalui ranah dunia maya, seperti *Instagram, Twitter, Facebook, web resmi* dan melalui aplikasi Buku Digital MPR yang bisa di-download secara gratis di *playstore android*.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Uniba, Dr. H. Amir Junaidi, memberikan apresiasi besar kepada MPR yang

menyelenggarakan kegiatan luar biasa ini untuk mahasiswa Uniba. "Saya selaku rektor sangat berterima kasih kepada MPR. Mudah-mudahan *kerawuhan* (kehadiran) ibu dan bapak, serta tim dari MPR Jakarta ini, benar-benar merupakan satu hal yang sangat membanggakan buat kami semuanya," kata Amir Junaidi. □

Sarasehan Kehumasan di Bali

Siti Fauziah Ajak Masyarakat Bali Jaga Persatuan di Tahun Politik 2024



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MENDEKATI Tahun Politik 2024, MPR RI semakin gencar melakukan berbagai upaya dengan berbagai sarana dan media untuk mengingatkan bangsa Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat penting, sebab kontestasi politik 2024 nanti akan sarat dengan kompetisi sengit dan panas, terutama pada putaran Pilpres.

Kepala Biro Humas dan Sistem Infomasi, sekaligus Plt. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., mengatakan bahwa jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan yang niat awalnya untuk kebaikan bangsa dan negara malah menjadi sumber penyebab perpecahan antaranak bangsa, karena perbedaan pandangan dan pilihan politik.

Memang Pemilu 2024 dilaksanakan sekitar 8 bulan ke depan, yakni di bulan

Februari 2024, namun suasananya sudah bisa dirasakan mulai saat ini. Kompetisi akan sangat ketat," ujar Siti Fauziah. Oleh karena itu, Siti Fauziah mengajak peserta

sarasehan agar mulai dari sekarang kita semua saling menyadari betapa kita harus menjaga keutuhan dan persatuan negara kita.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“Jangan sampai kita terpecah belah karena hal itu akan merugikan bangsa secara keseluruhan,” ujarnya saat membuka acara Forum Komunikasi Publik (FKP) dalam rangka Sarasehan Kehumasan MPR RI di Gedung Mendopo Kesari, Jembrana, Bali, Senin (03/07/2023).

FKP yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah itu mengusung tema: ‘Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Menjunjung Tinggi Keberagaman, Menegakkan NKRI.’ Ikut hadir Sekretaris Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas Setjen MPR, Indro Gutomo, SH., MH.; Pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, KH. M. Ja’far Shodiq, A.Pdi; Dewan Pembina Relawan Desa Nusantara, M. Surya Nata Putra, Muhamad Yunus; Serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Ibu Titi—sapaan akrab Siti Fauziah—selaku pelaksanaan Sarasehan

Kehumasan MPR menjelaskan, selain bertujuan mengenalkan MPR secara kelembagaan kepada masyarakat, sarasehan ini juga menjadi salah satu upaya MPR untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, agar tetap menjaga kebhinnekaan dan eksistensi bangsa. Jadi, ujar Ibu Titi, tema sarasehan di Bali ini sangat cocok dengan kondisi menjelang tahun politik, 2024.

Satu hal lagi yang penting, tandas Ibu Titi, kegiatan Sarasehan Kehumasan MPR ini juga bertujuan mendekatkan MPR agar menjadi sahabatnya para santri, sahabat masyarakat Bali, dan juga sahabat seluruh rakyat Indonesia. Menjadi sahabat, lanjut Ibu Titi, memiliki makna yang sangat luas, dalam, dan akrab. Sebagai sahabat dekat, MPR akan selalu siap menerima sahabatnya untuk berkunjung atau mengunjungi.

“Sebagai sahabat, MPR membuka pintu selebar-lebarnya jika ada masyarakat Bali yang ingin berkunjung, berdiskusi, menyampaikan aspirasi terkait MPR dan produk-produknya. Di MPR ada berbagai

saluran informasi yang bisa disambangi, seperti PPID, Perpustakaan MPR. Tentunya, dengan mematuhi prosedur yang sudah ada, MPR akan siap memberikan akses kepada masyarakat, termasuk keinginan berkunjung dengan tujuan hanya untuk menikmati pemandangan gedung bersejarah ini juga dipersilahkan.

Ibu Titi menceritakan, MPR sudah banyak menerima kunjungan wisata pendidikan, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Jika, masyarakat tidak bisa berkunjung, lanjut Ibu Titi, MPR membuka akses informasi di berbagai platform resmi media sosial MPR, seperti www.mpr.go.id, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*. Semuanya bisa diakses dengan mudah melalui smartphone.

Dan, ada satu lagi, yakni aplikasi Buku Digital MPR, yang berisi semua hal tentang MPR dan semua produknya. “Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis di *playstore_android*,” ujarnya. □

Forum Komunikasi Publik Solo

Indro Gutomo Ingatkan Pentingnya Kiprah Mahasiswa di Setiap Era

SEBAGAI negara besar, Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, sejak era perjuangan melawan penjajah, kemerdekaan, hingga era reformasi hingga saat ini. Dari perjalanan panjang tersebut, ternyata terdapat satu kesamaan, yakni adanya peran mahasiswa dalam menentukan proses perubahan.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Indro Gutomo, SH., MH., mengatakan bahwa mahasiswa saat ini harus memahami dan memiliki rasa bangga terhadap perannya. "Mahasiswa saat ini memiliki kesempatan untuk berperan di era kekinian, yakni di era Indonesia Emas 2045, Dan, di pundak adik-adik mahasiswalah Indonesia Emas 2045 ditentukan. Di saat itulah, adik-adik sudah berada di usia produktif mengisi pembangunan Indonesia," ujar Indro, saat menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Kehumasan MPR RI di Ruang Sidoluhur Universitas Islam Batik Surakarta (Uniba) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (07/07/2023).

Lebih jauh, Indro mengungkapkan, jika melihat perjalanan sejarah, setiap perubahan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bangsa ini memang selalu ditentukan oleh pergerakan mahasiswa. Indro memaparkan beberapa contoh. Di tahun 1908, misalnya, muncul Pergerakan Kebangkitan Nasional Budi Oetomo yang dipelopori oleh para mahasiswa kedokteran STOVIA. Mereka, para mahasiswa, sadar bahwa Indonesia seharusnya sudah mulai berpikir untuk tidak bergantung pada bangsa lain. Meski pergerakan mereka masih terbatas di pulau Jawa saja, tapi ini awal yang sangat

menentukan untuk pergerakan mahasiswa selanjutnya.

Kemudian, kata Indro lebih lanjut, di tahun 1920 ada Perhimpunan Indonesia, dan ini sekali lagi mahasiswa yang bergerak. Adalah Muhammad Hatta yang menjadi pelopor saat itu. Bahkan, tahun 20 di saat kita masih dijajah Belanda, mereka itu menyatakan sikap kemerdekaan Indonesia, dimuat dalam majalah dan surat kabar yang ada saat itu. Bahkan, nama majalahnya pun





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sangat memprovokasi Belanda, yakni: 'Indonesia Merdeka.'

"Nah, pergerakan-pergerakan ini makin meluas di tahun 1928. Ada Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes yang semuanya menyatu, menyelenggarakan kongres. Peristiwa itu dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Kemudian, tahun 1945 saat Jepang menyerah kepada sekutu, pemuda ingin sesegera mungkin diproklamlirkan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pun bergerak "menculik" dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Akhirnya, di pengasingan itu Bung Karno sepakat untuk memproklamlirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus pagi. "Itu terjadi, sekali lagi atas desakan pemuda," papar Indro.

Setelah itu, lanjut Indro, masuklah masa Orde Lama. Pemerintah Orde-pun akhirnya dikritisi oleh mahasiswa juga. Dengan Tritura (tiga tuntutan rakyat), para mahasiswa menuntut agar PKI dibubarkan, kemudian bubarkan kabinet dwikora, dan turunkan harga pangan.

Setelah era Orde Lama berakhir, selanjutnya yang berkuasa adalah pemerintahan

Orde Baru. Di bawah pemerintah Presiden Soeharto, Orde Baru memegang kekuasaan selama sekitar 32 tahun. Tapi, sekali lagi, melalui gerakan mahasiswa pada tahun 1978, menyebabkan Presiden Soeharto harus lengser, dan sejak itu hingga sekarang bangsa Indonesia memasuki gerbang era reformasi.

Titik tekannya, tegas Indro, pemuda di setiap masa selalu berhasil membuat perubahan. Kenapa berhasil? Karena, pergerakannya itu masih murni, belum terafiliasi oleh kepentingan apapun. Semua yang dirasakan disampaikan, pergerakannya masih berdasarkan karakter bangsa yang kuat. Karakter yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, mereka bergerak berdasar semangat persatuan, jiwa nasionalisme, semangat membangun bangsa, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Namun, sejak 1998 sampai sekarang, banyak yang mengatakan bahwa nilai-nilai karakter generasi muda dianggap mulai pudar. Banyak hal penyebabnya, salah satu yang besar pengaruhnya adalah karena teknologi informasi, zaman mulai modern, narkoba, pergaulan bebas,

sifat individualistik yang sangat kental. "Inilah pentingnya upaya penyegaran kembali karakter dan jatidiri generasi muda," katanya.

Oleh karenanya, kata Indro, MPR sangat peduli akan hal itu. Sehingga, MPR berusaha mendengungkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, yang kemudian dikenal sebagai Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, menurut Indro, dilakukan dengan banyak metoda, antara lain: seminar, FGD, lomba cerdas cermat untuk anak SMA, Lomba pidato untuk mahasiswa, Lomba Legal Drafting untuk mahasiswa, dan lainnya. Semua metoda itu dilakukan untuk menyebarluaskan nilai-nilai luhur bangsa ini dengan tujuan meningkatkan pendidikan karakter bangsa.

Acara diskusi dipandu moderator dosen Uniba, Agung Mugi Widodo, berlangsung lancar. Turut hadir Deputy Administrasi/Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Siti Fauziah, SE., MM., Rektor Uniba Dr. H. Amir Junaidi, dan Dr. Pramono Hadi, serta mahasiswa Uniba Solo sebagai peserta. □



Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.

Wakil Ketua MPR RI

Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi

KONSOLIDASI demokrasi merupakan bagian integral dari ikhtiar mewujudkan Indonesia yang demokratis. Proses ini berjalan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama sejak tahap inisiasi demokrasi dijalankan pada 1999 yang lalu atau setahun pasca meletusnya gerakan reformasi. Harus diakui, masih ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terhadap proses yang berjalan, baik secara struktural maupun kultural politik. Namun upaya-upaya demokratisasi juga tak kalah masif dilakukan oleh segenap elemen bangsa, baik oleh pemerintah, legislatif, yudikatif, maupun unsur-unsur masyarakat yang pro-demokrasi. Pemilu 2024 yang akan berlangsung tak lama lagi, selain diharapkan menjadi pesta demokrasi bagi rakyat, juga diharapkan menjadi momentum penguatan konsolidasi demokrasi yang saat ini sedang bergulir.

Tahap demokrasi

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), objektif yang hendak dicapai oleh pemerintah dari demokratisasi yang saat ini berjalan adalah terwujudnya demokrasi matang pada 2029. Untuk mewujudkan target tersebut ada pembabakan yang harus dilalui, terhitung sejak 1999 atau Pemilu pasca reformasi pertama kali. Pembabakan ini mencakupi tahap inisiasi, instalasi, konsolidasi demokrasi, hingga tercapainya objektif demokrasi matang. Ada satu hal yang menarik untuk dicermati dari setiap pembabakan tersebut, yakni eksistensi Pemilu sebagai elemen kunci demokratisasi.

Tahap inisiasi dimulai ketika diselenggarakan Pemilu 1999 yang dianggap sebagai Pemilu pertama pasca reformasi. Tahap instalasi berjalan melalui penyelenggaraan Pilpres secara langsung pertama kalinya oleh rakyat pada 2004 yang berlanjut hingga saat ini.

Bagaimana Pemilu bisa menempati posisi vital dalam tahapan demokratisasi tersebut? Pertanyaan

ini cukup krusial untuk dijawab. Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi yang memainkan peran sebagai alat sirkulasi elit dan

kepemimpinan, sekaligus medium aktualisasi hak dan kewajiban politik seluruh warga negara. Dalam gerak laju pelaksanaan Pemilu, apa yang menjadi prinsip universal demokrasi menemukan momentum aktualisasinya; daulat rakyat, hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta musyawarah mufakat. Pada tahap inisiasi yang dimulai tahun 1999, Pemilu secara bertahap memasuki periode pelaksanaan substansial, tidak sekedar prosedural dan seremonial belaka. Muncul banyak partai politik yang berpartisipasi yang linear dengan banyaknya figur yang dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Visi misi dan program kerja para calon juga merepresentasikan ideologi partai politik yang mengusung, serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada masa itu. Yang tak kalah penting adalah dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 1999 untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara demokratis.

Esensi Pemilu pada tahap inisiasi tersebut ada dua; perbaikan Pemilu secara struktural dan kelembagaan politik, serta munculnya komitmen penyelenggaraan secara sistematis dan demokratis. Situasi dan kondisi sedemikian tidak kita temukan di era sebelumnya yang penuh tekanan dan manipulasi politik demi kepentingan rezim yang berkuasa. Pemilu alih-alih menjadi ajang sirkulasi elit, melainkan sarana untuk menciptakan stagnasi kepemimpinan pada satu nama dan satu rezim.

Esensialisme Pemilu mengalami penguatan pada tahap instalasi ketika Pilpres langsung digelar pertama kali pada 2004. Progresivitas ini tercermin dari meningkatnya jumlah partai politik yang berpartisipasi, keberagaman ideologi yang diusung, partisipasi politik masyarakat yang meningkat, adanya aktivitas formulasi regulasi untuk Pemilu di legislatif, munculnya mekanisme pengkubuan politik untuk kandidat calon presiden (baca: koalisi) yang menjadi warna baru dalam sistem presidensial, munculnya lembaga riset dan survei Pemilu, hingga

menjamurnya masyarakat sipil sebagai mekanisme penyeimbang pemerintah. Pada tahap ini, Pemilu benar-benar menjadi instrumen bagi penguatan demokrasi secara struktural dan kelembagaan.

Tantangan konsolidasi demokrasi

Sirkumstansi yang ada pada tahap konsolidasi demokrasi tentu berbeda dengan dua tahapan sebelumnya. Pada tahap konsolidasi demokrasi, muncul berbagai kompleksitas yang hadir sebagai konsekuensi dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Tahapan ini juga diproyeksi akan berlangsung panjang, yakni sejak 2014 hingga 2029 atau membutuhkan waktu sedikitnya 15 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa proses pada konsolidasi demokrasi berjalan tidak mudah dan memiliki hambatan yang tidak sedikit? Hal ini dapat dijawab dari definisi yang melekat pada konsolidasi demokrasi itu sendiri.

Larry Diamond dalam bukunya yang berjudul *Developing Democracy toward Consolidation* (1999) menyatakan, konsolidasi demokrasi sebagai upaya untuk memelihara stabilitas dan persistensi demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai rekognisi dan legitimasi secara kuat dari seluruh aktor politik, baik di tingkat elit maupun akar rumput, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik yang paling tepat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan merujuk pada pemahaman tersebut, konsolidasi akan berjalan mulus apabila ada komitmen, konsistensi, dan kesinambungan proses yang diyakini dan dimiliki oleh seluruh aktor politik yang ada. Ini tentu tidak mudah karena politik secara logika lebih sering dimaknai sebagai seni kepentingan dan kekuasaan, alih-alih untuk kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Ada banyak potret sederhana bagaimana konsolidasi demokrasi kerap tersendat pelaksanaannya. Otonomi daerah ternyata belum seratus persen menyejahterakan rakyat, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang sering tersandung kasus korupsi, birokrasi masih gemuk dan lamban dalam melayani masyarakat, serta masyarakat sendiri yang terjerat dengan apatisisme politik yang ditunjukkan oleh masih banyaknya golput dalam setiap perhelatan Pemilu. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Ada indikator kuantitatif untuk melihat dampak nyata demokrasi dalam bentuk kualitas pembangunan manusia, persepsi korupsi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan, daya saing global, dan masih banyak lagi. Kondisi hari ini, semua indikator tersebut masih

dalam kategori butuh penguatan dan improvisasi agar lebih optimal. Dalam studi yang dilakukan oleh Lemhannas RI mengenai konsolidasi demokrasi, ada 4 rumpun permasalahan utama dari proses yang sedang berjalan, yakni budaya politik, regulasi atau peraturan perundang-undangan, kapasitas kelembagaan, serta adaptasi teknologi.

Pemilu 2024 sebagai momentum Pemilu 2024 sudah di depan mata. Tahun 2024 akan menjadi Pemilu keenam di era pasca reformasi atau Pemilu kelima yang dijalankan secara langsung dengan rakyat sebagai direct voters. Pemilu 2024 diharapkan sekaligus diproyeksikan sebagai momentum untuk menuntaskan transisi demokrasi Indonesia menuju demokrasi matang di seluruh lapisan struktur politik nasional. Proyeksi ini tidak bersifat mutlak, namun arah keberhasilannya cukup menjanjikan. Gelaran Pilpres sebelumnya, khususnya Pilpres 2014 dan 2019, menjadi lesson learned bagi para penyelenggara Pemilu untuk lebih menguatkan kapasitasnya, baik dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Partai politik sebagai pilar demokrasi juga berkomitmen untuk menyuguhkan kompetisi yang lebih bergairah dengan menyuguhkan banyak pilihan dan calon dalam bursa capres cawapres, sekaligus kandidat legislatif yang tidak hanya populer dan memiliki elektabilitas, tapi juga berkapasitas dalam menerjemahkan apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga semakin teredukasi secara politik untuk melaksanakan hak politiknya dalam Pemilu yang diharapkan akan berkorelasi dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

Selain peluang-peluang penguatan konsolidasi demokrasi di atas, ada juga ancaman-ancaman yang harus dicermati. Ada banyak pakem Pemilu yang berjalan, namun dalam kondisi diperdebatkan, yakni persoalan ambang batas pencalonan presiden, rezim keserentakan, termasuk isu proporsional tertutup dan terbuka yang saat ini masih dalam proses di MK. Persoalan-persoalan tersebut selayaknya ditimbang dalam kaca mata konstitusi dan demokrasi agar pilihan-pilihan keputusan yang diambil tidak mencederai konsolidasi demokrasi yang telah berjalan. Peletakan konstitusi sebagai dasar keputusan merupakan hal wajib yang harus dilakukan agar pilihan keputusan yang diambil bersifat konstitusional dan memiliki fondasi hukum yang kuat. Sedangkan dalam kaca mata demokrasi, persoalan yang ada diharapkan tidak menabrak prinsip-prinsip yang berlaku, utamanya daulat rakyat sebagai esensi utama demokrasi. Kita semua berharap, Pemilu 2024 akan menjadi momentum yang pas bagi konsolidasi demokrasi menuju demokrasi yang paripurna; negara demokratis sesuai amanat reformasi. □

Terima Mahasiswa IAIN Cirebon

Indro Gutomo: Banyak Pengetahuan Bisa Digali di MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKITAR 100 mahasiswa lintas semester Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon bersama beberapa dosen pendamping, mengunjungi Gedung MPR RI, pada hari Senin (12/6/2023).

Rombongan delegasi diterima di Ruang GBHN Lantai III, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Indro Gutomo, SH., MH., didampingi Kasubbag Hubungan Antarlembaga Biro Humas, Setjen MPR, Yenita Revi, SE.

Mewakili delegasi mahasiswa, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jefik Zulfikar Hafidz, dalam sambutannya, memberikan apresiasi yang tinggi kepada MPR, terutama Biro Humas Setjen MPR, yang sangat hangat menyambut kedatangan para mahasiswa.

"Kegiatan ini adalah Kunjungan Edukasi yang telah lama berlangsung dan menjadi agenda rutin kampus setiap tahun, dengan menyambangi beberapa tempat yang dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan ketatanegaraan bagi mahasiswa, seperti kunjungan ke gedung MPR ini. Tujuan besar pihak kampus, adalah untuk mendukung mahasiswa memperoleh pengalaman sekaligus wawasan baru seputar tempat yang kami kunjungi," ujarnya.

Merespon hal tersebut, Indro Gutomo menyampaikan bahwa sebagai Rumah Bangsa, rumah besarnya seluruh rakyat Indonesia, MPR dengan keleluasaan hati menyambut kedatangan

masyarakat dari berbagai lapisan. "Pintu MPR terbuka luas untuk seluruh masyarakat Indonesia, siapapun itu," tambahnya.

Kepada para mahasiswa, Indro Gutomo mengungkapkan bahwa di MPR begitu banyak hal terkait pengetahuan seputar ketatanegaraan Indonesia yang bisa digali untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Bahkan, segala persoalan tentang tata negara dikaji di MPR atau tepatnya di Badan Pengkajian MPR yang merupakan salah satu alat kelengkapan MPR.

Di Badan Pengkajian MPR banyak sekali kajian yang bisa dipelajari oleh mahasiswa dan malah bisa dijadikan bahan atau materi untuk menyelesaikan skripsi. Contohnya, munculnya isu tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Satu tema ini saja, bisa adik-adik mahasiswa jadikan lebih dari satu judul atau pokok pembahasan. Ada yang menulis dari dasar hukumnya, atau bagaimana sanksinya jika PPHN ini tidak dijalankan oleh Presiden, dan banyak yang lainnya. Intinya, kami di MPR sangat terbuka. Silahkan kalian datang dan mengeksplor seputar MPR dan ketatanegaraan," tandasnya.

Pemaparan materi dari Indro Gutomo ini merupakan salah satu bagian dari beberapa rangkaian acara yang diperoleh rombongan delegasi mahasiswa IAIN Cirebon tersebut di MPR RI. Sebelumnya, rombongan delegasi melakukan kunjungan ke Museum DPR RI, Perpustakaan MPR RI, dan sesi terakhir berkeliling gedung Parlemen dan berfoto di berbagai spot yang instagrameable di seputar kompleks Parlemen. □

DER

Lawatan Obor Paskah Nasional Ke-19 dan Silaturahmi Kebangsaan di Gedung MPR

KETUA MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA., atau Bamsuet mengingatkan seluruh pemeluk agama di Indonesia untuk selalu menjaga dan merawat harmonisasi kehidupan beragama di tanah air. Hal itu sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan.

Sebab, lanjut Bamsuet, Indonesia adalah negara besar yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang luar biasa. Sekitar 6 agama dan 20 aliran kepercayaan dianut lebih dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Sehingga harmonisasi antarpemeluk agama menjadi sebuah keniscayaan.

“Kita semua harus bersyukur, sampai saat ini hubungan baik dan

kegotongroyongan, semangat permusyawaratan, dan semangat toleransi yang sangat tinggi.

“Kita patut bersyukur, para founding fathers bangsa telah mewariskan kepada kita nilai-nilai Pancasila yang tidak dimiliki negara lain. Dengan itu, harmonisasi antaranak bangsa semakin kuat mengikat dan tidak bisa diruntuhkan. Sementara itu, ada beberapa negara yang tidak memiliki Pancasila, seperti negara-negara di wilayah Timur Tengah yang tidak seberagam dan sekompleks Indonesia, bisa pecah dan terjadi perang saudara yang sangat menyengsarakan rakyatnya,” terang dia.

Intinya, lanjut Bamsuet, nilai-nilai luhur Pancasila terbukti mampu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

suasana damai serta saling menghargai itu telah terjalin dengan baik. Kita hanya perlu menjaga, merawat, dan meningkatkannya saja,” ujar Bamsuet, dalam sambutannya, saat menghadiri gelar acara ‘Lawatan Obor Paskah Nasional ke-19 dan Silaturahmi Kebangsaan’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dan istri Hana Hasanah, Ketua Lembaga Paskah Nasional A. Shepard Supit, dan Panitia Paskah Nasional, serta umat Kristiani sebagai peserta.

Lebih jauh, Ketua MPR dari Partai Golkar ini mengingatkan, jika dalam harmonisasi antarumat beragama tersebut masih ada persoalan antarpemeluk agama, seperti persoalan pendirian Gereja, Masjid, Kelenteng, Wihara, dan lainnya yang masih ditemui, itu hanya riak-riak kecil yang bisa segera diselesaikan dengan penerapan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yakni, dengan semangat

mengikat rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, bahasa, dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekuatan besar itu, harus juga diimplementasikan dalam menghadapi tahun politik 2024.

“Tahun politik 2024 harus disikapi dan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab, jika kita lalai maka ajang kompetisi lima tahunan itu bisa berpotensi menjadi salah satu sumber keretakan bangsa kita,” tandasnya.

Di sesi akhir, Bamsuet mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 dengan riang gembira, dengan semangat kebersamaan, dan memegang teguh Pancasila. Dengan itu, diharapkan pesta demokrasi berlangsung lancar serta sukses. Sehingga, pada akhirnya, Indonesia bisa menyongsong masa depan yang cerah. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Guspardi Gaus, Anggota MPR Fraksi PAN

Jangan Ada Satu pun Warga Negara yang Punya Hak Pilih Terabaikan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024, yaitu sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari jumlah itu, pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang. Penetapan DPT Pemilu 2024 diputuskan KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Ahad, 2 Juli 2023.

Saat membacakan hasil keputusan DPT Pemilu 2024, Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos juga menyebutkan, DPT itu berdasarkan total rekapitulasi nasional pemilih dalam dan luar negeri yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 128 negara perwakilan. Betty merinci, sebanyak 203.056.748 pemilih berada di dalam negeri, dan sebanyak 1.750.474 pemilih berada di luar negeri.

KPU juga telah menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memfasilitasi para pemilih, baik di dalam dan di luar negeri. Jumlah TPS yang disediakan sebanyak 823.220. Dari jumlah

itu, sebanyak 820.161 TPS di dalam negeri, dan 3.059 TPS (termasuk TPSLN, KSK, dan Pos) untuk memfasilitasi pemilih di luar negeri.

Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 secara serentak. Pada hari itu, pemilih diberikan lima surat suara sekaligus di TPS, di antaranya surat suara calon presiden-wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota DPD.

DPT selalu menjadi masalah klasik dalam setiap Pemilu. Pasalnya, sering ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam DPT. Misalnya, Partai Buruh melihat kejanggalan dalam jumlah DPT luar negeri. Jika mengacu pada data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah pekerja migran yang resmi mencapai 4,6 juta orang. Tetapi KPU hanya mengumumkan 1,7 juta orang yang masuk DPT. Padahal mayoritas pekerja migran memiliki hak pilih karena rata-rata pekerja migran sudah berusia di atas 17 tahun.

Anggota MPR dari Fraksi PAN,

Guspardi Gaus, pun memberi komentar atas pengumuman DPT untuk Pemilu 2024 tersebut. Berikut penuturan anggota Komisi II DPR RI. Petikannya.

KPU telah menetapkan DPT untuk Pemilu 2024. Sesuai DPT yang ditetapkan KPU, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari jumlah itu sebanyak 203.056.748 pemilih berada di dalam negeri dan sebanyak 1.750.474 pemilih berada di luar negeri. Apa tanggapan Bapak?

Kita memberikan apresiasi kepada KPU yang sudah melaksanakan tugasnya dalam rangka penataan terhadap DPT. KPU telah sukses menetapkan DPT berdasarkan jadwal yang diputuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun aturan PKPU sendiri. Sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah digariskan antara Komisi II bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu, alhamdulillah tahapan itu tetap *on the track*. Tahapan-tahapan Pemilu 2024 itu dikonsultasikan ke DPR. Dan, DPR sudah melakukan

kajian, diskusi, dan akhirnya menyepakati tahapan-tahapan Pemilu 2024 itu.

Sekarang ini, tahapan-tahapan Pemilu itu sudah dilalui, dan alhamdulillah tidak ada satu pun tahapan-tahapan yang melenceng dari harapan dan keinginan kita semua. Tentu sebagai anggota Komisi II DPR, saya berharap dan meminta kepada KPU untuk tetap konsisten dan memegang komitmen dalam menyikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan Pemilu yang demokratis, akuntabel, transparan, jujur, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Ada beberapa pihak yang melihat masih adanya kejanggalan-kejanggalan dalam DPT. Misalnya, Partai Buruh yang menilai kejanggalan jumlah DPT luar negeri sebanyak 1,7 juta orang, padahal jumlah pekerja migran sebanyak 4,6 juta orang. Sebelumnya, Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menemukan 52 juta data aneh pada saat KPU mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum menjadi DPT, yaitu ada pemilih berumur 100 tahun, pemilih berumur kurang dari 12 tahun, pemilih memiliki identitas yang sama, pemilih memiliki RT 0, pemilih memiliki RW 0. Apa pendapat Bapak?

Memang ada masukan-masukan dari publik kepada KPU, maka saya berharap KPU untuk selalu menerima informasi-informasi dan masukan berkaitan dengan DPT. Bagaimanapun pelaksanaan Pemilu 2024 ke depan adalah pemilu yang demokratis. Kita berharap, jika ada masukan dan saran terhadap pelaksanaan Pemilu seperti misalkan ada gonjang ganjing tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka masukan dari Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat tentu menjadi bagian yang harus dilakukan pemahaman dan dilakukan kajian.

Misalnya, apakah jumlah pemilih itu tidak akurat, kemudian ada orang yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum punya KTP, ada seseorang ataupun kelompok yang tidak memiliki KTP tetapi sudah punya hak pilih sesuai dengan syarat-syarat sebagai pemilih. Begitu juga sebaliknya, manakala ada orang yang sebetulnya sudah meninggal, atau dia sudah tidak berhak lagi sebagai pemilih karena berstatus sebagai

TNI – Polri.

Saya juga sudah mengkritisi dan menyampaikan ke publik setelah KPU mengumumkan DPT secara resmi. Sebagaimana juga saya sudah sampaikan bahwa jumlah pemilih itu sangat dinamis. Misalnya, pada hari ini seseorang belum memiliki hak pilih karena usianya di bawah 17 tahun, mungkin besok umurnya sudah 17 tahun. Begitu juga, orang yang di bawah umur 17 tahun itu, tadinya dia belum menikah, pada pelaksanaan Pemilu 2024 sudah menikah. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang berhak memilih menurut ketentuan yang berlaku. Begitu juga TNI-Polri. Mungkin pada hari ini masih aktif sebagai TNI-Polri. Tetapi, besok mungkin dia pensiun.

Apa yang harus dilakukan KPU?



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KPU harus melakukan update data secara terus-menerus. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada KPU untuk selalu melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan koordinasi dengan pihak Dukcapil di Kemendagri untuk update data itu secara terus-menerus, karena pemilih ini bersifat dinamis. Artinya, untuk akurasi dari DPT ini harus dilakukan update data secara terus-menerus. Karena bagaimana pun, DPT itu sangat dinamis. Tentu KPU harus berkonsultasi dengan Dirjen Dukcapil, sebagai instansi yang menginput data DPT itu.

Jadi, KPU sudah menyebutkan jumlah pemilih yang masuk menjadi DPT. Tetapi jumlah pemilih itu bukanlah jumlah yang tetap, jumlahnya bisa berlebih, bisa juga berkurang. Sebab, mungkin besok banyak orang yang meninggal, dan sebagainya. Oleh karena itu,

KPU harus membuka diri terhadap update yang disampaikan masyarakat, dan juga Bawaslu.

Kita berharap jumlah pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan hak-hak yang digariskan oleh UU. Jangan ada satu pun, orang yang mempunyai hak pilih terabaikan karena update data yang kurang sempurna dan sebagainya. Intinya adalah jangan ada satu pun warga negara yang sudah mempunyai hak pilih diabaikan. Jadi, hak masyarakat (pemilih) itu jangan sampai dikebiri, apalagi dihilangkan dari DPT.

KPU menyebut generasi milenial mendominasi pemilih pada Pemilu 2024 dengan jumlah 68.822.389 orang atau 33,6% dari total DPT. Apa harapan Bapak?

Saya mengimbau agar kaum milenial untuk

tidak melakukan golput atau menyia-nyiaikan hak suara mereka dalam pemilu mendatang. Kaum milenial memiliki peran penting dalam Pemilu 2024. Jangan Golput. Kita berharap para milenial ini menjadi orang-orang yang berada di garis depan untuk mengimbau semua elemen masyarakat yang memiliki hak pilih agar berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Mereka harus mengimbau, mengajak, dan melakukan sosialisasi karena mereka adalah pemilih cerdas. Mereka pasti memahami hak dan kewajiban serta memikirkan masa depan. Oleh karena itu, momen yang hanya datang setiap lima tahun ini tidak boleh disia-siakan. Apapun yang terjadi, hal ini akan mengubah pemimpin di masa depan. Semua pihak agar terus mengampanyekan dan mendorong pemilih milenial untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024. □

Penyanyi Indonesia Bikin Heboh Dunia

ARIANI Nisma Putri atau dikenal **Putri Ariani** tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Setelah berhasil meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell, salah satu juri killer, dalam lomba ajang pencarian bakat bergensi, *American Got Talent 2023*, membuat nama Putri Ariani “mengguncang” jagad musik dunia. Dia menjadi trending topic nomor 1 di lebih dari 30 negara.

Di dalam negeri tak kalah hebohnya. Para pejabat, pengusaha hiburan, pegiat *intertainment*, para musisi ramai-ramai mengundang musisi remaja kelahiran Bangkinang, Riau, 31 Desember 2005 ini. Setelah sebelumnya bertemu Presiden Jokowi di Istana, dan juga Sri Sultan Hamenku Buwono X di Yogya, Rabu (28/06/2023), Putri menjadi tamu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

“Apa yang saya capai ini tidak mudah. Sejak 2018, saya mencoba apply di AGT tapi tidak ada respon dari pihak penyelenggara. Alhamdulillah, baru tahun 2023 ini saya mendapatkan undangan untuk bisa tampil,” cerita musisi muda dan pencipta lagu *Loneliness* saat bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo, di ruang kerjanya, di Kompleks MPR, Jakarta. □

DER



Putri Ariani

Belanja Produk Daerah Udah Tren loh...

ANNEU Anggraini Putri, puteri Indonesia asal Provinsi Gorontalo Tahun 2023 terlihat hadir di acara Discover Gorontalo di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Bersama koleganya Putri Indonesia asal Sumatera Utara, Tabitha Christabela Napitupulu, dia berkeliling arena promosi pariwisata dan ekonomi kreatif itu.

Gadis kelahiran 1 April 1997 yang saat ini berprofesi sebagai model profesional di Jakarta ini sempat belanja produk daerah asanyal, Gorontalo, yang dipamerkan dan dijual di sana. "Produk daerah gak kalah koq dengan produk luar. Malah menjadi tren menggunakan produk daerah," ujarnya seraya bercerita tentang keunikan dan keindahan kampung halamannya, di Gorontalo.

Sebagai duta pariwisata daerah, Anneu bangga ketika teman-temannya tanya tentang pariwisata di Gorontalo. "Saya kasih tau soal hiu paus. Mereka kayak, oh iya, emang bisa sedekat itu yah sama hiunya? Terus saya bawa oleh-oleh juga, contohnya kayak anting limbah laut yang saya pakai ini. Mereka juga pakai sejak audisi terus kayak excited gitu," jelas Anneu bangga. □

DER



Anneu Anggraini Putri



Band Dewa 19

Dinobatkan Sebagai Ambasador Pariwisata Gili

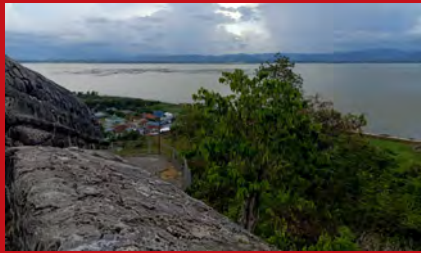
SIAPA yang tidak kenal band legend yang sampai sekarang masih eksis di panggung musik tanah air. Dewa 19, band yang dibentuk dan dikomandani musisi **Ahmad Dhani**. Sejak berdiri tahun 1986 sampai sekarang Dewa 19 telah melahirkan 8 album studio dengan formasi anggota sempat berganti. Lagu 'Kangen' adalah masterpiece single Dewa 19, selain banyak hit lain yang digandrungi fans dan masyarakat Indonesia.

Bulan Juni 2023, Dewa 19 viral bukan karena keluarnya album baru atau gosip dari para personilnya, tapi grup ini dinobatkan oleh Pemrov NTB sebagai Ambasador Pariwisata Gili Tramenas. Acara pelantikan yang dihadiri Gubernur NTB, berlangsung di ruang tamu Gubernur NTB pada 30 Juni 2023.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kontribusi luar biasa yang telah diberikan oleh Dewa 19 dalam menghasilkan karya-karya musik yang mampu menginspirasi banyak generasi, dan juga atas perannya dalam mempromosikan keindahan dan pesona pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Lombok.

"Terima kasih untuk penobatannya, mudah-mudahan kami bisa ikut berperan memajukan wisata di Gili," ujar Ahmad Dhani. □

DER



Benteng Otanaha

Saksi Perlawanan Masyarakat Terhadap Portugis

PROVINSI Gorontalo diberkahi oleh Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, dengan sumberdaya alam yang melimpah. Bukit, lembah, danau, dan laut yang ada di Gorontalo, beserta potensi pertanian yang dimilikinya, ibarat lukisan alam nan elok. Keindahan bumi Gorontalo ini menjadi suguhan yang bisa disaksikan dari ketinggian, baik sesaat sebelum *landing* maupun setelah *take-off* dari Bandar Udara Jalaluddin.

Selain dari atas langit, keindahan alam provinsi berjuluk: “Serambi Madinah,” itu juga bisa dinikmati dari Kawasan Benteng Otanaha, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dari tempat ini, Kota Gorontalo terlihat terus berbenah. Kota yang belum semaju kebanyakan kota besar di Pulau Jawa ini dikitari hamparan bukit dan lembah. Sejauh mata memandang tampak hamparan tanaman jagung yang tumbuh dengan subur.

Dari Benteng Otanaha, ketenangan Danau Limboto yang menjadi bagian dari Kota dan Kabupaten Gorontalo juga terlihat dengan jelas. Pemandangan tersebut satu-satunya di Indonesia, dan tidak ada di tempat lain. Air di danau itu bergerak dengan pelan, seolah

mengikuti desau angin yang bertiup mendayu. Hampir seluruh areal danau bisa terlihat, tak terkecuali rumah makan terapung yang ada di tengah Limboto. Juga ribuan pancang bambu yang berfungsi sebagai penopang keramba jaring. Sesekali tampak juga kawanan burung bangau berwarna putih bersih melintas, lalu menukik ke



permukaan danau mencari mangsa.

Benteng Otanaha sendiri merupakan tempat wisata yang layak dikunjungi. Ia adalah salah satu kawasan wisata sejarah yang ada di Gorontalo. Karena Otanaha merupakan saksi bisu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis. Benteng ini berjarak sekitar 8 km dari pusat Kota Gorontalo, di tepi Danau

Limboto, dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit.

Selain Otanaha sebagai benteng utama, ada dua benteng lainnya di lokasi ini, yaitu Otahiya dan Ulupahu. Terdapat hampir 500 anak tangga harus dilalui untuk bisa tiba Otanaha. Karena medannya menuntut adrenalin maka butuh stamina yang baik, dan juga keberanian yang tanggung-tanggung. Tapi, jangan khawatir, di tengah perjalanan ada juga tempat untuk rehat.

Tetapi, pengunjung juga bisa mencapai tempat tertinggi tanpa harus bersusah payah melewati tangga. Syaratnya pengunjung harus naik kendaraan pribadi, lalu turun di tempat parkir, melalui jalan sedikit menanjak, wisatawan segera tiba di tempat yang diinginkan. Perlu diketahui untuk bisa masuk kawasan benteng, setiap pengunjung dikenakan bea masuk sebesar Rp 5.000, sedangkan parkir motor / mobil Rp. 2000 / Rp. 5000.

Sebagai lokasi wisata, Otanaha menawarkan suasana yang damai, cocok menjadi alternatif tempat piknik juga pertemuan keluarga. Tempat ini bisa digunakan untuk melakukan gathering, baik keluarga, reunion, hingga rombongan



karyawan perusahaan. Apalagi Otanaha juga memiliki spot-spot foto yang menawan. Baik berlatar belakang danau, perbukitan hingga eksotisme alam. Bahkan. Otanaha juga sangat layak bagi pasangan yang hendak mengambil foto *prewedding*, dengan berbagai gaya beserta eksotisme alamnya.

Pesona Otanaha

Pada tanggal merah dan libur akhir pekan, menurut salah seorang penjaga benteng, tempat tersebut cukup banyak dikunjungi wisatawan. Terkadang, pengunjung yang datang merupakan rombongan dari sekolah, karyawan, atau kelompok masyarakat tertentu. Pemandangan tersebut juga sempat ditemui Majalah *Majelis* saat berkesempatan mengunjungi Benteng Otanaha beberapa waktu lalu.

Saat itu ada dua mobil berisi ibu-ibu mengenakan seragam merah putih, yang hendak meninggalkan lokasi benteng. Tetapi, keberangkatan mereka tertunda lantaran beberapa anggotanya masih asyik dengan *gadget*-nya. Mereka terlihat belum puas untuk mengabadikan kunjungannya di Otanaha. Namun, suasana itu tak berlangsung lama, setelah mayoritas rombongan menyoraki untuk segera masuk ke mobil, dan mereka pun melanjutkan perjalanan.

Di sudut yang lain, beberapa pasang

muda-mudi berasyik-masyuk menikmati suasana hati. Sembari berjalan bergandengan tangan, mereka menyusuri lika-liku jalanan. Sesekali, si perempuan terlihat manja, menyandarkan kepalanya di bahu lelaki pujaan. Di beberapa spot menarik,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

keduanya juga terlihat mengabadikan kehadirannya di Otanaha.

Benteng Otanaha sendiri adalah kawasan wisata yang relatif bisa dinikmati semua kelompok masyarakat. Tempatnya luas, suasananya tenang dengan udara yang selalu segar membuat kawasan tersebut sangat bersahabat. Terlebih bagi generasi muda

yang ingin menambah pengetahuan seputar peninggalan sejarah, juga perjuangan meraih kemerdekaan di masa silam.

Menurut sejarahnya, di antara ketiga benteng yang berdiri kokoh itu, Otanaha adalah yang paling tua. Salah satu sumber menyebut, benteng ini dibangun tahun 1522. Sementara menurut penuturan masyarakat, benteng ini ditemukan tahun 1585 oleh Naha, salah satu anak Raja Ilato yang memerintah Kerajaan Limboto. Otanaha berasal dari dua kata, yaitu: Ota dan Naha. Ota berarti benteng dan Naha adalah nama orang yang menemukan. Naha juga menemukan dua benteng lainnya dan memberi nama sesuai nama istri dan anaknya, yaitu Otahiya dan Ulupahu.

Pendirian ketiga benteng tak lepas dari kehadiran Portugis di Gorontalo. Semula kedatangan Portugis memperoleh sambutan baik. Kerjasama perdagangan pun tercipta. Tapi, ketika Portugis ingin memonopoli, serangan dilancarkan kerajaan-kerajaan lokal.

Karena itu, benteng ini merupakan saksi sejarah dari perjuangan masyarakat Gorontalo ketika berperang melawan Portugis. Ketiga benteng berbentuk bulat tanpa atap. Masing-masing benteng berdiameter sekira 20 meter. Relatif kecil, tapi cukup strategis bagi pertahanan. □

MBO

H. Ahmad Syaikh

Perjalanan Seorang PNS Memilih *Terjun ke Dunia Politik*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MEMBEDAH kisah perjalanan hidup seorang tokoh yang bermuara pada kesuksesan tentu sangat menarik. Apalagi, pada diri tokoh bersangkutan banyak sekali kisah yang terkadang tidak bisa dinilai dengan nalar serta logika. Tapi, dia bisa dijadikan tokoh inspiratif. Tokoh yang dimaksud adalah seorang politisi bernama H. Ahmad Syaikh.

H. Ahmad Syaikh dikenal sebagai seorang politisi partai dakwah, Partai Kedilan Sejahtera (PKS). Ia lahir pada tanggal 23 Januari 1965 di Desa Ciledugkulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Putera kelima dari pasangan K.H. Ma'soem bin Aboelkhair dan Nafi'ah binti Thohir ini, sebelum terjun ke dunia politik dia mengabdikan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sepanjang kariernya sebagai PNS, Ahmad Syaikh pernah menjalani ikatan dinas sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dari 1986 hingga 1989. Kemudian dilanjutkan pada BPKP Pusat pada Deputy Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

Namun, *passion*-nya pada politik membuat dia putar haluan, meninggalkan karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan penuh keyakinan dia terjun ke dunia politik. Keputusannya ternyata tidak

salah. Karir politiknya moncer hingga ia saat ini menduduki jabatan puncak di PKS, yaitu Presiden PKS. Jabatan yang setara dengan Ketua Umum di partai politik lain.

Aktif di Organisasi

Masa kecil Ahmad Syaikh tidak jauh berbeda dengan anak-anak lain, namun memang potensi bakatnya di organisasi sudah terlihat sejak menginjak sekolah dasar.

Pendidikan dasar atau sekolah dasar sampai dengan kelas V dilaluinya di Sekolah Dasar Negeri Ciledug III. Karena mengikuti sang ayah yang pindah tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Sindanglaut Cirebon, Syaikh kecil pun ikut pindah dan melanjutkan sekolahnya di SD Negeri Lemahabang II hingga lulus.

Sejak duduk di sekolah dasar, dari tahun 1971 hingga 1976, ia sangat aktif di kegiatan kepanduan Pramuka. "Saya memang sangat menyukai kegiatan kepanduan, karena lebih banyak ke alam dan banyak sekali pelajaran yang saya petik dari kedisiplinan di Pramuka," ujarnya.

Jenang sekolah menengah ia tempuh di SMP Sindang Laut dari tahun 1977 hingga 1980, kemudian berlanjut di SMA Sindang Laut, jurusan IPA, selesai tahun 1983. Bakat organisasi dan



kepemimpinannya terasah sejak ia masuk dan aktif di organisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP dan SMA, dan menjadi pengurus puncak.

Sedangkan pendidikan setingkat diploma diselesaikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1986. Saat kuliah di STAN, bakat organisasinya kian luas dan disalurkan di Senat Mahasiswa sebagai Ketua Bidang Kerohanian Islam, dan Ketua Masjid Kampus Baitul Maal Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK).

Pendidikan agama remaja diperoleh oleh Syaikh dari orang tua, kakak, guru privat, dan para kiai di Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Selepas menamatkan pendidikan di STAN, ia menikah dengan teman sekampusnya, Lilik Wakhidah. Dari pernikahan itu dikaruniai Allah tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan, yaitu Muhammad Kamil, Muhammad Yasir Naufal,

Sarah Karimah, Muthiah, Izzuddin Hamas, dan Aisyah Wafa Syahidah.

Ahmad Syaikh kemudian menjalani ikatan dinas sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dari 1986 hingga 1989, kemudian dilanjutkan pada BPKP Pusat pada Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah.

Berkarier di BPKP selama 18 tahun, Syaikh kemudian memutuskan terjun ke dunia politik. Dia kemudian tertarik bergabung pada partai berbasis Islam, Partai Keadilan (PK) yang kemudian bertransformasi, pada tahun 2002, menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pilihannya bergabung di PKS yang dikenal sebagai partai Islam dan dakwah, karena ia memang sudah lama berkecimpung di kampus di bidang kerohanian Islam dan menjadi Ketua Masjid Kampus.

Terjun ke Dunia Politik

Terjunnya Syaikh ke dunia politik membuat dirinya dihadapkan kepada konsekuensi yang mengharuskannya melepas status PNS-nya, dan mulai berkonsentrasi di politik. Pada Pemilu 2004, ia dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon dan terpilih menjadi anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Pada Pemilu 2009, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan menduduki jabatan Sekretaris Komisi C. Dan sejak 1 Oktober 2019 ia mendapat amanah sebagai Anggota DPR RI di Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Jawa Barat VII meliputi Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Politik membawanya terus ke ranah eksekutif. Tahun 2013 sampai 2018 ia menjadi Wakil Walikota Bekasi berpasangan dengan Rahmat



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Effendi. Di era Syaikhun menjabat Wakil Walikota, Kota Bekasi dinobatkan menjadi Kota Cerdas yang mampu mengelola berbagai sumber daya alamnya, yang meliputi alam, manusia, dan waktu, agar digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan pelayanan terhadap warganya.

Lalu, Kota Bekasi berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun kedua dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat.

Pada pilkada tahun 2018 ia diusung PKS dan Gerindra mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersama calon gubernurnya, Sudrajat. Namun, pasangan tersebut kalah dari Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

Karirnya di Partai Keadilan Sejahtera sendiri lancar tak terbendung. Dari hasil sidang Musyawarah Majelis Syura PKS yang digelar di Bandung, Senin (5/10/2020), Ahmad Syaikhun terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020-2025. Ia menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Shohibul Imam.

Atas amanah yang diembannya menjadi pimpinan puncak partai, dijalaninya dengan ikhlas dibarengi dengan pengalamannya berorganisasi selama puluhan tahun. Syaikhun paham, pertarungan dengan partai lain, apalagi dengan partai besar, sangatlah ketat. Untuk itu, ia memiliki kiat-kiat untuk memajukan partai. Salah satunya dengan memperkenalkan partai kepada kaum milenials.

“Saya bersyukur, PKS menjadi salah satu organisasi politik yang digandrungi kaum milenial. Meski demikian, saya mengingatkan seluruh kader PKS untuk tidak berpuas diri, dan terus melayani serta mengadvokasi masyarakat di daerahnya masing-masing,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Pernyataannya ini merespon hasil penelitian dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), salah satunya menyangkut Pilpres 2024. Survei itu menyasar warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel. Survei yang digelar pada 1-8 Juli 2023 itu menempatkan PKS pada posisi tiga besar.

“Survei belum tentu menggambarkan hasil akhir. Bisa jadi PKS malah menembus dua besar kalau kepercayaan masyarakat terhadap kami terus meningkat menjelang pemilu nanti,” tegas Syaikhun.

Ahmad Syaikhun juga mengungkapkan, PKS menargetkan meraih 15% kursi DPR RI pada Pemilu 2024. “Insya Allah pada pemilu yang akan datang, target minimal 15% akan bisa kita capai. Amiin...,”

ujarnya. Pada Pemilu 2019, ia bercerita, PKS berhasil memperoleh 11,49 juta suara atau 8,21% dari total suara sah nasional.

Ahmad Syaikhun mengatakan, PKS menjunjung tinggi politik yang berkeadaban yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan. “Mengedepankan persatuan dan kemaslahatan bersama, bukan politik yang menebar stigma, kebencian, apalagi perpecahan, Sehingga insya Allah akan menghadirkan kemenangan yang penuh berkah dan bermartabat,” katanya.

Serahkan KTA untuk non-muslim

Hal yang paling luar biasa adalah ketika sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhun menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS kepada anggota partai non-muslim. Itu terjadi di Batam pada Ahad (25/6/2023).

“Ini bukti bahwa PKS adalah partai yang terbuka bagi siapa saja yang memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun bangsa. KTA kepada anggota non-muslim itu adalah bentuk apresiasi saya kepada tokoh kristiani dan non-muslim lainnya yang ingin berjuang bersama PKS,” kata Ahmad Syaikhun.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ahmad Syaikh mengungkapkan, PKS akan terus membangun optimisme untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. "Salah satu bagian dari optimisme tersebut adalah berperan serta melahirkan kepemimpinan nasional yang baru bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat," ungkapnya.

Sebagai anggota MPR, Ahmad Syaikh juga rajin dan gencar melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya kepada masyarakat Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, April 2023 lalu.

Di sana Syaikh menjelaskan bahwa menjaga NKRI sangat penting, karena ini adalah bentuk final dari negara dan hasil kesepakatan para pendiri bangsa. "Kita wajib menjaga NKRI. Karena ini adalah hasil kesepakatan para pendiri bangsa dan bentuk final negara kita," ujar Syaikh.

Apalagi, katanya, masyarakat Rengasdengklok memiliki ikatan kuat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. "Kita tak ragukan lagi komitmen masyarakat Rengasdengklok dalam menjaga NKRI," pungkas Syaikh.

Walaupun sibuk dalam aktivitasnya di partai dan politik, Syaikh tetap aktif di masyarakat. Bersama dengan kawan-kawannya, ia mendirikan beberapa yayasan, di antaranya Yayasan At-Tibyan (Jakarta Timur) yang bergerak dalam pendidikan Islam dengan membuka TPA, Yayasan Istiqomah Bina Umat (IBU) di Pondok Gede Bekasi yang bergerak dalam Tahfidzul Qur'an (menghafalkan Alqur'an), dan Yayasan Lembaga Amil Zakat Tabung Amanah Umat (LAZ-TAMU) di Pondokgede yang bergerak di bidang pelayanan sosial dan kesehatan. Yayasan Adzkiya di Bekasi Timur yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi.

Saat ini, ia juga aktif sebagai Dewan Pengawas Yayasan Islamic Center IQRO' Pondokgede yang merupakan pelopor sekolah Islam terpadu. Selain itu, ia juga diamanahi menjadi Ketua Ta'mir Masjid Annur, Yayasan Miftahul Amal Bojong Rawalele Jatimakmur Pondokgede Bekasi.

Dalam pandangannya, agar dakwah tetap berjalan, diperlukan adanya komitmen dari setiap aktivis dakwah terhadap Islam dan Gerakan Islam, di samping dukungan dari masyarakat. Ia juga mengembangkan Asyikpreneur, sebuah lembaga pemberdayaan kewirausahaan dan rajin menyampaikan kegiatannya ini di ranah medis sosial.

Kesibukan kerja juga tidak menghalanginya secara rutin ikut dalam kegiatan olahraga bulutangkis, renang, bersepeda, dan menembak. Saat ini, ia dipercaya untuk menjadi Ketua Perbakin (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia) Cabang Kota Bekasi. □

DER



Kontestasi Politik dan Kesadaran Kebangsaan Kita

TAHAPAN demi tahapan menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2024 terus bergulir. Hangatnya kontestasi politik walaupun secara sah baru akan dimulai setelah peluit masa kampanye dibunyikan pada 28 November 2023 nanti sudah kian terasa.

Hari-hari ini, setelah melewati periode penjurian internal di partai masing-masing, penyelenggara Pemilu, yaitu KPU akan menetapkan daftar calon legislatif baik di tingkat pusat, DPR RI, sampai DPRD tingkat II. Proses itu berlanjut pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 25 November 2023.

Pada periode itulah biasanya situasi kompetisi akan semakin terasa. Karena sejatinya, Pemilu adalah perebutan kekuasaan yang disahkan secara konstitusional setiap lima tahunan.

Kita baru memperingati 25 Tahun Reformasi, situasi yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru. Kala itu, Pemilu yang berlangsung sejak 1971 hampir selalu dapat dipastikan siapa pemenangnya. Kala itu, peserta Pemilu hanya ada tiga. Dua partai politik PPP, PDI, dan Golongan Karya atau Golkar yang tak mau disebut sebagai "partai politik".

Desain politik Orde Baru dengan semboyan mono loyalitas telah menggerakkan mesin ABRI (sekarang TNI), Birokrasi, untuk selalu memenangkan Golkar. Parlemen saat itu tak ubahnya sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah. Interupsi di gedung DPR sebagai barang langka dan dianggap aneh. Akibatnya, seperti lagu Iwan Fals, wakil rakyat seperti paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju.

Reformasi mengubah lanskap politik. Partai politik tak hanya

tiga, pemenang pemilu tak selalu satu partai saja. Kompetisi lebih dinamis, partai kecil jika terus menyuarakan kepentingan rakyat secara konsisten dan memiliki figur kepemimpinan yang kuat bertahan bisa menjadi partai besar. Tetapi, partai besar dan partai lama sekalipun tak ada jaminan untuk tetap bertahan sebagai partai papan atas.

Dalam dinamika kontestasi politik yang begitu kuat setiap lima tahunan ini, beruntung bangsa Indonesia memiliki ikatan yang kokoh, yaitu Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Dasar konstitusi UUD NRI Tahun 1945, komitmen keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat untuk terus-menerus mewujudkan masyarakat yang pluralistik dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan falsafah dasar negara, sebagai masyarakat religius kita tak ingin perebutan kekuasaan politik hanya untuk politik. Hampir keseluruhan elite politik menyadari kontestasi bukan tujuan akhir, tetapi menjadikan masyarakat adil dan makmur dalam kesejahteraan bersama itulah tujuan akhirnya.

Tujuan akhir itu tak mungkin dicapai tanpa persatuan, di mana seluruh elemen bangsa bekerja sama, bergotong royong. Hal inilah yang mungkin sulit dipahami oleh bangsa lain, kok bisa bangsa yang berbeda agama, beragam suku, budaya, adat-istiadat bisa bersatu. Di Timur Tengah contohnya, ada negara dengan mayoritas satu agama, cara berpakaian hampir sama, tetapi bertikai terus-menerus, konflik bersenjata, telah membuat menjadi negara gagal (failed state).

Kita dengan beragam warna, tetap bersatu. Inilah anugerah

Oleh:
Ahmad Muzani
Wakil Ketua MPR RI



terbesar Tuhan untuk bangsa ini. Kita patut mensyukuri anugerah itu, caranya dengan tetap merajut kebersamaan sesama elite, sehingga dalam situasi panas karena persaingan politik, tidak sampai berujung pada perselisihan yang memecah belah bangsa ini.

Karena itulah penting kiranya untuk bersama-sama mengingat dan merenungkan kembali hakikat kebangsaan kita. Bahwa ada tujuan mulia dari sekedar pertarungan kekuasaan di Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sepanas-panasnya persaingan dan pertarungan politik, ada empat pilar yang harus dijaga. Empat pilar kebangsaan yang disebut di atas juga menjadi koridor, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye Pemilu berlangsung.

Bahwa kontestasi politik bukan pertikaian politik. Para *Founding Fathers* bangsa ini telah mengajarkan pentingnya konsensus nasional dalam penyelesaian masalah bangsa yang cukup pelik.

Di dalam konsensus nasional yang dilandasi permusyawaratan dan permufakatan yang positif akan selalu terjadi dan harus diusahakan terus-menerus. Karena politik Indonesia tak bercirikan politik menang-menangan atau yang dikenal *the winners takes all*. Karena itulah desain politik pasca reformasi adalah adanya koalisi-koalisi antar partai politik. Karena dalam sudut pandang yang positif, koalisi memungkinkan semakin banyak pihak bekerja bersama dan kebersamaan yang besar melahirkan ketentraman di masyarakat.

Yang kecil tak merasa ditinggalkan dan yang besar tak merasa bisa mengatur dan menguasai segalanya. Dengan Empat Pilar kebangsaan demokrasi kita berjalan walaupun menghadapi pasang surut, tetapi memperlihatkan arah penguatan, semakin kokoh dan bermartabat.

Kita telah meninggalkan sejarah politik “tumpas kelor,” tradisi kelam masa kerajaan yang menyebabkan kelompok berkuasa menghabisi lawan-lawan politik hingga anak keturunannya. Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, jika kita terus mampu menjaga keberadaban politik nasional kita maka ini akan menjadi contoh bagi bangsa lain.

Dalam konteks Pemilu, setelah kesadaran ini ada dalam setiap kontestan Pemilu maka juga harus dibarengi oleh pelaksana Pemilu yang juga melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan itu ternoda.

Sehingga, ada nilai terpenting sebagai bangsa. Bahwa kita mampu menyelesaikan perebutan kekuasaan yang legal ini lewat Pemilu dengan tidak merobek keutuhan kebangsaan kita. Karena ini menjadi pondasi bagi keberlangsungan estafet kepemimpinan nasional bagi generasi ke generasi di masa yang akan datang. Apalagi, telah tumbuh generasi baru di mana mereka terdidik, memahami politik dalam sudut pandang yang lebih rasional dan terbuka.

Maka, tugas para pemangku kepentingan Pemilu, bahwa keberhasilan estafet kepemimpinan nasional sesungguhnya adalah jaminan akan tetap adanya Indonesia di masa yang akan datang. □

Mengungkit Potensi Besar Umat

Para doktor ramai-ramai memberi gagasan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Perspektif Islam. Gagasan mereka yang dihimpun dalam satu buku memberi paparan dan solusi bagaimana memberdayakan umat sesuai tuntutan Islam. Anggota MPR pun ikut urun rembuk.

JUMLAH atau kuantitas manusia merupakan suatu potensi besar bagi suatu negara. Tak heran bila suatu negara disebut besar (berpengaruh) bila memiliki ciri, memiliki jumlah penduduk yang melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam katagori negara besar, sebab memiliki jumlah penduduk mencapai 273,8 juta jiwa (2021).

Jumlah penduduk merupakan potensi, namun potensi akan memiliki nilai atau berdaya guna bila dikelola dengan baik. Namun, bila tidak bisa di-*manage* dengan benar, keberadaannya malah akan menjadi beban. Untuk itu, semua ingin bahwa potensi yang ada bisa menjadi satu nilai yang mampu dimanfaatkan dan memberi kesejahteraan.

Banyak jalan untuk menuju ke sana. Salah satu panduannya lewat buku yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Dalam Perspektif Islam*. MSDM merupakan hal yang sangat penting, sehingga buku yang diterbitkan oleh UNJ Press ini ditulis oleh para doktor pakar MSDM, kemudian diberi pengantar oleh Tenaga Ahli Utama Kepresidenan RI, dan diedit oleh doktor-doktor MSDM. Di antara doktor yang mengalirkan ide dan gagasan di buku itu adalah wakil rakyat dari Fraksi PKS, yakni Dr. Jazuli Juwaini, MA.

Sebab pembahasan MSDM dalam perspektif Islam maka dalam setiap bab dan sub-bab para penulis dominan menyematkan kata Islam dalam judul. Contoh, *Bab I: Manajemen SDM Dalam Perspektif Islam. Bab II: Manajemen Kepemimpinan Islam. Bab III: Membangun SDM Islami*. Buku itu sendiri memiliki ketebalan xiv + 334 halaman yang terbagi dalam empat bab.

Jazuli Juwaini di halaman 101 yang menulis dengan judul *Pendidikan Nasional: Perspektif Islam dan Konstitusi* menguraikan, dalam perspektif Islam, pendidikan menjadi bagian penting dari pengembangan manusia untuk melaksanakan tujuan penciptaan-

Nya di dunia. Islam selalu mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan menuntut ilmu pengetahuan, agar dengan demikian mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Lebih lanjut dalam tulisan di halaman 103 dikatakan, ayat pertama yang turun ke dunia menyuruh manusia untuk membaca. Dari sini Jazuli Juwaini menegaskan bahwa Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan karena menurut Islam, pendidikan adalah juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Dr. H. Ali Mochtar Ngabalin M.Si., dalam pengantar buku menegaskan bahwa MSDM dalam Islam bukanlah hal yang baru, karena sejak Nabi Adam diciptakan, Allah telah mencanangkan fungsi dan peran manusia diutus ke dunia sebagai khalifah atau pemimpin yang bertujuan agar dunia ini dapat dikelola dengan baik, seimbang, dan berkelanjutan.

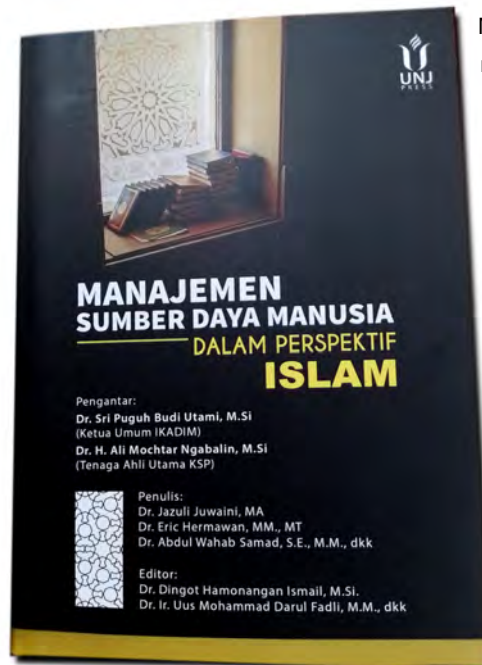
Paparan Ngabalin di halaman ix itu lebih lanjut mengatakan, peran manusia ditempatkan pada posisi yang jauh lebih besar, bukan hanya mengurus perusahaan tetapi ditugaskan untuk mengurus manusia itu sendiri, alam raya, beserta kesejahteraan lingkungannya.

Dalam sampul belakang buku dijelaskan, buku yang menyuguhkan 24 artikel (tulisan) itu diterbitkan untuk menawarkan gagasan cemerlang mengenai MSDM Perspektif Islam:

manajemen dakwah virtual, wirausaha, kepemimpinan, pendidikan, keselamatan dan kesehatan kerja, inovasi dan kreatifitas, serta berbagai hal lainnya.

Buku ini layak untuk dijadikan bahan bacaan menarik bagi mahasiswa, peneliti, pemerhati MSDM, dosen, serta masyarakat umum yang ingin mendalami MSDM dalam perspektif Islam. □

AWG



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI